

Penulis:

Ni Made Ras Amanda Gelgel

Alem Febri Sonni

POTRET KUALITAS SIARAN TELEVISI PROGRAM BERITA DI INDONESIA



Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
Jl Ir H Juanda no 36, Jakarta Pusat.



Potret

Kualitas Siaran Televisi Program Berita Di Indonesia



Komisi Penyiaran Indonesia
Jakarta, 2022

Cetakan Pertama: Desember 2022;

Potret Kualitas Siaran Televisi Program Berita Di Indonesia

Hak Cipta pada © KPI

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

-Cet. I. –Jakarta: KPI; 2022

XII+ 200 hlm, 15 cm X 22 cm

ISBN: 978-602-19404-9-5

Penulis:

Ni Made Ras Amanda Gelgel

Alem Febri Sonni

Tim Data dan Foto KPI Pusat:

Ira Naulita

Agung Rahmadiansyah

Editor: Pinckey S. Putra

Desain Cover Yogi Kusnandar

Penata Letak & Desain Grafis M. Iman Tabri



KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
Lembaga
Negara
Independen

Penerbit:

Komisi Penyiaran Indonesia

Jl. Ir. H. Djuanda No. 36,

Jakarta 10120 Indonesia

Telp. 021-22346444, 22035002, 22346384

Fax. 021-21203907, 21203922

Potret

Kualitas Siaran Televisi Program Berita Di Indonesia

Penulis:
Ni Made Ras Amanda Gelgel
Alem Febri Sonni

Buku ini diterbitkan oleh:
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Tidak untuk diperjualbelikan

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Lembaga Negara Independen

ADA KELUHAN SIARAN TELEVISI & RADIO ?

SAMPAIKAN ADUAN KE KOMISI PENYIARAN INDONESIA MELALUI:

Website : kpi.go.id
Website/Aplikasi : SP4N-LAPOR!

LAPOR!

pengaduan@kpi.go.id
@kpi Pusat
@KPI_Pusat
@KPI_Pusat
081213070000

Persuratan/Tatap Muka:
Jl. Ir. H. Juanda No 36, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari UU Nomor 19 tahun 2002, bahwa: Kutipan Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)

Kata Pengantar

Ketua KPI

Kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2022 sudah selesai dilaksanakan. Sesuai rencana dan koordinasi pelaksana, masing-masing kategori program siaran akan didokumentasikan dalam bentuk buku dengan tambahan analisis yang lebih mendalam dari para penulis. Harapannya indeks ini dapat dilihat dari berbagai perspektif karena terdapat sentuhan akademis dan pengalaman penulis.

Buku yang saat ini ada di genggaman pembaca merupakan potret kualitas program siaran televisi. Ada delapan kategori yang dituangkan dalam bentuk buku, di antaranya adalah program siaran Religi, Talkshow, Wisata dan Budaya, Berita, Variety Show, Anak, Infotainment dan Sinetron. Masing-masing buku tidak hanya mendeskripsikan penilaian para ahli atas delapan kategori tetapi juga memberikan analisis sekaligus saran perbaikan mutu kualitas program.

Saya berharap buku ini dapat menjadi acuan untuk menonton siaran televisi yang berkualitas dan menambah khasanah model penilaian siaran televisi.

Pada tahun 2023, kita akan memasuki babak baru pertelevisian Indonesia yaitu televisi digital. Televisi akan tumbuh semakin banyak dengan kualitas gambar yang jernih dan program siaran yang semakin beraneka. Oleh karena itu, buku ini dapat digunakan oleh para pemilik televisi baru untuk membuat program siaran yang berkualitas

Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, Komisi I DPR RI, Kominfo RI, Bappenas, para Komisioner KPI dan utamanya bagi penulis buku ini dan 12 Universitas yang ikut serta dalam kerja sama mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan indeks kualitas sampai kemudian pembuatan buku ini. Mereka semua adalah bagian penting yang ikut serta mendorong mutu penyiaran menjadi lebih baik.

Agung Suprio

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia

Kata Pengantar

Penanggung Jawab Indeks

Indeks Kualitas Yang Menginspirasi
Yuliandre Darwis, Ph.d

Delapan tahun perjalanan panjang indeks kualitas program siaran televisi telah menginspirasi banyak hal yang bermanfaat bagi publik maupun dunia penyiaran Indonesia yang kini memasuki fase baru yakni era penyiaran digital. Data indeks kualitas selama proses itu turut berkontribusi terhadap ekosistem penyiaran yang berkembang di berbagai sektor dan stakeholder di Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator penyiaran sangat dibantu dengan adanya data indeks kualitas yang dalam proses penilaiannya turut melibatkan para pihak termasuk ahli yang berasal dari 12 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Sehingga dalam proses revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), anugerah KPI, evaluasi tahunan, literasi, sinkronisasi data Pemantauan, Pengaduan, dan Penjatuhan Sanksi KPI, pemetaan program siaran berkualitas di masing-masing televisi, pembinaan terhadap lembaga penyiaran dan kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan KPI lainnya pun banyak dibantu dari hasil indeks kualitas.

Pun demikian bagi lembaga penyiaran dalam pembuatan program siarannya dapat menjadikan rujukan hasil indeks sebagai salah satu bahan untuk memproduksi program siaran yang bermutu dan dibutuhkan publik. Dalam memilih tontonan yang baik, masyarakat dapat menjadikan hasil indeks sebagai panduan

dalam menonton program yang positif. Para pengiklan pun bisa merujuk dari indeks dalam memasukan iklannya pada program-program yang berkualitas. Dan masih banyak lagi tentunya manfaat dari indeks kualitas di berbagai aspek.

Bagi akademisi, indeks kualitas menginspirasi munculnya dialektika pemikiran dengan karya-karya yang dihasilkan. Sebagai akademisi yang lama bergelut dengan dunia ilmu pengetahuan saya sangat senang sekaligus mengapresiasi para penulis yang menuangkan gagasannya dalam buku besar potret kualitas program siaran terhadap delapan kategori program siaran, diantaranya; Berita, Talkshow, Variety Show, Infotainment, Anak, Sinetron, Religi, Wisata Budaya.

Ini merupakan mimpi kita bersama melahirkan buku induk atau buku babon yang membingkai kualitas program siaran televisi di Indonesia dalam ikatan tulisan yang abadi yang selama bertahun-tahun dijadikan bahan penelitian. Buku-buku ini melengkapi literatur dan khasanah pengetahuan komunikasi, media, dan penyiaran dengan topik-topik yang teraktual dan kontekstual yang bersumber dari hasil indeks sehingga karya ini pantas menjadi bacaan primer di berbagai ruang dialektika pemikiran. Atau dengan kalimat lain, tak berlebihan kiranya buku ini menjadi sumber bacaan utama pada aspek potret kualitas penyiaran di Indonesia yang menarik dan menggelitik di era penyiaran digital.

Saya ucapkan selamat dan terima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam melahirkan karya gemilang abad digital. Selamat membaca, saya yakin buku-buku ini menginspirasi kita semua.

Kata Pengantar

Penulis

Puji syukur penulis ucapkan atas anugerah yang diberikan sehingga Buku Potret Kualitas Siaran Berita Televisi di Indonesia dapat terselesaikan. Buku ini adalah buku yang disusun berdasarkan pada hasil riset indeks kualitas siaran televisi di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2022 yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia.

Buku Potret Kualitas Siaran Berita Televisi di Indonesia ini terbagi dalam beberapa bab. Bab pertama merupakan catatan hasil perjalanan riset Indeks Kualitas Tayangan Televisi di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2022 khususnya pada Tayangan Berita. Tidak hanya angka indeks yang diperoleh namun juga permasalahan yang timbul serta kasus-kasus khusus yang marak pada tahun tersebut. Pada bab kedua, terbagi menjadi beberapa sub bab yang lebih menekankan pada aspek kualitas secara naratif dari beragam kasus dan catatan yang muncul dalam proses riset berlangsung. Sub bab terbagi berdasarkan dimensi-dimensi dan indikator yang digunakan dalam mengukur indeks kualitas. Pada bab ketiga, tertulis bagaimana harapan, tantangan dan gambaran mengenai tayangan berita di televisi di Indonesia ke depannya. Kami paham buku ini jauh dari sempurna, namun biarkan buku ini mencatatkan upaya anak bangsa dalam mewujudkan tayangan yang mendidik dan bermanfaat.

Walau buku ini diterbitkan oleh KPI, namun buku ini juga kami persembahkan untuk para pekerja jurnalis televisi, para khalayak tayangan televisi di Indonesia, dan para pemerhati tayangan berita di televisi yang memiliki satu harapan, yakni tayangan berita tetap independen serta selalu berpihak pada kebenaran dan rakyat demi terwujudnya dunia penyiaran yang demokratis.

Denpasar & Makassar, November 2022

Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel S.Sos M.Si

Dr. Alem Febri Sonni S.Sos M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar Ketua KPI	V
Kata Pengantar Penanggung Jawab Indeks	VII
Kata Pengantar Penulis	IX
BAB I Pendahuluan	1
- Tayangan Berita dan Kerja Jurnalistik.....	3
- Riset Kualitas Tayangan Berita	5
- Indeks Kualitas Tayangan Berita di Televisi Indonesia Tahun 2015	12
- Indeks Kualitas Tayangan Berita di Televisi Indonesia Tahun 2016	16
- Indeks Kualitas Tayangan Berita di Televisi Indonesia Tahun 2017	26
- Indeks Kualitas Tayangan Berita di Televisi Indonesia Tahun 2018	33
- Indeks Kualitas Tayangan Berita di Televisi Indonesia Tahun 2019	50
- Indeks Kualitas Tayangan Berita di Televisi Indonesia Tahun 2020	59

- Indeks Kualitas Tayangan Berita di Televisi Indonesia Tahun 2021	63
- Indeks Kualitas Tayangan Berita di Televisi Indonesia Tahun 2022	68
BAB II Potret Kualitas Tayangan Program Berita Di Televisi Indonesia	73
A. Fakta, Opini dan Verifikasi Sumber Dalam Tayangan Berita	73
B. Keberimbangan dan Keberagaman Berita;	105
C. Obyektifitas dan Kepentingan (Publik) Dalam Tayangan Berita Televisi Di Indonesia;	127
D. SARA, Kekerasan dan Pornografi Dalam berita;	147
E. Praktik <i>Trial by the Press</i>	168
BAB III Penutup	185
- Tantangan Jurnalisme Berkualitas Vs Kecepatan Media Sosial.	188
- Perubahan Bentuk dan Ragam Jurnalisme	189
Referensi	193
Profil Penulis	199

Bab I.

Pendahuluan

Berita adalah salah satu bentuk dan ragam isi dari siaran di televisi. Berita adalah salah satu bentuk dari isi media penyiaran. Penyiaran juga menjadi bagian dari dan bagaimana masyarakat berkembang. Memiliki sistem penyiaran yang baik dan kuat akan menjadi modal besar dalam bagaimana bangsa dan negara berkembang. Indonesia memiliki cita-cita membentuk penyiaran yang demokratis, dan bagaimana tayangan berita dalam penyiaran menjadi bagian yang tidak terlepas.

Pengembangan sistem penyiaran di Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan penyiaran yang demokratis. Pertimbangan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

- (1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran diakui sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (2) Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (4) Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.
- (5) Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa. (Rahayu dkk, 2014)

Maka berita sebagai bagian kerja dari jurnalistik yang ditayangkan dalam siaran-siaran televisi memiliki

tujuan utama untuk mewujudkan cita-cita sistem penyiaran yang demokratis. Berita dalam tayangan televisi kemudian memiliki pedoman-pedoman nilai yang mendukung asas-asas demokrasi. Berita yang ditayangkan pun selayaknya memiliki rasa tanggungjawab sosial kepada masyarakat penonton atau khalayaknya.

Tayangan Berita dan Kerja Jurnalistik

Tujuan utama dari semua tujuan jurnalisme adalah menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Hal ini menunjukkan bagaimana informasi yang disampaikan oleh media dalam berita berpengaruh pada kehidupan khalayak yang membacanya. Maka kesahihan berita menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap bagaimana khalayak menentukan aksi atau pendapatnya. Jurnalisme sendiri terikat pada beberapa prinsip dasar. Prinsip jurnalisme yang dikemukakan oleh Kovach dan Rosenstiel adalah:

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.
2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga.
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi.
4. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita.
5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan.
6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga.

7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan.
8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional.
9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Etika jurnalisme adalah bagian dari gagasan jurnalisme bertanggung jawab. Ward¹ menjelaskan beberapa kewajiban khusus pada jurnalis:

1. Kewajiban etis secara umum (general ethical duties): Seperti mana setiap warga yang lain, jurnalis harus membuat diri mereka sendiri berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etik yang umum seperti jujur terpercaya, menepati janji, menghindari kecederaan dan melayani publik dengan Kebaikan. Memang adakalanya dalam reporting dan editing prinsip-prinsip ini diartikan secara spesifik.
2. Peran sosial jurnalisme: Sebagaimana semua profesional, jurnalis menggunakan keterampilan mereka untuk suatu peran sosial dan memenuhi ekspektasi publik. Peran ini terkadang dipahami sebagai tumbuh dari suatu kontrak sosial antara jurnalisme dengan masyarakat.
3. Dampak dan pengaruh (impact and influence): Andaikan jurnalisme tidak punya peran sosial khusus pun, jurnalisakan menimbulkan tanggung

¹. Stephen J.A. Ward, 2009, "Researching Ethics. History of Journalism Ethics" <http://journalismethics.info/research-ethics/history.htm>

jawab etis, disebabkan dampak mereka (due to their impact) pada individu dan kelompok yang mereka liput dan terhadap masyarakat yang mereka layani.

Di Indonesia, terdapat organisasi yang mewadahi jurnalis televisi, Ikatan Journalistik Televisi Indonesia (IJTI), yang telah menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi, yang dalam mukaddimahnya harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jurnalis televisi Indonesia yang tergabung dalam asosiasi ini. Kode etik jurnalis televisi ini kemudian menjadi pedoman perilaku jurnalis televisi dalam melaksanakan profesinya. Jurnalis Televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai seorang pribadi, jurnalis adalah pribadi yang mandiri dan bebas dari benturan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung. Seorang jurnalis juga diharapkan menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani. Seorang jurnali televisi di Indonesia juga tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesinya. Dengan prinsip-prinsip mendasar di atas maka diharapkan jurnalis akan menghasilkan tayangan pemberitaan yang demokratis dengan mampu membangun kepercayaan masyarakat atau khalayak.

Riset Kualitas Tayangan Berita

Sejarah penyiaran Indonesia telah membawa media penyiaran saat ini berada pada babak baru. Setelah reformasi terlewati selama beberapa dekade, media di Indonesia tumbuh

dan berkembang secara unik jika dibandingkan banyak negara lain. Saat ini, penyiaran Indonesia telah memasuki fase baru di mana migrasi TV analog ke digital diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah pun telah memastikan untuk memberhentikan siaran TV analog di tahun 2022.

Memasuki era tersebut, peningkatan kualitas program siaran TV perlu adanya. Selama ini, program-program TV diukur melalui riset-riset kuantitatif berdasarkan jumlah penonton. Namun, tidak dapat dipungkiri kualitas dari program siaran TV perlu dijaga dan ditingkatkan mutunya untuk mendukung siaran yang bertanggung jawab.

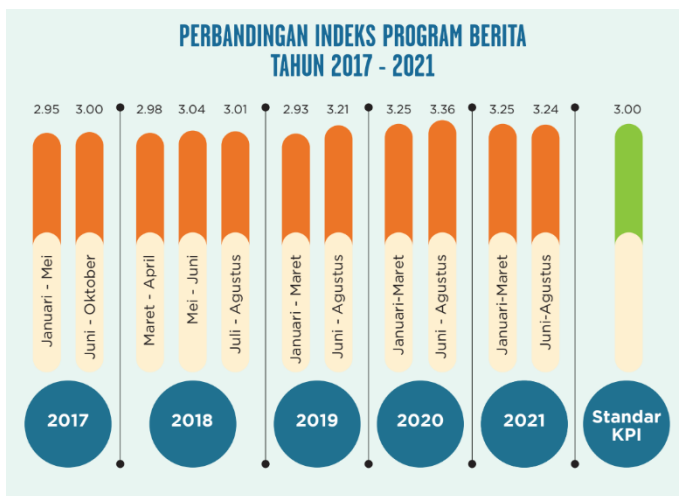
Dengan dasar itu, Komisi penyiaran Indonesia KPI kemudian menginisiasi pengukuran kualitas program siaran televisi Indonesia melalui riset yang menggandeng 12 perguruan tinggi di Indonesia. Adapun ke-12 perguruan tinggi tersebut yakni, Universitas Sumatera Utara (Medan), Universitas Andalas (Padang), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Jakarta), Universitas Padjadjaran (Bandung), Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta), Universitas Negeri Surabaya (Surabaya), Universitas Udayana (Denpasar), Universitas Tanjungpura (Pontianak), Universitas Hasanuddin (Makassar), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin) dan Universitas Pattimura (Ambon)

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara independen di tingkat pusat dan daerah yang salah

satu tugasnya adalah melakukan pengawasan agar program siaran televisi makin baik dan berkualitas. Oleh karenanya, KPI perlu data mengenai kualitas program siaran televisi. Data itu dipakai sebagai bahan dalam membuat perbaikan. Data kualitas program siaran ini mencakup beberapa aspek sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPI dan stasiun televisi untuk memperbaiki mutu dan kualitas siaran televisi.

Data kualitas program siaran ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kuantitas (berapa jumlah penonton) tetapi bagaimana kualitas program siaran. Data ini diharapkan tidak hanya berguna bagi KPI, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh stasiun televisi, dan stakeholder lain (biro iklan, perusahaan, LSM, perguruan tinggi dsb) untuk peningkatan kualitas program siaran televisi.

Grafik 1. Perbandingan Indeks Program Berita Tahun 2017-2021

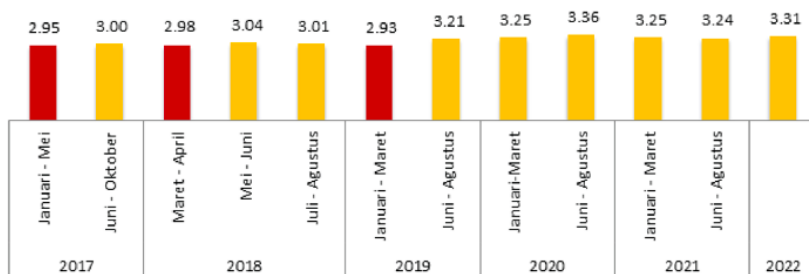


Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2021.

Pada indeks kualitas tayangan berita tahun 2022, angka naik menjadi 3,31.

Grafik 2. Perbandingan Indeks Program Berita Tahun 2017-2022

Perbandingan Indeks Program Berita Tahun 2017 - 2022



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2022.

Hasil penelitian Riset Indeks kualitas nantinya diharapkan bisa diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan yang memiliki perhatian kepada program siaran televisi : perguruan tinggi, LSM, kelompok masyarakat sipil dan sebagainya. Selain itu, dapat menjadi fungsi pemberdayaan agar program acara televisi bisa lebih baik. Kegiatan ini lebih bersifat penilaian (assesment) terhadap program acara televisi, dengan harapan lembaga penyiaran bisa melakukan pembenahan.

Riset ini dirancang secara periodik (longitudinal) dan menyertakan responden yang sama dari satu waktu ke waktu lain atau dikenal sebagai informan. Tujuan dari riset

panel ini adalah membandingkan dari satu waktu ke waktu lain. Penelitian ini bersifat evaluasi terhadap kualitas isi program siaran televisi yang dilakukan oleh informan ahli. Menggunakan kuesioner yang berisikan butir-butir dari indikator penilaian kualitas program siaran televisi, yang memiliki poin sebagai alat pengumpulan data yang valid dan sah pada program siaran yang ditayangkan oleh setiap lembaga penyiaran. Berikut penentuan sampel program TV yang dilakukan:

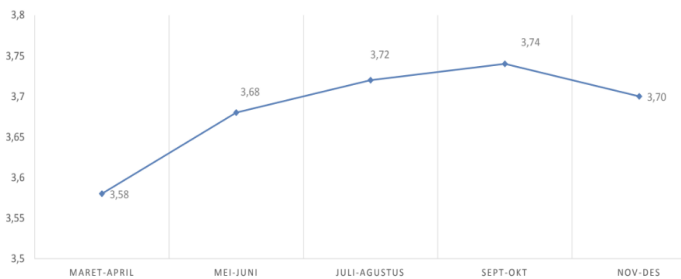
- Populasi dari penelitian ini adalah semua program siaran dari 8 kategori program yang ditayangkan di 15 stasiun televisi berjaringan pada rentang waktu pukul 04.00 – 24.00 selama 3 bulan.
- Penelitian ini akan menggunakan sampel program TV. Penarikan sampel tersebut akan dilakukan secara acak agar sampel bisa mewakili (merepresentasikan) populasi.
- Pemilihan sampel menggunakan prosedur multistage sampling.
- Menentukan sumber konten 8 Kategori di 15 Televisi Berjaringan
- Memilih tanggal dilakukan secara acak dengan tahapan: Bulan E Minggu E Hari

Setelah melakukan riset indeks kualitas program siaran TV sejak 2015, terdapat perbandingan hasil indeks kualitas program siaran televisi dengan perolehan yang cukup fluktuatif. Grafik di bawah menunjukkan perbandingan Indeks Program Berita dari tahun 2017 sampai dengan

tahun 2021. Indeks yang paling tinggi tercatat pada periode Juni-Agustus tahun 2020. Sedangkan yang terendah yaitu pada periode Januari-Maret tahun 2019. Meskipun terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada indeks periode Januari-Maret tahun 2020 dan terus meningkat hingga periode Juni-Agustus tahun 2020, namun pada periode Juni-Agustus tahun 2021 hasil indeks mengalami penurunan.

Grafik 3. Perbandingan Indeks Kualitas Program Berita

PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS PROGRAM BERITA



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2015.

Angka ini membaik tipis dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu pada angka 3,25 pada periode pertama dan 3,24 pada periode kedua. Walau dapat dilihat bahwa indeks tayangan berita televisi di Indonesia berada di atas standar Komisi Penyiaran Indonesia yakni pada angka 3,00, namun tayangan berita di televisi Indonesia tetap memiliki banyak catatan-catatan khusus yang akan dibahas pada bab

berikutnya. Bab berikutnya akan mencoba membahas dan mendiskusikan catatan-catatan tersebut yang diperoleh dalam Focus Group Discussion bersama para informan ahli pasca penilaian yang dilakukan pada informan ahli.

Adapun penilaian dan analisis terhadap program berita dilihat pada delapan dimensi aspek kualitas yakni:

- Dimensi 1: Akurat adalah informasi harus berdasarkan fakta, yaitu benar terjadi dan benar diucapkan oleh narasumber.
- Dimensi 2: Adil, Berimbang, dan tidak berpihak adalah memberikan informasi dengan porsi dan kesempatan yang sama kepada semua pihak, berasal dari sumber berita kedua belah pihak, bisa ditambah dengan sumberberita yang netral, dengan durasi yang sama dan bermanfaat untuk publik bukan untuk kepentingan seseorang atau kelompok tertentu.
- Dimensi 3: Tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi adalah tidak menyajikan fakta bercampur dengan opini.
- Dimensi 4: Tidak mempertentangkan agama, ras suku, dan antargolongan adalah informasi yang disajikan tidak mengandung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Dimensi 5: Tidak membuat berita bohong adalah semua informasi yang disajikan benar.
- Dimensi 6: Tidak membuat berita sadis adalah menyajikan yang tidak keji.

- Dimensi 7: Tidak membuat berita cabul adalah informasi yang disajikan tidak menyajikan audio dan visualisasi unsur pornografi.
- Dimensi 8: Menerapkan prinsip praduga tak bersalah adalah program siaran tidak menghakimi tersangka sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim.

Namun pada tahun 2015 hingga 2016, Komisi Penyiaran Indonesia menggunakan dimensi yang berbeda. Untuk itu akan dipaparkan terlebih dahulu bagaimana indeks kualitas tayangan berita dari tahun ke tahun. Dari paparan di bawah ini juga akan terlihat apa yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia penyiaran di Indonesia. Data longitudinal ini akan juga menggambarkan bagaimana perkembangan kualitas tayangan berita di televisi di Indonesia. Data juga menunjukkan dimensi-dimensi mana saja yang masih perlu ditekankan perhatiannya dalam pengaruhnya kepada indeks kualitas tayangan berita di Indonesia selama ini.

Berikut akan dipaparkan secara garis besar bagaimana perjalanan indeks kualitas tayangan program berita televisi di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2022. Tidak hanya angka indeks namun juga permasalahan yang timbul serta perkembangan indeks kualitas dari tahun ke tahun.

Indeks Kualitas Tayangan Berita Di Televisi Indonesia Pada Tahun 2015

Pada tahun 2015, dilakukan lima kali survey indeks untuk menghitung indeks kualitas tayangan program berita televisi di Indonesia. Pada indeks kali ini angka terbesar adalah

pada angka 5, dengan standar kualitas yang KPI tetapkan adalah 4. Pada tahun 2015, penghitungan indeks dilakukan setiap periode dua bulan, mulai dari Maret-April, Mei-Juni, Juli-Agustus, September-Oktober, dan periode terakhir pada November-Desember. Berikut perbandingan indeks kualitas tayangan program berita per periodenya.

Grafik menunjukkan terjadi peningkatan kualitas tayangan program berita di televisi di Indonesia pada periode pertama hingga periode keempat di tahun 2015, namun grafik juga menunjukkan adanya penurunan angka indeks pada periode akhir yakni di angka 3,70. Komisi Penyiaran Indonesia juga mencatat pada tahun ini program berita di televisi di Indonesia belum mencapai standar kualitas tayangan yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia yakni di angka 4.

Dimensi dalam kualitas tayangan program berita televisi di Indonesia, pada tahun 2015 menggunakan beberapa dimensi atau indikator sebagai penanda kualitas tayangan televisi. Dimensi yang digunakan yakni memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, membentuk jatidiri bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman, membangun mental mandiri, informatif, edukatif, hiburan yang sehat, perekat sosial/empati sosial, transfer budaya, nilai-nilai bangsa dan kearifan lokal, pengawasan, menghormati nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan antar golongan, menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, melindungi kepentingan publik, menghormati kehidupan pribadi, melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja, melindungi orang atau kelompok

masyarakat tertentu, tidak bermuatan seksual, tidak bermuatan kekerasan, tidak bermuatan mistik, horror dan supranatural, tidak bermuatan rokok, napza, dan minuman beralkohol, dan tidak bermuatan praktik perjudian. Berikut dipaparkan bagaimana perbandingan hasil indeks kualitas program berita per periode pada tahun 2015.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Indeks Kualitas Program Berita Berdasarkan Periode dan Indikator Tahun 2015

BERITA	PERBANDINGAN HASIL					SELISIH SKOR
	Maret-April 2015	Mei-Juni 2015	Juli-Agust 2015	Sept-Okt 2015	Nov-Des 2015	
Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa	3.4	3.56	3.55	3.57	3.56	-0.01
Membentuk jatidiri bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman	4.3	4.3	4.2	4.21	4.16	-0.05
Membangun mental mandiri	3.81	3.91	3.82	3.92	3.83	-0.09
Informatif	3.7	3.74	3.75	3.79	3.73	-0.06
Edukatif	3.59	3.7	3.73	3.8	3.63	-0.17
Hiburan yang sehat	3.59	3.68	3.68	3.72	3.65	-0.07
Perekat sosial/empati sosial	3.34	3.47	3.52	3.59	3.58	-0.01
Transfer budaya, nilai-nilai bangsa dan kearifan local	3.25	3.45	3.53	3.57	3.59	0.02
Pengawasan	3.33	3.51	3.62	3.59	3.59	0
Menghormati nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan antar golongan	3.73	3.66	3.67	3.81	3.67	-0.14
Menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesucilaan	3.07	3.34	3.58	3.52	3.59	0.07
Melindungi kepentingan publik	3.69	3.81	4.01	3.89	3.8	-0.09
Menghormati kehidupan pribadi	3.58	3.68	3.84	3.83	3.79	-0.04
Melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja	3.66	3.74	3.86	3.86	3.83	-0.03
Melindungi orang atau kelompok masyarakat tertentu	3.56	3.7	3.67	3.66	3.66	0
Tidak bermuatan seksual	3.51	3.58	3.63	3.63	3.68	0.05
Tidak bermuatan kekerasan	3.69	3.71	3.75	3.79	3.73	-0.06
Tidak bermuatan mistik, horor, dan supranatural	3.91	3.93	3.89	3.86	3.85	-0.01
Tidak bermuatan rokok, napza, dan minuman beralkohol	3.64	3.67	3.69	3.73	3.66	-0.07
Tidak bermuatan praktek perjudian	3.28	3.4	3.41	3.46	3.49	0.03
Rata-Rata	3.58	3.68	3.72	3.74	3.70	-0.04

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2015.

Dalam tabel di atas dapat diketahui dimensi terendah yang mendapatkan skor terendah dalam setiap periodenya secara umum tidak berubah, yakni pada dimensi melindungi kepentingan publik. Angka ini menunjukkan bagaimana

siaran berita di televisi Indonesia masih cukup lemah pada dimensi melindungi kepentingan publik, sedangkan skor tertinggi rata-rata pada dimensi membentuk jati diri bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman. Angka pada dimensi lain dapat terlihat membaik dari satu periode ke periode berikutnya.

Hal yang menjadi catatan dari periode awal indeks ini berjalan adalah terlalu luasnya dimensi yang digunakan dalam menilai indeks tayangan kualitas program berita di televisi. Dari hasil temuan diketahui bahwa indeks kualitas tidak pasti namun berfluktuasi. Pada tahun 2017 angka indeks kualitas dimulai di indeks yang cukup rendah yakni 3,58 (dengan standar KPI adalah 4) lalu perlahan meningkat ke angka 3,68 (periode dua), 3,72 (periode 3), 3,74 (periode 4) dan menurun di angka 3,70 (periode terakhir). Namun indeks 3,70 ini lebih baik dari indeks pada awal pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas program tayangan berita di televisi Indonesia pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan kualitas.

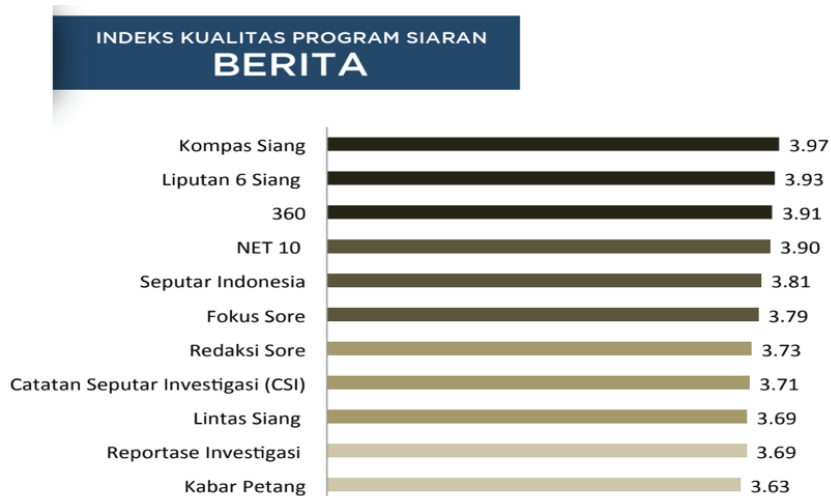
Namun apabila dilakukan perbandingan dimensi hasil indeks kualitas tayangan berita televisi, dimensi terendah selalu pada dimensi yang secara umum sama yakni pada dimensi melindungi kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa tayangan program berita di televisi masih kurang memberikan ruang untuk mengangkat kepentingan-kepentingan publik. Namun tayangan berita sudah cukup baik dalam melindungi kepentingan anak dan/atau remaja hingga cukup baik dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman.

Indeks Kualitas Tayangan Berita Di Televisi Indonesia Pada Tahun 2016

Pada tahun kedua pelaksanaan indeks kualitas tayangan berita di televisi di Indonesia dilakukan selama 4 kali selama setahun. Pada periode tahun ini, Komisi Penyiaran Indonesia menggunakan skala 1 hingga 5 dengan standar baik menurut KPI yakni pada angka 4 (empat). Pada periode ini, dimensi/indikator yang digunakan lebih sedikit dibandingkan pada periode 2017 yakni pengawasan, meningkatkan daya kritis, kepentingan publik, faktualitas, akurasi, independen, keberimbangan berita, dan tidak membuat opini yang menghakimi.

Pada periode pertama sebelum Mei 2016, panel ahli menilai indeks kualitas 11 program berita yang diajukan lembaga penyiaran. Ada pun program yang dinilai adalah program berita Kompas Siang, Liputan 6 Siang, 360, NET 10, Seputar Indonesia, Fokus Sore, Redaksi Sore, Catatan Seputar Investigasi (CSI), Lintas Siang, Reportase Investigasi dan Kabar Petang. Dari penilaian panel ahli didapatkan angka rata-rata indeks di atas angka 3,5 hingga mendekati angka 4. Secara umum angka indeks kualitas program siaran berita pada periode pertama ini (Maret-April 2016) yakni pada angka 3,49. Selengkapnya pada bagan di bawah ini.

Grafik 4. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Berita Televisi Periode I Tahun 2016



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2016.

Dari bagan di atas diketahui bahwa program Kompas Siang memiliki indeks tertinggi dibandingkan program berita lainnya. Indeks terendah diketahui yakni pada program Kabar Petang. Kemudian dari dimensi/indikator yang digunakan, angka rendah didapatkan rata-rata pada indikator independensi, keberimbangan berita hingga indikator tidak membuat opini yang menghakimi serta faktualitas. Pada pendalaman saat Focus Group Discussion juga terkemuka aspek-aspek kualitas program berita yang perlu diperlu diperhatikan adalah keberimbangan berita, tidak membuat opini yang menghakimi, kepentingan publik dan faktualitas.

Pada periode kedua yakni pada Mei-Juni 2016, ada sedikit kenaikan angka indeks ke angka 3,67 dari periode sebelumnya yakni 3,49. Walau ada peningkatan namun angka ini belum termasuk signifikan. Bila kemudian ditelaah berdasarkan indikator kualitas program tayangan berita pada periode ini memperlihatkan indikator ‘faktualitas’ adalah satu-satunya indikator yang mendapatkan indeks di atas angka 4. Indikator yang mendapatkan angka terendah pada periode ini kembali pada indikator keberimbangan berita yang kemudian diikuti oleh indikator tidak membuat opini yang menghakimi. Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Berita Televisi Berdasarkan Indikator Periode II Tahun 2016

INDIKATOR	INDEKS
Pengawasan (surveillance)	3,83
Meningkatkan daya kritis	3,70
Kepentingan publik	3,78
Faktualitas	4,16
Akurasi	3,80
Independen	3,40
Keberimbangan Berita	3,32
Tidak membuat opini yang menghakimi	3,38
INDEKS RATA-RATA	3,67

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2016.

Pada periode berikutnya yakni periode ketiga pada bulan Juli hingga Agustus 2016, terjadi penurunan angka indeks kualitas tayangan berita ke angka 3,57 dari angka periode kedua yakni 3,67. Penurunan terjadi tidak secara signifikan, namun tetap berada di bawah standar komisi penyiaran Indonesia yakni di angka 4. Bila kemudian ditelaah berdasarkan indikator, hasil survey periode Juli hingga Agustus 2016 menunjukkan tidak ada satu pun aspek/indikator yang memenuhi standar KPI yakni di angka 4. Bahkan faktualitas yang sebelumnya menyentuh angka 4,16 kini berada di angka 3,91. Sedangkan aspek yang memiliki angka terendah adalah aspek/indikator independen dan keberimbangan berita yakni di angka 3,31 dan 3,34. Hal ini kemudian sudah mulai menunjukkan tren permasalahan di pemberitaan televisi di Indonesia yakni pada keberimbangan dan independensi. Selengkapnya pada tabel di bawah.

Tabel 3. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Berita Televisi Berdasarkan Indikator Periode III Tahun 2016

INDIKATOR	INDEKS
Pengawasan (surveillance)	3,67
Meningkatkan daya kritis	3,45
Kepentingan publik	3,64
Faktualitas	3,91
Akurasi	3,81
Independen	3,31
Keberimbangan Berita	3,34
Tidak membuat opini yang menghakimi	3,42
INDEKS RATA-RATA	3,57

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2016.

Secara kualitas diskusi panel ahli mencatatkan beberapa aspek penting dalam usaha untuk peningkatan kualitas program berita ini, yakni aspek independen dalam program berita dinilai masih terlihat adanya campur tangan pemilik media. Demikian pula aspek keberimbangan berita perlu menjadi perhatian lembaga penyiaran terutama yang menyangkut isu-isu politik. Panel ahli juga mencatat pemberitaan kadang masih ada yang tidak menggugah nalar kritis bahkan cenderung melakukan penggiringan opini. Berita yang disampaikan kadang hanya dari perspektif sehingga dapat menimbulkan terbitnya opini yang menghakimi. Dalam aspek pengawasan juga kurang maksimal dikarenakan dalam pemberitaan bahkan masih menampilkan hal-hal yang menyeramkan dan tidak relevan. Berita juga masih terlihat subjektif terutama dalam pemilihan judul dan narasi-narasi yang mengesankan istilah untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh reporter berita tersebut.

Pada periode keempat yakni pada periode September hingga Oktober 2016 menunjukkan indeks kualitas yang menurun walau tidak signifikan yakni di angka 3,55 menurun dari 3,57 pada periode sebelumnya. Angka ini tentu saja masih berada di bawah standar Komisi Penyiaran Indonesia yakni di angka 4 (empat). Pada periode ini bila ditelaah berdasarkan indikator/aspek ditemui bahwa angka faktualitas kembali naik di angka 4,01, namun perhatian masih pada aspek/indikator independen dan keberimbangan berita yang selalu berada pada angka yang rendah yakni 3,11 dan 3,12. Hal ini menunjukkan berita televisi di Indonesia masih tidak cukup

berkualitas dalam menjaga independensinya dan dalam menjaga keberimbangan berita. Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Berita Televisi Berdasarkan Indikator Periode IV Tahun 2016

INDIKATOR	INDEKS
Pengawasan (surveillance)	3,71
Meningkatkan daya kritis	3,72
Kepentingan publik	3,65
Faktualitas	4,01
Akurasi	3,74
Independen	3,11
Keberimbangan Berita	3,12
Tidak membuat opini yang menghakimi	3,32
INDEKS RATA-RATA	3,55

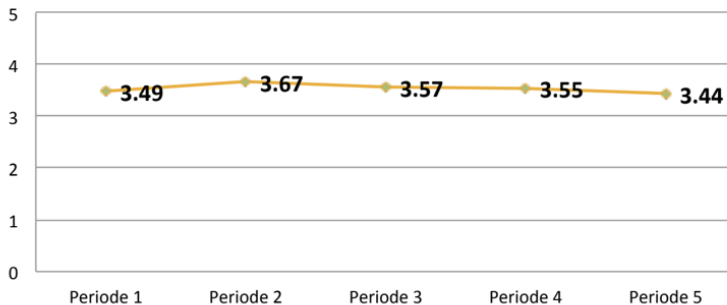
Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2016.

Evaluasi pada periode ini yang menjadi catatan kualitas yang dikemukakan panel ahli di antaranya masih kurangnya independensi tayangan berita sehingga diperlukan ditegakkannya kembali kredibilitas melalui berita yang independent, keberimbangan juga menjadi catatan terutama masih ditemukan porsi pemberitaan yang cenderung Jakarta sentris, di mana isi pemberitaan hanyalah berita yang terjadi di Jakarta. Catatan lainnya adalah aspek akurasi yang perlu ditingkatkan serta masih terdapat keberpihakan terhadap

kepentingan tertentu dan terkesan melakukan penggiringan opini publik yang masih banyak ditemukan. Catatan lain adalah masih adanya pemberitaan yang masih mengejar hal-hal yang sensasional dibandingkan hal yang dapat meningkatkan daya kritis masyarakat. Panel ahli juga mencatat penggunaan serta pemilihan kata dalam judul-judul berita yang kadang mendeskreditkan orang atau kelompok yang diberitakan.

Pada periode terakhir yakni periode kelima pada bulan November hingga Desember 2016 menunjukkan indeks kualitas program tayangan berita yang kembali menurun yakni di angka 3,44. Tentu saja angka ini belum mencapai standar program berkualitas yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yakni di angka 4 (empat). Apabila dilakukan perbandingan indeks program tayangan berita antara periode satu hingga periode lima, indeks pada tahun 2016 ini berkisaran antara 3,4 hingga 3,67. Berikut pergerakannya.

Grafik 5. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Berita Televisi Berdasarkan Periode Tahun 2016



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2016.

Kemudian apabila dilihat perbandingan aspek/ indikator kualitas program berita sejak periode satu hingga periode lima, menunjukkan indikator independensi mengalami penurunan indeks. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas independennya lembaga penyiaran dalam penayangan beritanya. Satu catatan khusus lainnya adalah aspek/indikator keberimbangan berita tetap menjadi aspek/indikator yang terrendah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan kualitas dalam melakukan berimbangan dalam tayangan berita televisi di Indonesia. Berikut selengkapnya tabel perbandingan aspek/ indikator kualitas.

Tabel 5. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Berita Televisi Berdasarkan Indikator dan Periode Tahun 2016

INDIKATOR	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5
Pengawasan	3,51	3,83	3,67	3,71	3,68
Meningkatkan daya kritis	3,30	3,70	3,45	3,72	3,50
Kepentingan publik	3,55	3,78	3,64	3,65	3,60
Faktualitas	3,92	4,16	3,91	4,01	3,81
Akurasi	3,59	3,80	3,81	3,74	3,55
Independen	3,52	3,40	3,31	3,11	3,13
Keberimbangan Berita	3,28	3,32	3,34	3,12	3,10
Tidak membuat opini yang menghakimi	3,26	3,38	3,42	3,32	3,14
INDEKS RATA-RATA	3,49	3,67	3,57	3,55	3,44

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2016.

Panel ahli mencatat bahwa permasalahan independen dalam tayangan berita di televisi salah satunya yakni indikasi adanya intervensi pemilik TV pada isi konten dan porsi pemberitaan. Pemilihan narasumber juga masih terlihat kurang independent. Sedangkan pada aspek keberimbangan berita, beberapa hal yang menjadi catatan adalah tidak diberikannya ruang pemberitaan dari daerah lain, pada saat itu yakni pemberitaan pilkada hanya didominasi oleh pilkada Jakarta tidak cukup ada pemberitaan pilkada dari daerah lainnya. Ketidakberimbangan lainnya yakni berita yang tidak berimbang narasumber, berita yang ditampilkan seringkali hanya menggunakan satu sumber/narasumber. Catatan pada aspek lainnya yakni pada aspek pengawasan terlihat pilihan peristiwa yang diberitakan masih cenderung merupakan berita politik atau kriminal. Pada aspek meningkatnya daya kritis, televisi disinyalir masih kerap memprovokasi masyarakat dengan pemberitaan tanpa memberikan cukup edukasi atau pilihan solusi atas permasalahan.

Tabel 6. Evaluasi Kualitas Program Siaran Berita Televisi Tahun 2016

Indikator	Hasil Evaluasi Pendalaman Focus Group Discussion
Pengawasan	Pilihan peristiwa yang diberitakan masih cenderung politik dan kriminal.
Meningkatkan daya kritis	TV memprovokasi masyarakat dengan pemberitaan, tapi tidak mengedukasi solusi permasalahan
Kepentingan publik	TV kurang memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat menyaksikan peristiwa lain selain peristiwa politik.
Faktualitas	Faktualitas tidak didukung oleh bukti.
Akurasi	Mayoritas hanya sekedar menyampaikan informasi namun tanpa disertai analisis mendalam dari narasumber atau informan kunci. Data sering tidak akurat, misal mengenai jumlah peserta demo.
Independen	Pemilik TV mengintervensi konten dan porsi pemberitaan. Pemilihan narasumber masih terlihat kurang independen
Keberimbangan Berita	TV seharusnya memuat berita pilkada dari daerah lain, tidak hanya pilkada Jakarta. Berita yang ditampilkan seringkali hanya dari satu sumber seharusnya berbagai sumber. Keberimbangan perlu ditingkatkan dalam program siaran berita.
Tidak membuat opini yang menghakimi	Sebagian berita terlihat menggiring opini khalayak. Bahkan kadangkala berita sudah menghakimi atau menyalahkan pihak tertentu. Pembentukan opini media semakin mengkhawatirkan.

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2016.

Pada aspek kepentingan publik, televisi masih kurang dalam memberikan ruang dan waktu pada masyarakat dalam menyaksikan peristiwa lain selain peristiwa politik. Pada aspek faktualitas, aspek faktual dalam berita kerap tidak didukung oleh bukti-bukti. Pada aspek akurasi, mayoritas berita hanya sekedar menyampaikan informasi namun tidak disertai analisis mendalam dari narasumber atau informan kunci. Bahkan tercatat data seringkali tidak akurat, misalnya

mengenai jumlah peserta demo atau lainnya. Pada aspek terakhir yakni aspek tidak membuat opini yang menghakimi, pemberitaan masih terlihat menggiring opini khalayak, bahkan kadangkala berita sudah terlebih dahulu seakan-akan memvonis dan menghakimi pihak-pihak tertentu. Aspek-aspek dan catatan ini bagaimana media kerap beropini menjadi semakin mengkhawatirkan.

Indeks Kualitas Tayangan Berita Di Televisi Indonesia Pada Tahun 2017

Pada tahun berikutnya yakni tahun 2017, Komisi Penyiaran Indonesia menggunakan skala indeks yang berbeda yakni pada skala 1 hingga 4, maka dari pada itu Komisi Penyiaran Indonesia telah mencanangkan bahwa standar kualitas penyiaran berada di angka 3. Pada tahun ini pengukuran indeks dilakukan hanya dua periode. Pada tahun ini juga dikeluarkan perbandingan indeks kualitas program siaran berita berdasarkan lembaga/stasiun penyiaran televisi. Pada tahun ini, aspek yang menjadi indikator kualitas berbeda dengan tahun sebelumnya walau jumlahnya sama yakni indikator keberagaman, pengawasan, faktualitas, akurasi, keadilan, kepentingan publik, tidak berpihak serta relevansi.

Pada periode pertama, indeks kualitas program tayangan berita televisi di Indonesia adalah sebesar 2,95. Angka ini berada tipis di bawah standar angka yang ditetapkan KPI untuk tahun 2017 adalah 3 (tiga). Pada periode pertama, rata-rata indeks indikator tidak jauh berbeda yakni berada

di kisaran angka 2,89 hingga 3,03. Angka indeks terendah pada aspek keadilan atau keberimbangan yakni pada angka 2,89 diikuti oleh aspek kepentingan publik, tidak berpihak dan relevansi pada angka 2,90. Sedangkan terdapat 3 aspek yang telah memenuhi standar kualitas KPI yakni aspek keberagaman, pengawasan dan akurasi berita. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 7. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Berita Berdasarkan Indikator Periode I Tahun 2017

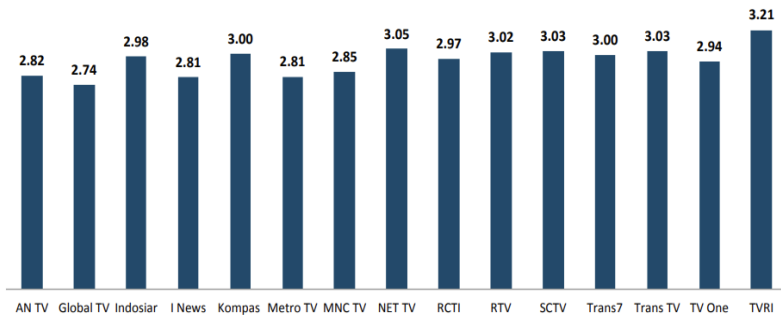
Aspek Kualitas	Indeks
Keberagaman	3,02
Pengawasan	3,02
Faktualitas	2,93
Akurasi	3,03
Keadilan	2,89
Kepentingan Publik	2,90
Tidak Berpihak	2,90
Relevansi	2,90
INDEKS RATA-RATA	2,95

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2017.

Pada tahun 2017, Indeks kualitas tayangan program berita melakukan perbandingan antar stasiun/lembaga penyiaran. Berdasarkan indikator kualitas program berita, TVRI memperoleh indeks di atas 3 untuk seluruh indikator, dengan indikator tertinggi pada keberagaman. TransTV

mencapai indeks tertinggi untuk indikator pengawasan. NET TV mencapai indeks tertinggi untuk indikator akurasi dan keberagaman. SCTV mencapai indeks tertinggi untuk indikator pengawasan. RTV memperoleh indeks tertinggi untuk indikator keberagaman. Namun disayangkan, pada indikator keadilan, tidak berpihak dan faktualitas beberapa stasiun/lembaga penyiaran memperoleh nilai yang cukup rendah dibandingkan indikator lainnya. berikut perbandingan indeks kualitas program siaran berita berdasarkan lembaga penyiaran.

Grafik 6. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode I Tahun 2017



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2017.

Pada grafik di atas diketahui untuk program berita, sebagian besar Lembaga Penyiaran memenuhi standar berkualitas dengan indeks program berita tertinggi dicapai oleh TVRI sebesar 3.21. Posisi selanjutnya adalah NET TV, Trans TV, SCTV, RTV, Kompas TV dan Trans 7.

Catatan evaluasi kualitas program siaran berita pada aspek keadilan adalah dikarenakan masih terdapat

program berita yang hanya mengandalkan satu sumber di mana seharusnya program berita menggunakan beragam sumber. Untuk itu keberimbangan pada sebuah pemberitaan perlu ditingkatkan dalam program siaran berita. Pada aspek kepentingan publik, panel menyebutkan bahwa program berita masih kurang dalam memberikan ruang dan waktu serta peristiwa dan isu publik, masih bersifat parsial. Pada aspek tidak berpihak, tercatat masih terdapat iklan dan berita terkait partai politik baik dari pemilik stasiun televisi atau afiliasi partai dengan pemilik stasiun televisi. Pada aspek relevansi, ditemukan masih ada kecenderungan materi program berita yang sangat Jakarta sentris. Ada pun berita yang berasal dari daerah cenderung memberitakan mengenai bencana. Hal ini menyebabkan peristiwa dan masalah yang ditayangkan tidak memiliki kedekatan emosional. Pada aspek faktualitas dengan nilai 2,93 masih ditemukan berita yang memasukkan opini media ke dalam laporan pemberitaan, kemudian mendramatisir dengan menggunakan kata-kata dan gambar-gambar yang cukup sensasional. Kemudian pada aspek dengan nilai yang memenuhi standar KPI tetap memiliki catatan khusus. Pada aspek keberagaman, masih tercatat bahwa program berita belum secara proporsional menyajikan berbagai pilihan informasi yang mencerminkan keragaman realitas dan kebutuhan masyarakat. Proporsi terbesar pada isu masih berkisar mengenai isu-isu politik, sedangkan peristiwa dan persoalan lainnya cenderung diabaikan. Pada aspek akurasi, pemberitaan di televisi dinilai hanya sekedar menyampaikan informasi namun tidak disertakan analisis

mendalam dari narasumber, bahkan ironisnya data seringkali tidak cukup akurat.

Pada periode berikutnya, indeks kualitas tayangan program berita televisi di Indonesia pada akhirnya telah memenuhi standar kualitas baik. Pada periode kedua di tahun 2017, indeks kualitas mencapai angka 3 sesuai dengan standar kualitas tayangan yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia. Pada periode ini seluruh aspek yang dijadikan indikator sebagian besar menunjukkan kenaikan kecuali pada aspek/indikator pengawasan yang menurun walau tidak signifikan. Hal yang menjadi catatan adalah aspek kepentingan publik tetap menjadi aspek dengan nilai indeks terendah yakni 2,95, diikuti oleh aspek tidak berpihak (2,96), faktualitas (2,97), relevansi (2,97), keadilan (2,98) sedangkan tiga aspek yang sebelumnya telah berada di atas standar kini tetap berada di atas standar yakni aspek keberagaman, pengawasan dan aspek akurasi. Berikut perbandingannya.

Tabel 8. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Berita Berdasarkan Indikator Periode II Tahun 2017

Indikator	Periode 1	Periode 2
Keberagaman	3,02	3,04
Pengawasan	3,02	3,01
Faktualitas	2,93	2,97
Akurasi	3,03	3,07
Keadilan	2,89	2,98
Kepentingan Publik	2,90	2,95
Tidak Berpihak	2,90	2,96
Relevansi	2,90	2,97
INDEKS RATA-RATA	2,95	3,00

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2017.

Apabila dibandingkan berdasarkan lembaga/stasiun penyiaran, untuk program berita, terdapat delapan stasiun penyiaran yang telah memenuhi standar KPI sedangkan tujuh lainnya masih berada di bawah angka 3. Indeks program berita tertinggi dicapai oleh TVRI dengan angka 3,14, disusul oleh SCTV (3,13), NET TV (3,08), Trans7 dan KompasTV dengan indeks 3,07. Sedangkan tujuh stasiun televisi yang memiliki indeks di bawah tiga yakni TransTV (2,99), RTV (2,97), MNCTV (2,92), MetroTV (2,94), INews (2,88), GlobalTV (2,73), dan ANTV (2,92). Selengkapnya pada grafik di bawah ini.

Grafik 7. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode II Tahun 2017



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2017.

Bila dicermati berdasarkan indikator kualitas program berita, TVRI dan SCTV memperoleh indeks di atas 3 untuk 7 indikator, dengan indeks tertinggi untuk indikator keberagaman. Demikian pula NET TV mencapai indeks tertinggi untuk indikator keberagaman Untuk indikator 'kepentingan publik' dan 'tidak berpihak' beberapa Lembaga Penyiaran memperoleh nilai rendah bila dibandingkan dengan indikator lainnya.

Pada catatan evaluasi kualitas, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pada aspek dengan nilai terendah yakni pada aspek/indikator kepentingan publik, tercatat bahwa tayangan berita memang telah memberikan data dan fakta, namun data tersebut harus diolah dan dilihat siapa yang menjadi audiensnya karena tentu saja diharapkan data dan fakta dioleh sesuai dengan kepentingan publik atau dapat dipahami oleh audiens secara umum. Pada aspek faktualitas, masih terdapat pemberitaan yang kurang mengelaborasi aspek *how* dalam sebuah peristiwa. Berita yang ditayangkan kebanyakan adalah peristiwa, namun tidak cukup mendalam. Pada aspek keadilan tercatat masih terdapat bias dengan penggunaan Bahasa dan kadang hiperbola dalam penggunaan bahasanya misalnya pemberitaan pada kepala daerah perempuan, maka penggunaan kata perempuan ini yang menjadi bias gender. Pada aspek tidak berpihak, diketahui hampir semua program berita memiliki konten yang hanya menyajikan masyarakat elit semata dan kadang seringkali tidak memiliki hubungan dan mementingkan kepentingan publik/umum. Pada aspek relevansi, tercatat

masih ada beberapa televisi yang menyajikan berita dengan kurang proporsional karena isu yang ditampilkan dalam satu berita dan tidak ada variasi. Sedangkan pada aspek yang telah memenuhi standar KPI, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pada aspek keberagaman, masih terdapat stasiun/lembaga penyiaran yang memiliki berita yang sama, namun nilai telah memenuhi standar KPI dikarenakan saat ini sudah mulai muncul konten-konten berita yang lebih variatif daripada sebelumnya. Pada aspek pengawasan, berita di televisi melakukan fungsi pengawasan namun di level paling sederhana yakni memberikan peringatan hanya pada saat bencana alam sedang terjadi. Televisi dinilai belum mampu menunjukkan dampak peringatan pada masyarakat, karena berita bencana yang ada bersifat monumental saja.

Pada tahun ini maka tercatat dimensi terendah adalah prinsip keadilan (keberimbangan), kepentingan publik, tidak berpihak. Dimensi dengan angka tinggi adalah akurasi dan pengawasan serta keberagaman.

Indeks Kualitas Tayangan Berita Di Televisi Indonesia Pada Tahun 2018

Pada tahun 2018, Komisi Penyiaran Indonesia menyelenggarakan 3 kali pengukuran indeks kualitas tayangan program berita di televisi di Indonesia. Aspek yang digunakan untuk menilai kualitas tayangan televisi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yakni menggunakan 8 aspek kualitas yakni indikator keberagaman, pengawasan, faktualitas, akurasi, keadilan, kepentingan publik, tidak berpihak serta relevansi.

Pada periode pertama, indeks kualitas tayangan program berita televisi berada di angka 2,98. Angka ini tentu saja berada tipis di bawah standar KPI yakni di angka 3 (tiga). Bila dilakukan perbandingan indeks program siaran berita antara survei periode 1 dan 2 tahun 2017 dengan periode 1 tahun 2018, pergerakan indeks cenderung tidak mengalami perubahan pada kisaran angka 2.95-3.00. Naik turunnya indeks program berita pada tiga period survei tidakterlalu signifikan. Pada survei periode 1 tahun 2017 indeks yang diperoleh sebesar 2.95, naik mencapai indeks standar KPI sebesar 3.00, dan pada survei periode 1 tahun 2018 turun menjadi 2.98. Namun bila menelaah lebih lanjut mengenai angka indeks per aspek kualitas, pada periode angka terendah ditemukan dalam aspek faktualitas yakni di angka 2,92. Aspek yang memiliki indeks di atas standar KPI yakni 3,00 adalah aspek Keberagaman (3,00), Pengawasan (3,01) dan Akurasi (3,08), sedangkan aspek lainnya berada di bawah standar KPI, yakni Keadilan (2,93), Tidak berpihak (2,94), Kepentingan Publik (2,95), dan Relevansi (2,97). Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

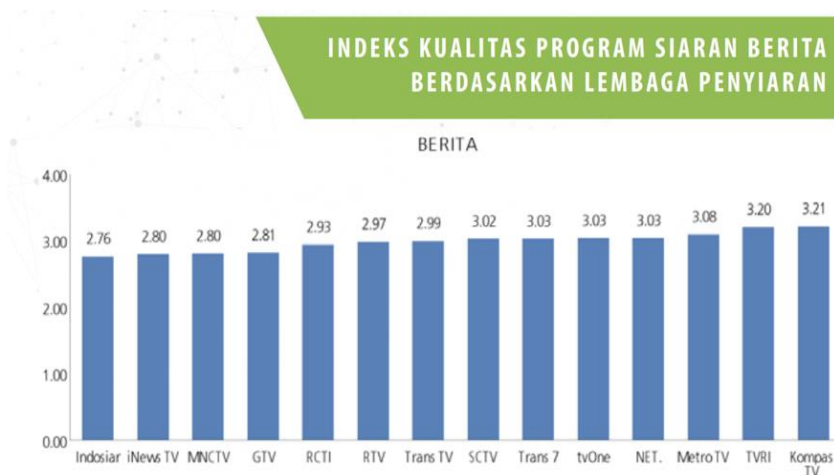
Tabel 9. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Indikator Periode I Tahun 2018

INDEKS PROGRAM SIARAN BERITA BERDASARKAN INDIKATOR	
Aspek Kualitas	Indeks
Keberagaman	3.00
Pengawasan	3.01
Faktualitas	2.92
Akurasi	3.08
Keadilan	2.93
Kepentingan Publik	2.95
Tidak Berpihak	2.94
Relevansi	2.97
INDEKS RATA-RATA	2.98

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2018.

Periode ini juga mengeluarkan angka bagaimana perbandingan indeks kualitas tayangan berita televisi berdasarkan stasiun/lembaga penyiaran. Dari 14 stasiun/ lembaga penyiaran yang diukur, ternyata 7 di antaranya masih memiliki indeks di bawah standar KPI. Sedangkan 7 lainnya telah memenuhi standar KPI yakni 3,00. Tujuh lembaga penyiaran yang masih mendapatkan indeks yang lebih rendah dari standar KPI yakni Indosiar, iNewsTV, MNCTV, GTV, RCTI, RTV dan TransTV. Tujuh lembaga yang telah memiliki indeks kualitas tayangan berita di atas standar KPI adalah SCTV, Trans7, tvOne, NET, MetroTV, TVRI dan KompasTV. Selengkapnya pada bagan di bawah ini.

Grafik 8. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode I Tahun 2018



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2018.

Dari bagan di atas diketahui bahwa lembaga penyiaran dengan indeks tertinggi yakni TVRI (3,20) dan KompasTV (3,21), sedangkan yang terendah yakni Indosiar (2,76) dan iNewsTV serta MNCTV yang berbagi tempat di angka 2,80. Angka di atas kemudian ditelaah lebih lanjut dengan membandingkan lembaga penyiaran dengan indeks indikator kualitas program tayangan berita di televisi.

Tabel 10. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Indikator dan Lembaga Penyiaran Periode I Tahun 2018

INDEKS INDIKATOR KUALITAS PROGRAM SIARAN BERITA BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN														
INDIKATOR	PROGRAM BERITA													
	GTV	Indosiar	iNews TV	Kompas TV	Metro TV	MNCTV	NET.	RCTI	RTV	SCTV	Trans 7	Trans TV	tvOne	TVRI
Keberagaman	2.90	2.72	2.82	3.13	3.03	2.86	3.08	3.01	3.01	3.14	3.10	3.03	2.96	3.18
Pengawasan	2.88	2.85	2.94	3.18	3.25	2.84	3.04	3.01	2.97	2.98	2.98	2.94	3.13	3.18
Faktualitas	2.74	2.71	2.71	3.18	3.00	2.72	2.98	2.86	2.93	2.92	2.94	2.96	2.95	3.31
Akurasi	2.93	2.89	2.92	3.33	3.27	2.93	3.08	3.08	3.05	3.06	3.10	3.08	3.18	3.26
Keadilan	2.64	2.66	2.69	3.29	3.09	2.78	3.03	2.79	2.91	2.93	3.03	3.00	3.02	3.13
Kepentingan Publik	2.82	2.73	2.73	3.20	3.04	2.70	3.01	2.89	2.97	3.17	2.99	3.01	2.94	3.14
Tidak Berpihak	2.75	2.76	2.73	3.18	2.99	2.77	3.04	2.87	2.98	2.99	3.01	2.94	3.02	3.21
Relevansi	2.83	2.77	2.83	3.17	3.01	2.78	2.99	2.97	2.98	2.98	3.07	2.99	3.04	3.20
INDEKS RATA-RATA	2.81	2.76	2.80	3.21	3.08	2.80	3.03	2.93	2.97	3.02	3.03	2.99	3.03	3.20

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2018.

Bila kemudian diperhatikan tabel di atas, maka Kompas TV dan TVRI mendapatkan angka indeks di atas 3,00 untuk seluruh indikator. Bahkan KompasTV mencapai indeks tertinggi untuk indikator akurasi yakni 3,33 sedangkan TVRI mencapai indeks tertinggi untuk indikator faktualitas yakni 3,31. Sebaliknya, aspek keadilan perlu mendapatkan perhatian khusus dari lembaga penyiaran seperti GTV, Indosiar dan iNews dikarenakan rendahnya nilai yang diperoleh dibandingkan indikator yang lain.

Pada catatan evaluasi dari panel ahli ditemukan beberapa catatan. Pada aspek/indikator terendah yakni aspek faktualitas masih ditemui di mana sebagian berita

masih memasukkan opini media, berita juga disinyalir masih mendramatisir keadaan dengan penggunaan kata-kata kasar yang berlebihan, bahkan ditambahkan dengan suara latar yang sangat dramatis. Pada periode ini juga masih ditemukan tayangan berita yang memuat gambar-gambar sensasional seperti robot penari erotis dan yang lainnya. Pada aspek akurasi, ditemukan bahwa program berita masih cukup diragukan dalam penentuan narasumber/sumber beritanya, berita kadang tidak memasukkan dengan jelas identitas narasumber dan data yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam berita tidak berdasarkan dari sumber di lapangan langsung, namun dari sumber-sumber amatir. Untuk itu panel ahli juga berharap lembaga penyiaran lebih memperhatikan keakuratan data dan fakta dengan menyertakan identitas sumber dan sumber materi pemberitaan. Pada aspek keadilan, berita juga dinilai belum menyajikan narasumber dari berbagai pihak, bahkan lembaga penyiaran masih berlaku diskriminatif terhadap narasumber maupun obyek berita. Ironisnya, disinyalir beberapa lembaga penyiaran melakukan blocking narasumber, di mana mereka yang tampil dalam pemberitaan adalah narasumber yang sepihak dengan ideologi, kepentingan dan framing lembaga penyiaran terkait. Daripada itu media belum dapat memisahkan antara kepentingan politik dan kepentingan penyiaran. Pada aspek kepentingan publik, stasiun televisi saat menyajikan isu kontroversial, beberapa berita dinilai masih belum mengedepankan kepentingan publik, tetapi justru terkesan “menggoreng” isu kontroversial itu dengan memilih

narasumber yang sesuai dengan kepentingan lembaga penyiaran. Hal lain yang menjadi perhatian pada aspek ini adalah masih masuknya isu-isu politik dalam program berita terutama yang terkait dengan pemilik media yang merupakan pengurus atau pimpinan suatu partai politik.

Pada aspek tidak berpihak, program berita masih dinilai cenderung untuk berpihak. Hal ini dikarenakan tetap menyajikan pandangan narasumber dari elit-elit politik dan selebritas yang sesuai dengan kepentingan lembaga penyiaran semata. Program berita juga memiliki kecenderungan menyampaikan informasi terkait partai politik pemilik lembaga penyiaran. Ironisnya, tayangan berita kerap dijadikan kendaraan politik pemilik media untuk kepentingan kampanye dalam beragam bentuk berita. Pada aspek relevansi, panel ahli masih menemukan bahwa program berita masih cenderung menyajikan berita yang tidak ada relevansinya dengan kepentingan masyarakat secara nasional. Konten berita masih terkesan Jakarta sentris, sedangkan pemberitaan tentang daerah/wilayah lebih cenderung terkait dengan bencana atau peristiwa yang menghebohkan untuk itu dinilai konten lokal/daerah belum mendapatkan perhatian utama dalam tayangan program berita televisi. Hal ini juga menjadi catatan pada aspek keberagaman, di mana program berita walau dinilai sudah baik dalam menyajikan pilihan isu yang beragam, namun masih dinilai cenderung menyajikan isu kriminal dan politik, isu yang muncul cenderung untuk kepentingan masyarakat metropolitan yakni Jakarta. Berita yang disajikan masih cenderung negative di mana bad

news adalah goos news. Sumber informasi yang dipilih juga dinilai masih berpusat pada daerah Jakarta dan Jawa serta sekitarnya. Panel ahli berharap pilihan isu yang menjadi kontenberita lebih memperhatikan keberagaman kebutuhan masyarakat Indonesia, tema berita juga diharapkan lebih positif atau minimal proporsional dengan berita negatif. Untuk mendukung keberagaman, perlu adanya peningkatan isu atau konten seperti konversi, lingkungan hingga human interest.

Pada aspek pengawasan, program berita dinilai telah menyampaikan informasi mengenai isu dan peristiwa yang terjadi namun masih kurang dalam menyampaikan dampaknya misalnya pada kasus-kasus seperti korupsi, narkoba, kekerasan dan lainnya. Fungsi pengawasan juga dinilai masih kurang sebagai upaya preventif dan edukatif terkait dengan peristiwa yang diberitakan khususnya pada isu mitigasi bencana. Aspek pengawasan tidak berjalan dengan cukup baik pada pemberitaan kriminalitas dikarenakan berita hanya menitikberatkan dan mendramatisasi korban dan atau tersangka. Sedangkan pada pemberitaan bencana misalnya kebakaran, berita hanya terfokus pada kejadian saja, tidak membahas mengenai bagaimana tingkat preventif yang sepatutnya dilakukan atau disiapkan khalayak untuk keamanan mereka sendiri.

Pada periode kedua, indeks program siaran berita naik menjadi 3,04. Angka ini menunjukkan program siaran berita kini telah melebihi standar program berkualitas yang ditetapkan oleh KPI. Angka indeks pada periode kedua ini

pun lebih tinggi dibandingkan indeks pada periode pertama sebelumnya.

Berdasarkan aspek kualitas, dari delapan aspek yang diukur, pada periode ini rata-rata mengalami kenaikan. Bahkan hanya dua aspek saja yang masih berada di bawah standar KPI, yakni aspek keadilan di angka 2,99 dan relevansi di angka 2,98. Angka tertinggi berada pada aspek keadilan. Hal ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Indikator Periode II Tahun 2018

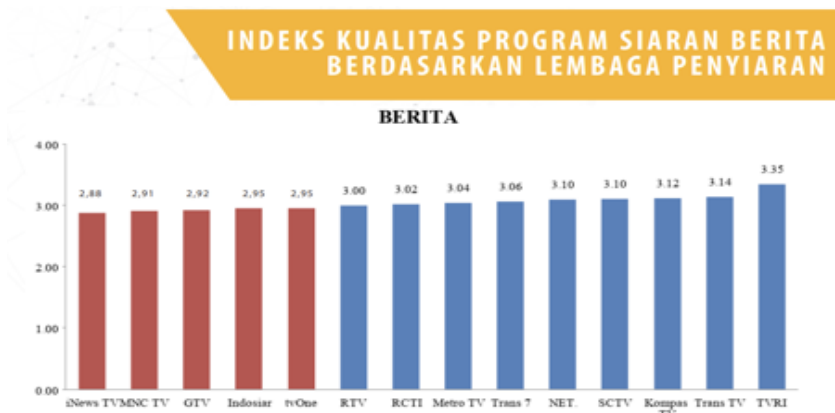
INDEKS PROGRAM SIARAN BERITA BERDASARKAN INDIKATOR	
Aspek Kualitas	Indeks
Keberagaman	3.06
Pengawasan	3.01
Faktualitas	3.04
Akurasi	3.17
Keadilan	2.99
Kepentingan Publik	3.04
Tidak Berpihak	3.03
Relevansi	2.98
INDEKS RATA-RATA	3.04

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa permasalahan mengenai keadilan selalu mendapatkan angka indeks yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan atau keberimbangan dalam sebuah pemberitaan masih perlu mendapatkan perhatian khusus.

Pada periode ini juga menghasilkan bagaimana indeks kualitas tayangan berita televisi berdasarkan stasiun/ lembaga penyiaran. Pada periode ini hanya lima lembaga penyiaran yang mendapatkan nilai yang belum memenuhi standar kualitas penyiaran KPI yakni 3,00. Kelima lembaga tersebut adalah iNewsTV, SCTV, GTV, Indosiar dan TVOne. iNewsTV tercatat sebagai lembaga penyiaran dengan indeks terendah yakni di angka 2,88. Sedangkan lembaga penyiaran yang mendapatkan indeks kualitas program siaran tertinggi adalah TVRI dengan nilai 3,35. Selengkapnya pada grafik di bawah.

Grafik 9. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode II Tahun 2018



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2018.

Pada catatan evaluasi kualitatif, panel mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pada aspek/ indikator keberagaman, sebagian besar lembaga penyiaran

menyajikan berita dengan pola yang sama dan seragam, di mana terjadi duplikasi pemberitaan, padahal kebutuhan masyarakat akan informasi sangat beragam. Hal ini disinyalir karena adanya monopoli kepemilikan media dan berada di bawah manajemen media yang sama sehingga berita-berita cenderung untuk tidak beragam walau ada banyak saluran stasiun televisi. Konten berita juga masih didominasi oleh isu politik dan kriminalitas, bahkan sebagian pemberitaan cenderung menampilkan sisi negatif dari kriminalitas. Audiens juga jarang sekali disajikan berita-berita yang positif untuk membantu optimisme. Untuk itu disarankan untuk menambah lebih banyak proporsi berita positif, seperti prestasi kepala daerah dan inovasi pelayanan publik yang kerap kali belum diinformasikan dengan cukup berimbang.

Pada aspek pengawasan, panel ahli mencatat bahwa media masih cenderung menyampaikan informasi dengan hanya memotret peristiwa dan dampaknya, media dinilai kurang memberikan peringatan dan upaya preventifnya seperti bagaimana upaya pencegahan kejahatan, teror bom, hingga menghindari politik uang. Berita seharusnya menjelaskan keadaan dan alternatif solusi bukan melemparkan pertanyaan ke publik. Pada periode ini, salah satu sampel berita yang menjadi perhatian adalah pada pemberitaan mengenai Hari Buruh Internasional. Panel ahli menyayangkan mengapa konten dari berita hari buruh lebih terfokus pada dampak dari demo seperti kemacetan tetapi tidak mengelaborasi apa permasalahan buruh yang buruh hadapi saat itu. Panel ahli juga mengharapkan media lebih

mengurangi berita-berita yang bersifat provokatif untuk mengurangi kekhawatiran di masyarakat.

Pada aspek faktualitas, unsur opini dalam pemberitaan media masih banyak ditemukan, penempatan opini kemudian diperdalam dengan penggunaan musik dan atau efek suara yang dramatis dan menarik perhatian audiens. Masuknya opini media terlihat dari penggunaan kata-kata dan ilustrasi yang ada di konten berita. Panel ahli mengambil contoh pada pemberitaan kecelakaan mobil hingga masuk ke sungai. Pada lead berita terjadi pemberitaan yang sangat tidak sensitive gender, di mana disebutkan pengemudi perempuan. Hal ini seakan-akan menempatkan perempuan dengan stigma bukan pengemudi yang handal. Pada periode ini juga dipertontonkan tidak terlindunginya anak-anak yang terlibat dugaan kriminalitas, di mana muka anak-anak ini tidak diblur bahkan ditayangkan langsung di layar kaca.

Pada aspek akurasi, seluruh program berita memang telah menyajikan peristiwa berdasarkan data dan fakta yang benar namun masih ditemukan berita yang tidak menjelaskan identitas narasumber dan sumber materi secara detail. Ironisnya ditemukan pemberitaan dengan sumber berita yang diambil dari akun media sosial tanpa verifikasi hanya hasil jepretan layar media sosial. Namun panel ahli mengapresiasi stasiun penyiaran yang menyajikan informasi dengan detail bahkan disertai grafik bahkan ilustrasi sehingga memudahkan audiens untuk memahami peristiwa yang terjadi. Tetapi jurnalis televisi juga diharapkan melakukan

verifikasi sehingga tidak hanya mengandalkan informasi dari narasumber namun juga akurasi ke lapangan langsung.

Pada aspek keadilan, program berita televisi masih cenderung tidak berimbang di mana narasumber dari sebuah berita sebagian besar dari sisi elit dan pembuat kebijakan, padahal media sepatutnya menjadi perpanjangan informasi dari masyarakat bukan hanya perpanjangan dari pihak elitis saja.

Pada aspek kepentingan publik, media dinilai masih kurang baik dalam memberikan ruang untuk publik. Bahkan media dinilai hanya memberikan ruang untuk kepentingan-kepentingan kelompok semata atau kepentingan pemimpin media. Ruang-ruang pemberitaan di media juga tercatat kerap kali memberikan ruang untuk berita yang lebih bersifat sensasional dibandingkan untuk kepentingan masyarakat umum.

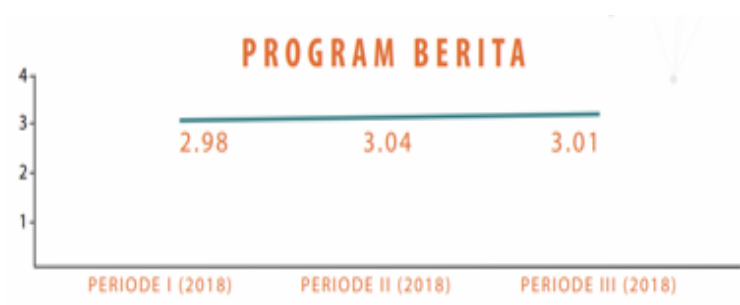
Pada aspek tidak berpihak, program berita masih cenderung hanya menyajikan pandangan tokoh-tokoh yang terkait dengan berita tersebut namun tidak menampilkan perspektif lain dari sudut pandang masyarakat yang lain. Ironisnya media kadang tidak berpihak pada mereka yang dirugikan, namun bahkan mengeksploitasi keadaan mereka. Contohnya pada pemberitaan pemerkosaan, walau wajah korban disamarkan, namun media kemudian dengan sangat jelas mengambil gambar rumah korban dari beragam sisi. Aspek tidak berpihak pada kaum disabilitas terlihat dari tidak tersedianya penerjemah Bahasa isyarat di beberapa pemberitaan. Panel ahli juga mencatat media lebih banyak

menyajikan konten-konten yang berasal dari Jakarta dan Jawa saja.

Pada aspek relevansi, masih ditemukan pemberitaan yang isi atau konten dari beritanya tidak sesuai topik atau judul, sehingga ditemukan isi berita yang tidak relevan dengan topik yang diangkat. Bahkan isi berita seringkali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada periode ketiga, indeks program siaran berita berada di angka 3,01 menurun tipis dibandingkan periode sebelumnya yakni di angka 3,04. Namun angka ini menunjukkan kualitas penyiaran program berita masih di atas standar kualitas yang ditetapkan KPI yakni 3,00. Berikut pergerakan indeks kualitas pada tahun 2018 per periodenya.

Grafik 10. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Periode Tahun 2018



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2018.

Apabila menelaah pada aspek/indikatornya, ada perubahan nilai pada masing-masing indikator di periode ini. Apabila sebelumnya aspek keadilan adalah aspek yang terendah dalam kualitas tayangan berita televisi, pada

periode ini nilai aspek keadilan naik menjadi 2,97 sedangkan angka terendah pada aspek pengawasan 2,95 dan aspek kepentingan publik yakni 2,95 juga. Pada periode ini aspek kualitas yang mendapatkan nilai di atas standar KPI adalah aspek keberagaman (3,09), aspek akurasi (3,09) dan aspek tidak berpihak yang mendapatkan nilai 3,00. Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Indikator Periode III Tahun 2018

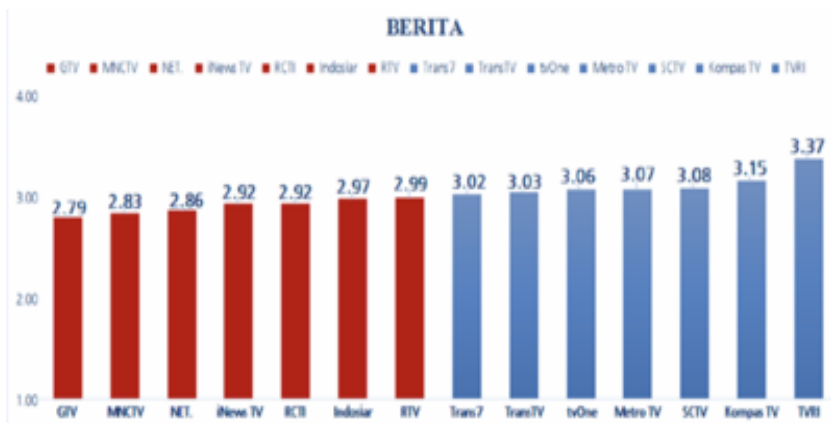
INDEKS PROGRAM SIARAN BERITA BERDASARKAN INDIKATOR	
Aspek Kualitas	Indeks
Keberagaman	3.09
Pengawasan	2.95
Faktualitas	2.99
Akurasi	3.09
Keadilan	2.97
Kepentingan Publik	2.95
Tidak Berpihak	3.00
Relevansi	2.99
INDEKS RATA-RATA	3.01

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2018.

Pada periode ini juga menghasilkan bagaimana indeks kualitas tayangan berita televisi berdasarkan stasiun/ lembaga penyiaran. Pada periode ini, jumlah lembaga penyiaran yang mendapatkan nilai di bawah standar kembali pada tujuh lembaga penyiaran, yang sebelumnya hanya lima lembaga penyiaran yang mendapatkan nilai indeks di bawah

standar KPI yakni 3,00. Tujuh lembaga penyiaran yang mendapatkan nilai di bawah standar adalah GTV, MNCTV, NET, INewsTV, RCTI, Indosiar, dan RTV. Sedangkan TVRI tetap menjadi lembaga penyiaran yang mendapatkan nilai indeks yang terbesar yakni di angka 3,37. Selengkapnya pada grafik di bawah ini.

Grafik 11. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode III Tahun 2018



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2018.

Dalam evaluasi kualitas program berita, panel ahli mencatatkan beberapa hal yang sepatutnya diperhatikan dan sebagai argumen mengapa nilai pada periode ini kembali menurun.

Pada aspek keberagaman, terjadi peningkatan nilai indeks dikarenakan dalam pandangan panel ahli, sudah terdapat keberagaman isu sebagai konten berita yakni

masuknya isu lingkungan dan nasionalisme dalam beberapa topik utama dalam tayangan berita di televisi. Translansi bahasa isyarat juga lebih banyak ditemui di beberapa program berita di televisi. Walau disayangkan isu pemberitaan masih didominasi oleh isu politik dan kriminalitas.

Pada aspek pengawasan, terjadi penurunan nilai indeks dikarenakan isi pemberitaan kurang menggambarkan dampak dari suatu masalah, tetapi hanya bersifat informatif dan seolah-olah kejahatan atau tindak pidana yang terjadi adalah hal yang biasa. Pada pemberitaan terkait bencana, pemberitaan cenderung tidak edukatif di mana hanya fokus pada kesengsaraan korban tetapi tidak memberitakan bagaimana proses pemulihan korban pascabencana.

Pada aspek faktualitas, lembaga penyiaran masih memasukkan opini dalam pemberitaan mereka. Bahkan konsep pemberitaan masih menonjolkan sisi dramatisasi sehingga kerap mengaburkan substansi fakta. Hal ini diperparah dengan banyaknya fakta dalam pemberitaan yang disiarkan yang hasilnya disesuaikan dengan kepentingan pemilik media, seperti berita politik.

Pada aspek akurasi, permasalahan terjadi dikarenakan ketidaksahihan data yang diperoleh jurnalis di lapangan. Untuk itu identitas sumber berita perlu diperhatikan keakuratannya dengan melakukan verifikasi langsung maupun tidak langsung. Pemilihan narasumber juga menjadi permasalahan pada kualitas akurasi, di mana kerap kali ditemukan narasumber yang tidak kompeten untuk memberi pendapat di suatu isu.

Pada aspek keadilan, sebaiknya program berita menyajikan narasumber yang kompeten dari perspektif yang beragam tidak hanya dari elit namun juga masyarakat. Prinsip keadilan kerap tidak ditemukan khususnya pada pemberitaan soal politik, di mana sangat menunjukkan adanya keberpihakan media atau media partisipan yang terlihat dari pilihan salah satu narasumber saja yang dihadirkan dengan komentar yang memberi dukungan terhadap isu yang diberitakan.

Pada aspek kepentingan publik, program berita masih didominasi isu-isu kontroversial daripada isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hilangnya prioritas media pada kepentingan publik, karena beberapa stasiun televisi terindikasi memiliki afiliasi politik pada kelompok tertentu sehingga mempengaruhi isi pemberitaan.

Pada aspek tidak berpihak dinilai masih rendah dikarenakan sebaran pemberitaan yang masih fokus di perkotaan. Pada aspek relevansi, program berita masih kerap kurang relevan dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara umum. Catatan pada periode ini dimensi terendah adalah keadilan (keberimbangan), kepentingan publik, relevansi, pengawasan dan ketidakberpihakan serta faktualitas.

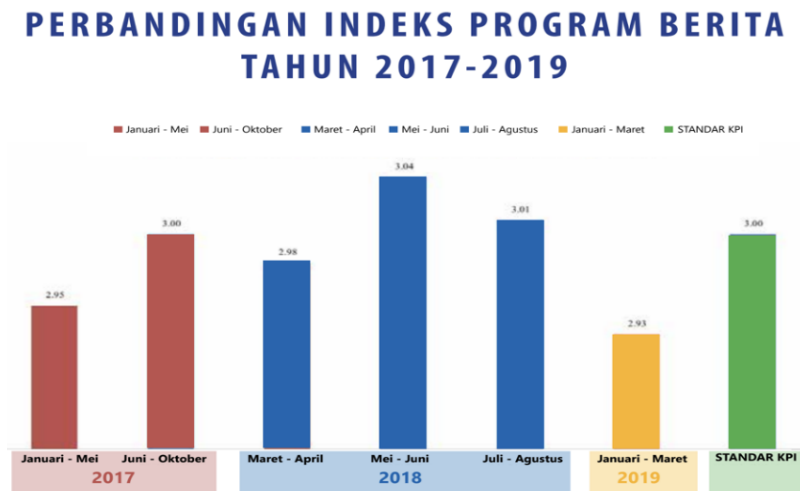
Indeks Kualitas Tayangan Berita di Televisi Indonesia Tahun 2019

Pada periode ini, Komisi Penyiaran Indonesia hanya menggunakan lima aspek dalam menentukan kualitas

tayangan program berita televisi. Kelima aspek tersebut adalah faktualitas, akurasi, keberimbangan, kepentingan publik dan nilai kemanusiaan.

Pada periode pertama, indeks program berita berada di angka 2,93. Angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2017. Angka ini juga menempatkan program berita tidak lagi berada di standar kualitas tayangan yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia yakni pada angka 3 (tiga). Angka ini adalah angka terendah yang pernah diterima program berita televisi sejak tahun 2017. Berikut perbandingannya.

Grafik 12. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Tahun 2017-2019



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2019.

Menelaah pada dimensi/aspek kualitas, aspek keberimbangan pada periode ini menjadi kembali menjadi aspek paling rendah pencapaian indeksinya yakni 2,77. Aspek lain yang nilai indeksinya mencapai di atas 3 adalah faktualitas (3,01) dan Akurasi (3,01) sedangkan Nilai Kemanusiaan memperoleh nilai 2,91 dan Kepentingan Publik memperoleh nilai 2,94. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Indikator Periode I Tahun 2019

Indeks Program Berita Berdasarkan Indikator

Aspek Kualitas	Indeks
Faktualitas	3.01
Akurasi	3.01
Keberimbangan	2.77
Kepentingan Publik	2.94
Nilai Kemanusiaan	2.91
INDEKS RATA-RATA	2.93

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2019.

Indeks kualitas tayangan berita televisi berdasarkan lembaga penyiaran mengungkapkan terdapat 8 lembaga penyiaran yang masih memiliki nilai indeks di bawah standar Komisi Penyiaran Indonesia yakni 3,00. Kedelapan lembaga penyiaran itu adalah MNCTV (2,53), GTV (2,67), Indosiar (2,75), NET (2,79), KompasTV (2,83), MetroTV (2,88), TVOne

dan RTV (2,93). SCTV pada periode ini tercatat sebagai lembaga penyiaran dengan indeks kualitas penyiaran yang tertinggi yakni di angka 3,25. Selengkapnya pada grafik di bawah.

Grafik 13. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode I Tahun 2019

Indeks Program Berita Berdasarkan Indikator

Aspek Kualitas	Indeks
Faktualitas	3.01
Akurasi	3.01
Keberimbangan	2.77
Kepentingan Publik	2.94
Nilai Kemanusiaan	2.91
INDEKS RATA-RATA	2.93

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2019.

Hasil evaluasi dan pendalaman bersama panel ahli pada aspek faktualitas, diketahui bahwa beberapa lembaga penyiaran telah memenuhi standar KPI yakni berdasarkan fakta dan menyertakan sumber yang jelas serta tidak memasukkan opini media ke dalam konten pemberitaan. Walau masih kerap ditemukan sumber berita dan ilustrasi yang diambil dari video amatir yang tentu saja memiliki tingkat kredibilitas dan faktualitas yang tidak terverifikasi dan berkualitas baik untuk tayangan televisi. Beberapa program berita juga disinyalir digunakan sebagai alat

konfirmasi yang menyudutkan salah satu pihak khususnya terkait dengan isu politik tetapi menggunakan sumber dari media sosial bahkan apabila terkait dengan politik, beberapa media cenderung memilih sumber berita yang berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Panel ahli mengapresiasi media yang memaparkan fakta-fakta dengan cukup kreatif melalui grafik/tabel dan narasi.

Pada aspek akurasi, masih ditemukan penggunaan video amatir sebagai sumber rujukan untuk ilustrasi berita yang diragukan kredibilitasnya. Dalam berita juga masih banyak menggunakan sumber dari media sosial yang kemudian disetting untuk membentuk sebuah opini baru tanpa memverifikasi dari sumber yang kompeten atau key informan. Sumber gambar yang digunakan seringkali berasal dari CCTV sehingga akurasi menjadi tidak pasti. Bahkan terdapat pemberitaan yang melakukan wawancara bukan dengan yang ahli di bidangnya.

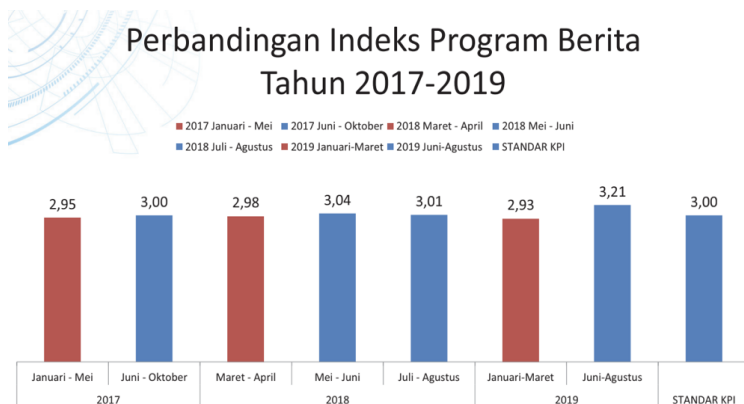
Pada aspek perimbangan, pada tahun ini aspek perimbangan menjadi pertarungan dikarenakan berdekatan dengan tahun politik. Bahkan berita tentang politik diarahkan untuk membangun citra positif salah satu pasangan calon di berbagai program pemberitaan. Program berita terlihat sangat tidak berimbang dan cenderung membangun opini terhadap salah satu calon pasangan presiden saja. Dimensi dari perimbangan seperti *cover both side* dan proporsional sudah terlihat di beberapa tayangan berita, walau penggunaan judul berita yang menarik masih banyak dilakukan namun bernuansa negatif.

Pada aspek kepentingan publik, televisi atau lembaga penyiaran masih tidak dapat mengedepankan kepentingan publik tetapi lebih terlihat mengedepankan kepentingan politik semata.

Pada aspek nilai kemanusiaan, program berita masih dinilai kurang memberikan perlindungan terhadap anak dalam perspektif gender, misalnya dalam pemberitaan prostitusi online, nama pelaku tidak disamarkan. Program berita juga selalu diasumsikan sebagai tontonan yang aman dan nyaman untuk semua orang. Namun demikian sebagian berita memiliki visualisasi yang tidak layak untuk disaksikan anak-anak, bahkan tidak ada program berita yang memberikan peringatan kelompok usia yang layak menonton berita tersebut. Pemberitaan bahkan masih ditemukan kerap melupakan sisi kemanusiaan korban, bahkan banyak mengeksploitasi kesedihan dan dramatisasi keadaan. Lembaga penyiaran hanya melihatnya sebagai peristiwa tragedi tidak ada nilai kemanusiaannya.

Pada periode kedua tahun 2019, indeks kualitas tayangan program berita di televisi menunjukkan indeks kualitas yang meningkat cukup signifikan yakni sebesar 3,21. Nilai indeks ini berada di atas standar program berkualitas yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yakni 3,00. Ini adalah indeks tertinggi yang pernah didapatkan tayangan program berita sejak awal penghitungan indeks. Berikut perbandingannya.

Grafik 14. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Tahun 2017-2019



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2019.

Pada bagan di atas diketahui, indeks yang diperoleh pada periode kedua di tahun 2019 adalah indeks tertinggi yang pernah diperoleh tayangan program berita televisi. Pada periode kedua tahun ini pula indeks per aspek/indikator mendapatkan angka di atas 3,00. Nilai indeks terendah berada pada aspek nilai kemanusiaan yakni 3,14, sedangkan indeks tertinggi berada pada aspek kepentingan publik. Selengkapnya pada tabel di bawah.

Tabel 14. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Indikator Periode II Tahun 2019

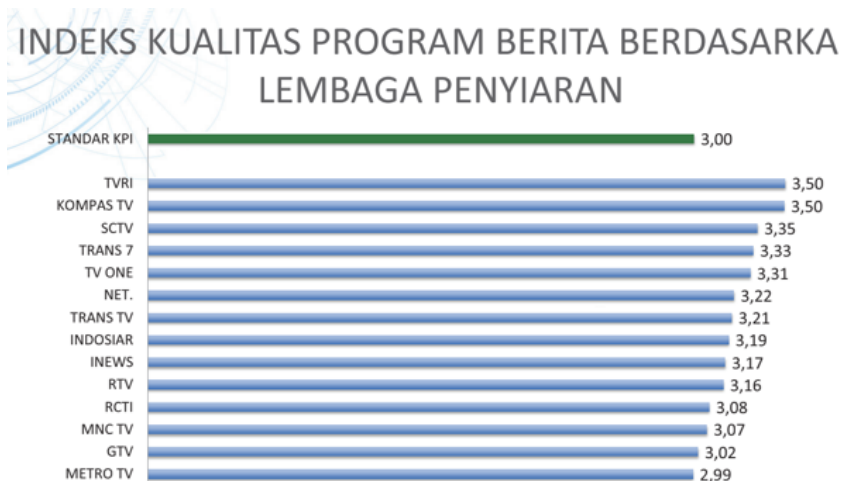
Indeks Program Berita Berdasarkan Indikator

ASPEK KUALITAS	INDEKS
Faktualitas	3.21
Akurasi	3.24
Netralitas/Keberimbangan	3.16
Kepentingan Publik	3.30
Nilai Kemanusiaan	3.14
INDEKS RATA-RATA	3.21

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2019.

Pencapaian terbaik juga terlihat pada indeks kualitas tayangan program berita berdasarkan kinerja lembaga penyiaran, di mana hanya terdapat satu lembaga penyiaran yang mendapat indeks kualitas penyiaran yang berada di bawah standar Komisi Penyiaran Indonesia, yakni MetroTv dengan nilai 2,99. Sedangkan semua lembaga penyiaran lainnya memperoleh indeks di atas 3,00. TVRI dan KompasTV mendapatkan nilai indeks tertinggi yakni masing-masing 3,50.

Grafik 15. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode II Tahun 2019



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2019.

Pada evaluasi kualitas program berita walau kelima aspek yang dipakai telah mencapai lebih dari standar Komisi Penyiaran Indonesia, namun masih terdapat beberapa catatan yang dikemukakan. Pada aspek faktualitas, masih ada kasus-kasus pemberitaan yang menggunakan kata atau kalimat yang mengandung unsur opini terutama pada liputan berita kriminalitas. Contohnya penggunaan kata “Begal Sadis”, “Bandit Kelas Kakap” dan yang lainnya.

Pada aspek akurasi, masih ditemukan kasus di mana sumber pemberitaan menggunakan video yang diambil dari aplikasi youtube yang tingkat kredibilitas serta faktualitasnya masih perlu diverifikasi. Ironisnya beberapa media penyiaran terbawa pada isu media sosial dan memilih mengambil

sumber atau informasi dari akun media sosial atau youtube tanpa menyebutkan sumber bukan hanya disebutkan courtesy of youtube.

Pada aspek keberimbangan, kembali isu keberpihakan muncul dalam diskusi aspek keberimbangan. Lembaga penyiaran masih disinyalir tidak netral dalam pemberitaan politik, bahkan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Pada aspek kepentingan publik, media dinilai kurang menampilkan isu atau berita yang mengandung kepentingan-kepentingan publik, tetapi tetap terlihat lebih mengutamakan kepentingan kelompok politik atau pemilik.

Indeks Kualitas Tayangan Berita Di Televisi Indonesia Tahun 2020

Pada tahun 2020, pengukuran indeks kualitas tayangan program berita di Indonesia dilakukan selama dua periode. Pada periode pertama, dapat diketahui bahwa tren kualitas tayangan program berita di televisi di Indonesia semakin membaik dengan mendapatkan nilai indeks 3,24. Angka ini meningkat dibandingkan dibandingkan perolehan indeks pada periode tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, aspek atau indikator dikelompokkan menjadi 3 dimensi. Dimensi pertama mengandung aspek akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan

antargolongan. Dimensi kedua mengandung aspek tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul. Dimensi ketiga mengandung penerapan prinsip praduga tak bersalah, tidak menghakimi tersangka sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim.

Berdasarkan hasil riset, rata-rata indeks kualitas program berita pada 14 televisi berada di atas angka standar KPI yakni berada di atas angka 3,00. Dimensi kedua memiliki nilai indeks tertinggi yakni 3,36, diikuti oleh dimensi pertama dengan nilai indeks 3,31 serta nilai indeks terendah diperoleh dimensi ketiga yakni dengan nilai 3,07.

Grafik 16. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Dimensi Tahun 2020



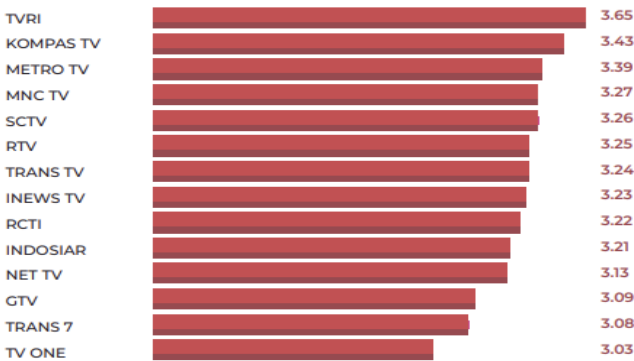
Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2020.

Pada periode ini seluruh lembaga penyiaran mendapatkan nilai indeks di atas 3,00. Hal ini menunjukkan tidak ada satu pun program berita dari 14 televisi yang diukur yang tidak mencapai standar kualitas tayangan berita. TVRI kembali menjadi lembaga penyiaran yang memiliki nilai

indeks tertinggi yakni 3,65 diikuti oleh KompasTV dengan nilai indeks 3,43. Lembaga penyiaran dengan nilai indeks terendah adalah TVOne dengan nilai 3,05.

Grafik 17. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode I Tahun 2020

Indeks Kualitas Program Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2020.

Pada periode kedua, nilai indeks kualitas tayangan televisi kembali naik ke angka 3,36. Nilai ini telah mencapai standar program berkualitas yang ditetapkan KPI. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan pada nilai-nilai indeks pada tahun-tahun sebelumnya. Pada periode kedua, nilai indeks dari seluruh program berita di seluruh lembaga penyiaran juga mencapai nilai indeks di atas 3,00. TVRI kembali menjadi

lembaga penyiaran yang memperoleh nilai indeks tertinggi yakni di angka 3,54, sedangkan lembaga penyiaran yang memiliki nilai indeks terendah adalah TVOne dengan nilai indeks 3,19.

Pada dimensi pertama yakni aspek akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan didapatkan bahwa seluruh lembaga penyiaran telah memperoleh nilai indeks di atas 3,00. Hal ini menunjukkan lembaga penyiaran telah menyajikan berita berdasarkan fakta yang terjadi dan pernyataan narasumber adalah benar. Program berita juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak. Program siaran berita dinilai sudah tidak lagi berpihak pada kepentingan tertentu tetapi lebih mengutamakan kepentingan publik, program siaran berita tidak lagi mengadu domba dan menyajikan berdasarkan fakta. Program siaran berita sudah cenderung tidak mencampur fakta dengan opini. Program siaran juga tidak menyajikan unsur kekerasan verbal dan nonverbal secara berlebihan. Hal ini apabila dianalisis dikarenakan pada tahun ini telah melewati masa tahun pemilu.

Nilai indeks yang sama baiknya juga diperoleh pada dimensi kedua yakni tayangan berita tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul. Hal ini berarti program berita tidak memuat informasi bohong termasuk hoaks atau fitnah. Program berita juga tidak menyajikan berita yang keji.

Program siaran berita tidak menyajikan audio dan visualisasi yang mengandung unsur pornografi.

Pada dimensi ketiga yakni penerapan prinsip praduga tak bersalah di mana program siaran berita tidak menghakimi tersangka sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim. Pada dimensi ini tidak semua lembaga penyiaran mendapatkan nilai indeks di atas 3,00. SCTV adalah satu-satunya lembaga penyiaran yang memperoleh nilai indeks 2,98.

Indeks Kualitas Tayangan Berita Di Televisi Indonesia Tahun 2021

Pada tahun 2021, KPI melakukan dua kali periode pengukuran indeks kualitas tayangan berita. Pada periode ini digunakan 8 dimensi untuk mengukur kualitas. Delapan dimensi tersebut yakni;

Dimensi satu, akurat. Dimensi kedua, Adil, berimbang dan tidak berpihak. Dimensi ketiga, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi. Dimensi keempat, tidak mempertentangkan agama, ras, suku, dan antar golongan. Dimensi kelima, tidak membuat berita bohong. Dimensi keenam, tidak membuat berita sadis. Dimensi ketujuh, tidak membuat berita cabul. Dimensi kedelapan adalah menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

Pada periode pertama yakni Bulan Januari hingga Maret 2021, nilai indeks kualitas tayangan berita mendapatkan nilai 3,25. Di mana dimensi yang memperoleh nilai dibawah standar KPI yakni 3,00 adalah dimensi ketiga yakni tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi. Sedangkan

tujuh dimensi lainnya telah mendapatkan nilai indeks di atas 3,00. Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Dimensi Periode I Tahun 2021

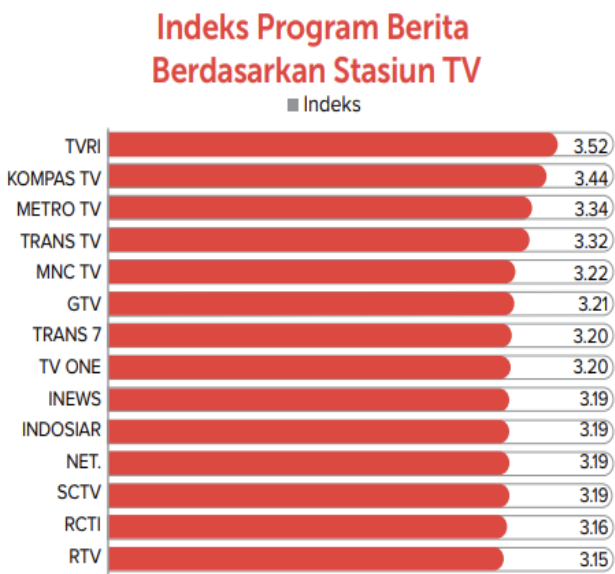
Aspek Kualitas	Indeks
Dimensi 1	3.34
Dimensi 2	3.06
Dimensi 3	2.96
Dimensi 4	3.51
Dimensi 5	3.43
Dimensi 6	3.02
Dimensi 7	3.42
Dimensi 8	3.27
Indeks Rata-rata	3.25

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2021.

Indeks tertinggi didapatkan pada dimensi empat yakni tidak mempertentangkan agama, ras, suku dan antar golongan di mana hal ini berarti informasi yang disajikan tidak mengandung diskriminasi atas duku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sedangkan dimensi dengan nilai indeks terendah ditemukan pada dimensi ketiga yakni tidak mencampuradukkan fakta dan opini. Hal ini menunjukkan bahwa berita masih cukup tidak berkualitas pada independensi dan keberimbangan di mana kerap kali fakta bercampur dengan opini.

Berdasarkan lembaga penyiaran, seluruh lembaga penyiaran yang diukur dalam periode ini menunjukkan angka di atas 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tayangan berita dari lembaga penyiaran telah memenuhi standar berkualitas. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik 18. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode I Tahun 2021



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2021.

Dari bagan di atas, TVRI adalah lembaga penyiaran dengan nilai indeks kualitas tertinggi yakni pada angka 3,52 diikuti oleh KompasTV dengan angka 3,44. Sedangkan lembaga penyiaran dengan angka terendah diperoleh RTV dengan nilai indeks 3,15.

Pada periode kedua yakni Juni hingga Agustus, nilai indeks kualitas tayangan televisi memperoleh angka 3,24 atau dapat dianggap stagnan dengan peroleh indeks sebelumnya yakni di angka 3,25. Pada periode kedua ini, nilai indeks kualitas tayangan berita masih rendah pada dimensi ketiga yakni pada dimensi tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi dengan tidak menyajikan fakta yang bercampur dengan opini. Sedangkan dimensi yang memperoleh indeks terbesar adalah pada dimensi keempat yakni tidak mempertentangkan agama, ras, suku, dan antar golongan. Selengkapnya pada tabel berikut.

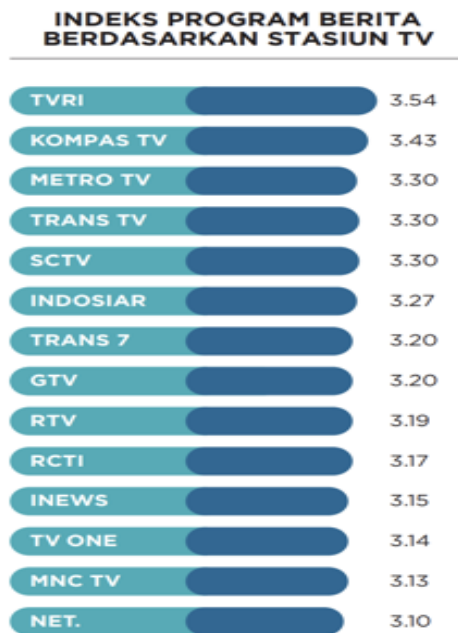
Tabel 16. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Dimensi Periode II Tahun 2021

DIMENSI	INDEKS
Dimensi 1	3.27
Dimensi 2	3.06
Dimensi 3	2.99
Dimensi 4	3.48
Dimensi 5	3.37
Dimensi 6	3.14
Dimensi 7	3.47
Dimensi 8	3.17
INDEKS RATA-RATA	3.24

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2021.

Berdasarkan pada lembaga penyiaran, TVRI kembali mendapatkan nilai indeks tertinggi yakni di angka 3,54. Sedangkan NET mendapatkan nilai indeks terendah yakni di angka 3,10. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik 19. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode II Tahun 2021



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2021.

Walau nilai indeks tetap, namun masih banyak lembaga penyiaran yang menyajikan informasi berdasarkan berita yang trending atau viral di media sosial. Media juga kerap kali tidak berupaya untuk melakukan konfirmasi ulang terkait

dengan kebenaran informasi yang akan ditayangkannya. Hal ini menjadi penting dikarenakan ada perbedaan yang paling mendasar antara media massa dan media sosial, khususnya dalam pentingnya akurasi dan verifikasi informasi. Media massa dalam hal ini lembaga penyiaran sepatutnya melakukan verifikasi dan cover both side dalam mendapatkan informasi, sedangkan media sosial tidak memiliki kewajiban ini. Pemberitaan hukum dan kriminalitas juga masih menyisakan permasalahan. Tayangan berita masih banyak yang membuka inisial/gambar pelaku padahal kasusnya masih bersifat dugaan. Sepatutnya media penyiaran masih tetap mengutamakan azas praduga tak bersalah dengan menggunakan inisial dan menyamarkan muka/gambar pelaku. Media juga tercatat masih kerap membuka identitas anak yang terkait dengan kasus hukum secara gamblang dan tidak memburamkan muka anak.

Indeks Kualitas Tayangan Berita Di Televisi Indonesia Tahun 2022

Pada tahun 2022, Komisi Penyiaran Indonesia hanya melakukan sekali saja pengukuran indeks kualitas tayangan berita televisi. Nilai indeks yang diperoleh pada tahun 2022 yakni pada angka 3,31. Angka ini meningkat dari periode kedua tahun sebelumnya yakni 3,24.

Grafik 20. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Tahun 2017-2022



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2022.

Indeks kualitas tayangan berita televisi terbagi dalam enam dimensi yakni (1) berita bohong, (2) prinsip praduga tak bersalah, (3) akurat, (4) berita sadis, (5) adil, berimbang, dan tidak berpihak, serta (6) factual dan tidak memasukkan opini redaksi.

Berdasarkan hasil indeks kualitas tayangan berita televisi pada tahun 2022 diketahui dimensi dalam indeks tayangan televisi yang terendah adalah pada dimensi faktual dan tidak memasukkan opini publik yakni pada angka 3,06, dengan dimensi tertinggi pada dimensi berita bohong. Selengkapnya pada grafik di bawah ini.

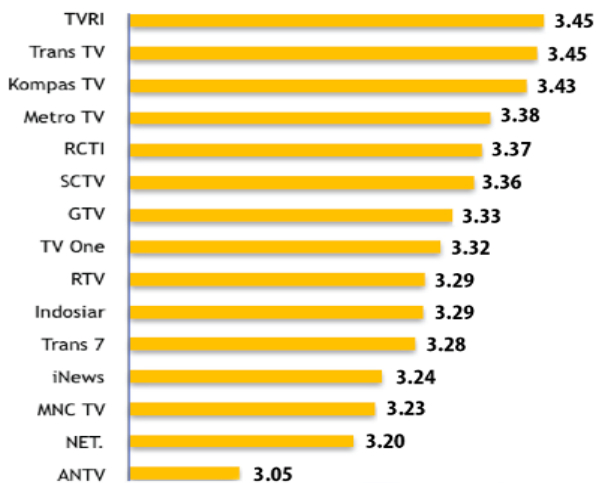
Grafik 21. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Dimensi Tahun 2022



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2022.

Sedangkan indeks program berita berdasarkan Stasiun penyiaran, diketahui TVRI memiliki indeks tertinggi yakni di angka 3,45 sedangkan ANTV memiliki indeks terendah yakni di angka 3,06. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 22. Perbandingan Indeks Program Siaran Berita Berdasarkan Lembaga Penyiaran Tahun 2022



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2022.

Namun seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa walau nilai perdimensi telah berada di atas standar kualitas komisi penyiaran Indonesia yakni pada angka 3,00, terdapat beberapa catatan yang cukup mendalam mengenai angka-angka ini di setiap periodenya.

Oleh karena itu, sistematika buku ini setelah pendahuluan akan membahas secara lebih mendalam mengenai dimensi-dimensi di atas yang tertuang dalam beberapa sub bab di bab 2. Beberapa sub bab yang masuk dalam bab 2. Potret program siaran berita tv Indonesia di antaranya adalah (a) fakta, opini dan verifikasi sumber dalam tayangan berita; (b) keberimbangan dan keberagaman berita; (c) objektivitas dan kepentingan dalam tayangan berita; (d) SARA, Kekerasan dan Pornografi dalam berita; serta (e) Praktik Trial by the Press. Buku akan ditutup dengan kesimpulan, tantangan dan harapan besar akan kualitas tayangan berita televisi di Indonesia ke depannya.

Bab II.

Potret Kualitas Program Berita Di Televisi Di Indonesia

Pada bab ini akan digambarkan dan dipaparkan secara mendalam bagaimana potret kualitas program berita di televisi di Indonesia berdasarkan beberapa dimensi yang digunakan dalam melakukan pengukuran indeks. Dimensi yang ditelaah tidak seluruhnya namun disesuaikan dengan dimensi yang selama proses pengukuran menunjukkan nilai yang rendah dibandingkan dimensi yang lain. Beberapa dimensi yang akan dibahas terbagi dalam lima sub bab yakni (a) fakta, opini dan verifikasi sumber dalam tayangan berita; (b) keberimbangan dan keberagaman berita; (c) objektivitas dan kepentingan dalam tayangan berita; (d) SARA, Kekerasan dan pornografi dalam berita; serta (e) Trial by the Press dan Misinformasi.

A. Fakta, Opini Dan Verifikasi Sumber Dalam Tayangan Berita Televisi

Walau berbasis pada audio visual, gambar dan suara,

tayangan berita di televisi juga memiliki tantangan pada menyajikan fakta dengan sumber yang tepat sehingga informasi berita yang ditayangkan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat terwujud dengan beberapa indikator yang perlu dipenuhi, yakni kesahihan narasumber atau autentifikasi sumber maupun narasumber dalam berita sehingga yang tersaji dalam tayangan berita adalah sebuah kebenaran atau fakta.

Prinsip utama dan pertama dalam jurnalistik adalah kebenaran. Berita yang ditayangkan selayaknya adalah berdasarkan kebenaran. Kovach dan Rosensteil (2001) menyebutkan kewajiban pertama dari seorang jurnalis adalah menyampaikan kebenaran (*seeking and delivering the truth*). Namun kemudian muncul perdebatan apa yang dimaksudkan dengan kebenaran dalam jurnalistik. Kebenaran dalam jurnalistik menurut Nasution (2015) adalah fakta-fakta realitas yang didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan dan telah diverifikasi. Dalam hal ini upaya pencarian kebenaran dilakukan dengan menggunakan perangkat analisis, logika dan pengetahuan. Khalayak atau audiens televisi tentu saja berharap mendapatkan sebuah kebenaran atas berita yang ditayangkan dari kejadian yang terjadi di masyarakat (Dean, 2006)². Hal ini menjadi penting karena kerja jurnalistik sepatutnya telah memverifikasi atas kebenaran sebuah kejadian yang tidak mungkin dilakukan oleh audiens sendiri secara langsung.

² Catherine Dean, 2006, "Truth and the Media", paper presented at Strathmore University 4th Ethics Conference on "Media and the Common Good". 3rd - 4th November.

Kasus terbesar mengenai permasalahan fakta yang terjadi di pemberitaan televisi adalah kasus “dugaan penganiayaan” Ratna Sarumpaet. Kasus ini terjadi pada tahun 2018, di mana televisi menghadirkan pemberitaan mengenai dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum terhadap Ratna Sarumpaet. Hampir semua televisi menghadirkan pernyataan Ratna Sarumpaet yang hadir dengan keadaan seakan-akan teraniaya.

Gambar 1. Berita Ratna Sarumpaet Dikeroyok Orang Tak Dikenal



Sumber: Berita Satu, 2018.

Berita tentang “dugaan teraniayanya” Ratna Sarumpaet kemudian bergulir luas, dengan hadirnya berita mengenai para tokoh nasional yang merasa empati dan simpati terhadap Ratna Sarumpaet. Tokoh-tokoh nasional

ini diberitakan mengunjungi dan menengok serta merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Ratna Sarumpaet.

Gambar 2. Berita Prabowo Angkat Bicara Tentang Penganiayaan Ratna Sarumpaet



Sumber: CNN Indonesia, 2018.

Bergulirnya waktu, ternyata faktanya, tidak terjadi penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet. Kejadian yang disebutkan dalam pemberitaan tidak pernah terjadi. Sumber dalam pemberitaan sebagian besar adalah pihak dari Ratna Sarumpaet, hampir tidak ada sumber dari pihak yang diduga dan ditudingkan melakukan penganiayaan. Bahkan pemberitaan bergulir bukan dalam melakukan verifikasi atas dugaan kasus namun bergulir pada fakta dan kejadian di mana para tokoh mengunjungi dan bersimpati pada Ratna Sarumpaet.

Kisah ini adalah salah satu bentuk nyata bagaimana sepatutnya kerja jurnalistik termasuk lembaga penyiaran melakukan prinsip dasar dari sebuah fakta, yakni melakukan verifikasi atas sumber dan menyajikan fakta yang sebenarnya.

Berbagai media kemudian memberitakan bahwa tidak ada penganiayaan pada saat pihak terkait melakukan klarifikasi dan Ratna Sarumpaet sendiri mengakui tidak adanya kejadian tersebut. Pelajaran penting atas kejadian ini adalah tayangan berita sepatutnya berdasarkan pada fakta dan tidak malas untuk melakukan verifikasi pada sumber langsung kelapangan dan tetap bersikap skeptis. Namun apa yang terjadi media melalui tayangan berita menjadi katalisator fakta yang tidak benar, media bahkan menyebarkan opini dan perspektif atas dugaan penganiayaan ini. Dampak lainnya atas kejadian ini, profesionalitas media dan jurnalis kemudian dipertanyakan dan diperdebatkan. Kualitas kerja jurnalistik kemudian dipertaruhkan. Ini adalah salah satu ujian terbesar kerja dan kegiatan jurnalistik di Indonesia dengan mempertaruhkan kepercayaan audiens atas profesionalitas media.

Kegiatan jurnalistik menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 adalah kegiatan yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Prinsip jurnalisme yang dikemukakan oleh Kovach dan Rosenstiel adalah Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Dari pada itu maka menjadi tanggung jawab jurnalis lah dalam mencari dan menyampaikan kebenaran kepada audiens untuk memenuhi hak audiens atau khayalak itu sendiri dalam mendapatkan kebenaran.

Namun diskusi akan kebenaran terus berkembang Deaver (1990)³ membagi kebenaran menjadi beberapa dictum:

- (1) intent to be open and fully honest – bermaksud jujur dan terbuka sepenuhnya.
- (2) intent to be honest but selective use of information – bermaksud jujur dengan selektif informasi.
- (3) use of untruth but with no intention to deceive – menggunakan ketidakbenaran tanpa maksud menipu.
- (4) conscious intent to deceive – sadar bermaksud menipu.

Pada kasus berita Ratna Sarumpaet, dapat dipastikan bahwa lembaga penyiaran berada pada tidak ada maksud penipuan bukan sadar bermaksud menipu, namun lembaga penyiaran tidak melakukan verifikasi informasi dan tidak sepenuhnya terbuka akan kelalaian mereka dalam menayangkan informasi yang bohong/salah.

Mengapa kebenaran dalam berita penting? Karena informasi yang diterima oleh masyarakat dan dianggap kebenaran maka masyarakat atau khalayak akan menjadikannya sebagai dasar sebuah keputusan dan rujukan. Informasi yang salah untuk dijadikan rujukan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Isu juga tidak terbatas pada isu-isu tertentu saja namun segala bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, lingkungan, budaya, hingga teknologi. Namun hal ini tidak

³ Deaver, F. (1990) , "On Defining Truth", *Journal of Mass Media Ethics*, 5(3), 168-177

tertutup kemungkinan munculnya perdebatan mengenai tingkat kebenaran yang ditampilkan oleh media itu sendiri. Perdebatan ini juga kemudian mempengaruhi kepercayaan audiens atau khalayak terhadap media. Bila informasi yang disampaikan adalah kebenaran atau terbukti benar, maka kepercayaan audiens akan media akan mulai terbentuk dan meningkat. Bila yang disampaikan tidak pasti kebenarannya atau ternyata bukan fakta, maka dengan mudah audiens akan runtuh kepercayaannya kepada media. Oleh karena itu kepercayaan audiens terhadap media harus dijaga dan dipertahankan karena inilah dasar dari hubungan antara media dan audiens atau khalayaknya. Apa modal dasar dari hidupnya media? Yakni kepercayaan audiens atau khalayak. Bila khalayak tidak lagi percaya maka media akan tidak lagi berfungsi khususnya pada fungsi kewajiban sosialnya pada masyarakat.

International Federation of Journalist (2008)⁴ menyampaikan beberapa prinsip untuk memenuhi kewajiban pertama jurnalistik yakni mencari dan menyajikan kebenaran:

- (1) Dalam menyampaikan kebenaran maka perlu menekankan pentingnya akurasi faktual melalui proses cek dan ricek, menekankan keaslian/ otentik melalui pertanyaan, mengaku salah bila salah dan siap mengkoreksi, mengungkapkan kebenaran melalui riset yang tepat, wawancara yang baik dan mendalam serta memiliki pemahaman yang cukup mengenai ragam isu yang ada.

⁴ Aidan (2008), *To Tell You the Truth: The Ethical Journalism Initiative*, Brussels, Belgium: International Federation of Journalists

- (2) Berita harus memuat prinsip independen dan fair, di mana berita yang disajikan lengkap tanpa menyembunyikan fakta-fakta yang signifikan; menghindari bias; menolak sebutan yang bersifat merendahkan; membuka kesempatan atau ruang untuk ketidaksepakatan yang valid dan beralasan; membuka ruang untuk mereka yang tidak memiliki ruang untuk berpendapat; serta kukuh pada pendirian ideal tanpa memperdulikan godaan kepentingan komersial dan politik.
- (3) Berita harus memuat prinsip humanitas dan solidaritas, di mana berita tidak berdampak pada sesuatu yang bersifat merusak pihak lain; berpikiran terbuka dan bijak penuh pertimbangan; menghormati hak-hak publik dan kualitas etika moral dari jurnalis.

Potret Kesahihan Sumber dan Narasumber Dalam Tayangan Berita Televisi Di Indonesia

Dalam catatan yang ditelaah KPI melalui diskusi pada informan ahli terkait dengan kesahihan sumber dan narasumber dalam tayangan berita televisi di Indonesia terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kesahihan sumber dan narasumber dalam tayangan berita televisi di Indonesia, di antaranya (1) perkembangan teknologi khususnya teknologi digital dan media sosial; yang menyebabkan (2) perkembangan arus informasi yang makin deras, (3) proses dan penentuan narasumber dalam sebuah pemberitaan;

(4) kompetensi narasumber; (5) kemampuan wartawan/jurnalis mencari narasumber/menggali lebih dalam kepada narasumber akan isu/ berita yang diangkat.

Penelitian terbaru yang dilakukan di Inggris menyebutkan bahwa media di Inggris kerap kali menggunakan narasumber yang tidak cukup relevan. Penelitian dilakukan selama pemberitaan mengenai Covid, namun narasumber dalam berita lebih banyak didominasi oleh politisi, sedangkan audiens berharap narasumber yang berbicara tentang Covid adalah lebih dari pihak kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan narasumber dan kompetensi narasumber adalah hal yang utama namun sering kali dilupakan oleh media lembaga penyiaran (Morani, Cushion, Soo, 2022)

Sumber atau penentuan narasumber ini menjadi penting. Hal ini dikarenakan narasumber akan menentukan bagaimana sudut berita atau angle dari sebuah pemberitaan yang ditayangkan di televisi. Dalam pemberitaan televisi di Indonesia, masih kerap ditemukan berita-berita yang ditayangkan tidak menyertakan sumber yang relevan atau bahkan tidak menyertakan narasumber dalam pemberitaan yang ditayangkan. Apapun bentuk pemberitaannya, baik satu paket utuh, maupun hanya pembacaan narasi atau dikenal dengan voice over, sumber menjadi hal yang hakiki yang harus ada dalam pemberitaan. Bahkan walau pemberitaan yang dilaporkan langsung dari lapangan atau berita pandangan mata, perlu diinformasikan sumber atau narasumber yang dijadikan fakta yang ditayangkan di televisi tersebut.

Adanya sumber atau narasumber dalam sebuah berita televisi menjadi penting dikarenakan apabila tidak ada sumber atau narasumber maka disinyalir berita tersebut akan tidak objektif dan hanya memberitakan opini tanpa dasar fakta yang cukup jelas.

Permasalahan lainnya yang muncul adalah terjadinya pemotongan pernyataan yang dikeluarkan narasumber pada saat ditayangkan di televisi. Keterbatasan waktu dalam penyangan berita memang memungkinkan adanya pemotongan pernyataan narasumber. Namun yang menjadi catatan adalah apabila pernyataan yang terpotong menyebabkan terjadinya perbedaan makna dan pesan yang disampaikan dalam berita tersebut. Pada kasus lain didapatkan pemotongan pernyataan narasumber kerap kali tidak pada waktu yang tepat sehingga inti dari pernyataan yang ingin disampaikan oleh narasumber menjadi tidak utuh. Pada beberapa pemberitaan juga ditemukan adanya gambar video narasumber yang tidak utuh baik pernyataan atau wajah narasumbernya.

“Namun ada beberapa pemberitaan juga yang tidak menampilkan secara utuh wajah ataupun video dari narasumber tetapi dia mengutip pernyataan yang menyebutkan nama. Ada hal yang saya jadikan indikator utama”

- Prof. Dr. Judhariksawan, SH., MH
(Universitas Hasanudin)

Potret Penayangan Fakta Dalam Tayangan Berita Televisi Di Indonesia



Pembahasan kualitas program siaran berita bersama kalangan akademisi dan jurnalis pada Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2022.

Program siaran berita harus berdasarkan fakta, yaitu benar terjadi dan benar diucapkan oleh narasumber, serta tidak memuat opini redaksi. Kedua statement tersebut merujuk pada kode etik jurnalistik serta asas profesionalitas.

Dalam pemberitaan media, Jurnalis terus-menerus dihadapkan pada masalah pelaporan fakta dan opini tersebut. Penting bagi mereka untuk memahami dan membedakannya karena akan mempengaruhi cara jurnalis menyampaikan informasi kepada pembacanya.

Berdasarkan arti katanya sendiri fakta merujuk pada sesuatu yang dianggap benar terjadi atau dikatakan telah

terjadi. Sedangkan opini adalah suatu kesimpulan yang dicapai seseorang setelah melihat fakta-faktanya. Opini didasarkan pada apa yang orang yakini sebagai fakta.

Henshall & Ingram (1991) mengungkapkan bahwa ada beberapa ada tiga jenis fakta yang harus dihadapi jurnalis media yakni fakta yang telah terbukti kebenarannya; fakta yang mungkin benar meskipun belum terbukti kebenarannya; dan fakta-fakta yang mungkin benar, meskipun tampaknya bohong.

1. Fakta yang telah terbukti kebenarannya adalah fakta yang terbukti dan diterima sebagai kebenaran oleh semua orang. Sebagai contoh, pernyataan berita yang mengatakan “Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia”. Faktanya untuk saat ini dapat terbukti dan diterima secara universal oleh masyarakat tanpa jurnalis harus membuktikan kebenarannya atau mengungkapkan sumber atau atribusi terhadap pernyataan tersebut. Kecuali jika telah terjadi pergantian kepemimpinan Presiden RI, faktanya tentu dapat berubah.
2. Fakta yang mungkin benar yakni pernyataan yang tampak masuk akal untuk dipercaya sebagai kebenaran, tetapi pernyataan tersebut tidak dapat terbukti secara langsung. Hal ini dapat terjadi jika jurnalis tidak memiliki akses ke informasi atau karena jurnalis tidak memiliki waktu untuk menggali bukti. Fakta yang mungkin termasuk pernyataan oleh orang-orang yang berada dalam

posisi untuk mengetahui kebenaran dan yang tidak memiliki alasan yang jelas untuk berbohong. Jika Menteri Keuangan memberi tahu Parlemen bahwa \$ 10 juta dikumpulkan dari pajak tahun lalu, Anda dapat menganggap ini sebagai fakta yang mungkin terjadi. Namun, ini tidak sama dengan fakta yang terbukti. Meskipun mereka mungkin benar, ada kemungkinan mereka salah, baik karena kesalahan telah dibuat atau karena seorang narasumber yang berbohong. Karena keraguan ini ada, kita harus menghubungkan fakta-fakta yang mungkin dengan kredibilitas sumber yang menyampaikannya.

3. Kemungkinan kebohongan. Jurnalis kadang kala membuat pernyataan yang tampak di permukaan tidak benar, tetapi mungkin saja benar. Klaim bahwa “Perdana Menteri diam-diam menikahi seorang model berusia enam belas tahun” mungkin tampak sangat tidak mungkin, tetapi itu mungkin benar.

Untuk itu jurnalis harus selalu memeriksa pernyataan sebelum menggunakannya. Fakta akan menjadi fakta yang terbukti setelah kebenarannya diperiksa.

Fakta dapat dilihat oleh orang lain sebagai kemungkinan kebohongan. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang memiliki perbedaan pendapat atau opini. Meskipun opini dapat berupa pernyataan apa pun tentang apa yang diyakini seseorang sebagai benar, bagi jurnalis ada beberapa kategori utama opini Henshall & Ingram (1991).

Yang pertama adalah opini yang dapat diverifikasi. Ini merujuk pada kesimpulan yang dapat diverifikasi (terbukti benar) atau terbukti salah. Orang yang memprediksi hasil dari pertandingan sepak bola menarik kesimpulan dari apa yang mereka ketahui tentang hal tersebut. Mereka mungkin mengatakan bahwa PSM Makassar akan memenangkan pertandingan yang akan datang. Ini adalah pendapat mereka. Setelah pertandingan selesai, pendapat itu terbukti benar atau salah, tergantung apakah PSM Makassar menang atau kalah.

Meskipun orang biasanya mendasarkan pendapat mereka pada fakta, selalu ada bahaya bahwa mereka dapat mencapai kesimpulan yang salah. Mereka mungkin mendasarkan pendapat mereka pada fakta-fakta yang tidak benar (seperti kemenangan di kandang sendiri); mereka mungkin gagal mempertimbangkan fakta yang relevan seperti taktik tim PSM Makassar yang brilian atau mereka mungkin telah mencapai kesimpulan yang salah karena celah dalam logika yang mereka gunakan untuk memikirkannya.

Kedua adalah pendapat ahli. Para ahli dapat memberikan pendapat mereka tentang suatu masalah, berdasarkan pengetahuan khusus mereka tentang fakta-fakta. Seorang ahli patologi memberikan pendapat ahli ketika dia mengatakan pemeriksaan bahwa dia percaya seseorang dibunuh sebelum dibuang ke sungai. Dia telah memeriksa tubuh dan menemukan sangat sedikit air di paru-paru. Kecuali ada bukti dari apa yang terjadi, ini harus tetap menjadi pendapat dan dikaitkan dengan ahli patologi. Pendapat itu

nantinya dapat diverifikasi ketika si pembunuh mengaku dan menjelaskan apa yang terjadi.

Jenis pendapat ahli terbaik adalah pendapat di mana ahli menjaga perasaan pribadi mereka dari kesimpulan mereka. Mereka melihat fakta sebagaimana yang mereka lihat, dan menarik kesimpulan hanya berdasarkan fakta tersebut.

Namun, bahkan pendapat dari seorang ahli yang tidak memihak harus diatribusikan, sehingga pembaca atau pendengar Anda dapat menilai kemungkinan kebenaran atau sebaliknya dari apa yang mereka katakan.

Ketiga, opini pribadi. Pendapat pribadi adalah kesimpulan yang dicapai seseorang sebagian berdasarkan fakta dan sebagian lagi berdasarkan apa yang sudah mereka yakini. Pendapat pribadi dapat diberikan oleh orang hanya karena diminta. Jika Anda melakukan vox pop dengan orang-orang di jalan, menanyakan pendapat mereka tentang hukuman mati, mereka akan memberi Anda pendapat pribadi mereka. Pendapat pribadi yang didasarkan pada keyakinan atau nilai yang telah dimiliki seseorang disebut penilaian nilai.

Jurnalis mungkin akan bertemu dengan banyak orang yang ingin mengungkapkan pendapat pribadi mereka untuk mengesankan orang dan mempengaruhi sikap orang lain. Mereka akan melihat surat kabar, radio, atau stasiun televisi sebagai cara yang berguna untuk menyampaikan pendapat pribadi mereka kepada orang-orang. Contoh paling jelas dari hal ini adalah orang-orang seperti politisi, yang

percaya bahwa mereka tahu apa yang benar atau salah bagi orang lain. Mereka perlu menyampaikan pendapat mereka kepada orang-orang, untuk mendapatkan dukungan mereka. Perdana menteri yang mengatakan bahwa pemerintahannya baik untuk rakyat mengungkapkan penilaian nilai. Jika dia mengatakannya cukup sering, orang akan percaya bahwa itu benar, apakah itu berdasarkan fakta atau tidak.

Bahkan para ahli dapat membuat penilaian nilai, meskipun ini sangat berbeda dari pendapat yang tidak memihak hanya berdasarkan fakta yang diketahui. Seorang ahli yang memberikan pendapat pribadi mungkin memiliki informasi yang lebih baik daripada banyak orang lain tentang topik itu, tetapi pendapat mereka masih hanya penilaian nilai, berdasarkan keyakinan mereka sendiri



Akademisi ikut memberi pendapat atas kualitas program siaran berita di televisi.

Praktik Fakta, Opini dan Verifikasi Sumber Pada Media Indonesia

Pada praktiknya, berdasarkan hasil riset indeks kualitas program siaran TV sejak tahun 2015-2022 terkait aspek faktualitas menunjukkan bahwa hampir semua berita di Indonesia didasarkan pada fakta. Media menyajikan berita yang merujuk pada narasumber. Sehingga tidak mungkin pemberitaannya dinyatakan tanpa fakta. Persoalannya adalah apakah fakta yang ditampilkan benar atau tidak. Hal tersebut memiliki kaitan dengan aspek kebenaran.

Jurnalis dalam hal ini perlu membedakan aspek faktualitas dan aspek kebenaran. Pemberitaan media yang mengutip pendapat atau pernyataan dari narasumber nyata merujuk pada fakta sehingga tentunya memenuhi aspek faktualitas. Sedangkan, apakah pendapat atau pernyataan dari narasumber adalah benar hal tersebut belum tentu kebenarannya. Hal ini perlu dikejar oleh jurnalis untuk menunjukkan metode yang objektif. Meskipun media di Indonesia sudah tampak berupaya melakukan hal tersebut namun, informan memandang masih terdapat beberapa media yang hanya mengutamakan fakta tanpa melakukan verifikasi terhadap kebenaran fakta.

“Saya sepakat dengan pendapat yang pertama tadi. Hamper semua berita itu benar. Karena dari peristiwa itu selalu ada penjelasan keterangan dari pihak yang berkompeten. Misalkan ada sumber dari kepolisian ada, kasus hukum ada dari kejaksaan. Selain itu juga kalau itu bukan reportase langsung dari stasiun berita ya itu dari warga yang menyaksikan, ya itu video amatir lah . kalau tidak itu dari cctv setempat.”

- Drs. Saryadi, M.Si
(Universitas Diponegoro)

Selain pemenuhan aspek faktualitas dan kebenaran, catatan temuan informan dalam riset indeks program siaran berita TV menemukan adanya persoalan pencampuran antara fakta dan opini. Terkhusus pada berita-berita kriminal. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian. Sebagai contohnya, Pada pemberitaan kriminal seringkali jurnalis atau host acara berita tidak disiplin dalam mengidentifikasi status tersangka, terduga atau pelaku.

Contoh lainnya ada pada salah satu pemberitaan INews TV tahun 2020 yang menampilkan pemeriksaan rapid test pelaku pengambil jenazah Covid-19 di kota Makassar. Informan menemukan bahwa media memberitakan mereka positif Covid-19 saat dinyatakan reaktif rapid test. Sedangkan positif Covid-19 baru dapat dinyatakan apabila hasil swab test mereka yang menunjukkan hasil positif.

Hal ini menunjukkan adanya pencampuran fakta dan opini dalam berita yang berhubungan dengan akurasi pemberitaan. Media perlu hati-hati saat mengidentifikasi orang-orang yang 'terduga' positif Covid-19 tersebut. Faktanya mereka dinyatakan reaktif pada rapid test, tetapi media tidak boleh mengonfirmasi mereka positif Covid-19. Beberapa berita lainnya yang mencampurkan fakta dan opini juga ditemukan pada sampel tahun 2022.

“Berkaitan dengan fakta, erat juga kaitannya dengan opini. Ketika wartawan hanya melaporkan pandangan mata tanpa ada wawancara narasumber itu takutnya menjadi opini. Menurut saya, banyak berita yang singkat karena durasi jadi tidak mencantumkan wawancara dgn narasumber. Mengacu pada fakta opini, wawancara narasumber harus tetap dicantumkan. Beberapa kali dalam narasi yang dibacakan pembawa berita maupun VO pun, tidak disebutkan data itu dari mana. Disebutkan ada kecelakaan sekian, meninggal sekian. Tetapi tidak disebutkan data itu darimana? apakah dari polisi? Apakah saksi mata yang bilang? Kalau tidak ada narasumbernya jatuhnya jadi opini nanti. Secara visual benar terjadi, tapi perlu ada verifikasi dengan mewawancarai narasumber menurut saya. Saran saya, meskipun berita singkat tetap harus ada pernyataan narasumber melalui wawancara. Naskah beritanya harus kalimat aktif. Ada subject & predikat. Kalau ada subjeknya, setidaknya narasumbernya tersebut. Kalau berita laporan pandangan mata, dia harus menyebutkan narasumbernya darimana, jelas data/pernyataan tersebut didapat repoter dari siapa.”

- Dewanto Samodro, M. I. Kom
(Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta).

Catatan lain yang menjadi fokus informan adalah verifikasi sumber berita. Tugas utama seorang jurnalis adalah mencari, mendapatkan informasi tentang peristiwa tersebut dan menyajikannya kepada masyarakat. Namun, terbatasnya ruang dan waktu menjadi permasalahan yang mungkin bagi jurnalis. Seorang jurnalis tidak mungkin dapat berada pada semua tempat di mana peristiwa terjadi di sepanjang waktu. Sehingga jurnalis memerlukan orang lain sebagai sumber yang dapat memberikan informasi terkait peristiwa yang sedang atau telah terjadi.

Pada praktiknya, verifikasi sumber berita masih menjadi permasalahan beberapa media Indonesia dan menjadi masukan bagi Komisi Penyiaran Indonesia untuk memperbaiki regulasi serta mengingatkan media untuk memperhatikan pencantuman sumber berita.

Informan menemukan bahwa banyak berita asing yang ditayangkan beberapa media di Indonesia tanpa menyebutkan sumbernya. Padahal penyebutan sumber berita menyiratkan adanya keakuratan. Menyebutkan sumber berita menjadi syarat untuk menyatakan bahwa berita tidak berasal dari media yang bersangkutan.

Selain hal itu, keterbatasan waktu yang dimiliki jurnalis di era massifnya informasi dan di mana kecepatan sangat dijunjung tinggi, penggunaan sumber dari sosial media atau sumber lain menjadi lebih marak. Beberapa Informan pada riset indeks kualitas penyiaran TV mengeluhkan terkait hal ini, di mana sumber-sumber pemberitaan media berasal dari sosial media bahkan video warga yang dicantumkan tanpa keterangan.

“Khususnya Net TV ada segmen khusus yang terjadi di viralnesia. Viralnesia ini mereka hanya mencomot video dari masyarakat. Saya tidak tahu apakah ini bagian dari citizen journalism? tapi itu sudah terlanjur dipublish di televisi. Ketika mereka tampilkan itu, tidak ada sama sekali konfirmasi narasumber, Cuma ada berita aja. .. Tayangan itu harus betul-betul diverifikasi oleh teman – teman media sebelum dipublish. Karena itu dibutuhkan tim redaksi yang kompeten yang bisa memastikan bahwa tayangan itu layak untuk di publik”

-Said Lestahulu, S.Sos., M.Si
(Universitas Pattimura).

Pencantuman akun sosial media dari seseorang sebagai sumber berita tetap dapat dikatakan sebagai sebuah fakta. Bukan pula menjadi masalah jika jurnalis menggunakan sosial media sebagai sumber beritanya. Namun, perspektif kebenarannya perlu dipertanyakan.

Di titik inilah jurnalis perlu untuk diberikan pemahaman terkait pentingnya memilih sumber-sumber berita yang kredibel. Sebagai pilihan, jurnalis dapat memilih sumber berita dari akun sosial media yang dipercaya kredibilitasnya sebagai sumber untuk menghindari hoaks atau kemungkinan kebohongan jika memiliki keterbatasan waktu dalam menyajikan berita yang menuntut informasi dari sumber.

Dalam hal ini, jurnalis memang harus berurusan dengan fakta yang dapat dipercaya, sehingga menjadi penting bahwa sumber yang digunakan untuk menulis berita dapat memberi informasi yang akurat tentang apa yang terjadi. Tetapi seperti halnya ada banyak peristiwa berita yang berbeda, demikian pula ada banyak sumber informasi yang berbeda. Beberapa sumber akan memberi informasi yang sangat akurat sehingga disebut sebagai sumber yang kredibel. Yang lain kurang dapat diandalkan, tetapi mungkin masih berguna, sementara beberapa sumber lainnya hampir tidak dapat dipercaya sama sekali. Oleh sebab itu, jurnalis dituntut untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi serta mencari dari berbagai sumber untuk melihat keakuratan pemberitaan peristiwa.

Potret Permasalahan Faktualitas Dalam Tayangan Berita Televisi Di Indonesia

Membicarakan dan mempertanyakan fakta dalam berita televisi mungkin tidak sepanjang perdebatan akan fakta di media cetak atau pun media lainnya. Hal ini dikarenakan basis sumber dari televisi adalah audio visual, gambar dan suara. Media televisi adalah media yang berbasis pada suara dan gambar di mana fakta gambar dapat dikonsumsi langsung oleh audiens atau khalayaknya. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah penggunaan video dan atau gambar pada suatu pemberitaan yang konteksnya berbeda. Tantangannya kemudian adalah terjadinya tren penggunaan video yang berasal bukan dari kerja jurnalis di media, namun berasal dari akun media sosial atau bersumber dari internet.

Kerap kali dapat ditemukan sebuah pemberitaan dengan menggunakan gambar yang diambil secara amatir (bukan dilakukan oleh jurnalis/ juru kamera yang terlatih) bahkan sering ditemui pemberitaan dengan gambar video yang berasal dari kamera pengamanan (cctv).

Kini, telah menjadi tren isu atau agenda yang naik dalam pemberitaan di televisi adalah yang telah viral atau ramai diperbincangkan di media sosial. Ironisnya bukan hanya isu yang berdasarkan apa yang telah ramai diperbincangkan, bahkan video atau foto yang digunakan dalam pemberitaan diambil langsung dari akun media sosial seseorang yang telah menjadi viral atau fyp (for your page) atau trending topics. Hal ini kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah media televisi telah meminta izin atas penggunaan video yang diambil dari akun media sosial atau diketahui oleh akun tersebut. Proses ini menjadi penting, dikarenakan isu yang viral atau trending topics perlu diverifikasi kebenarannya. Maka dengan menghubungi pemilik konten yang pertama kali menyebarkannya, maka jurnalis akan dapat melakukan verifikasi, seperti di mana terjadi, kapan terjadi, kenapa bisa terjadi, bagaimana kejadiannya. Media televisi kerap kali juga tidak menyertakan nama akun yang menyebarkan informasi tersebut, padahal hal ini penting sebagai etika jurnalistik untuk menyebutkan sumber dan narasumber. Berikut adalah salah satu pemberitaan yang diangkat dari informasi yang viral atau topik yang diperbincangkan.

Gambar 3. Berita yang Diangkat dari Informasi Viral di Media Sosial



Sumber: NET TV, 2021.

Verifikasi atas isu dan informasi yang viral/ diperbincangkan/ trending topics adalah sebuah keharusan. Media televisi diharapkan sebagai wadah kerja jurnalistik tetap berpegang pada elemen jurnalisme. Kovach and Rosensteil menegaskan elemen jurnalisme salah satunya adalah disiplin dalam verifikasi. Maka melakukan verifikasi adalah kewajiban utama dalam kerja jurnalistik sebelum informasi tersebut disebarakan oleh media televisi itu sendiri.

“Kok hampir semua televisi itu menayangkan konten media social, video amatir lagi. ANTV lebih kacau, sampai ada konten youtube ditayangkan. Lucunya ada satu kalimat yang “belum bisa dipastikan peristiwa ini benar/tidak” tapi kenapa bisa ini jadi berita”

- Dr. Fakhur Rozi, M.I.Kom
(Universitas Sumatera Utara)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa apabila sumber pemberitaan berasal dari media sosial maka terkadang faktualitas dari video tersebut yang dipertanyakan. Media televisi juga diharapkan telah melakukan verifikasi informasi yang diterima media sebelum ditayangkan. Media diharapkan tidak menjadi alat penyebar informasi yang masih sumir namun media adalah wadah untuk mengetahui bagaimana kebenaran yang terjadi atau bagaimana fakta yang sebenarnya.

Salah satu contoh pemberitaan yang diangkat dari media sosial dikarenakan informasi tersebut viral adalah mengenai berita sumur ajaib yang dipercaya mampu menyembuhkan semua penyakit dengan air “ajaib”nya.

Gambar 4. Berita yang Diangkat dari Informasi Viral di Media Sosial



Sumber: ANTV, 2022.

Pada pemberitaan di atas, fakta yang disampaikan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ironisnya media kemudian mengangkatnya menjadi berita di televisi. Hal ini tentu saja akan membawa dampak terhadap pemahaman dan kepercayaan audiens atau khalayak terhadap media itu sendiri. Jurnalisme yang baik tentu saja tidak sepatasnya memberitakan informasi yang masih sumir. Ironisnya, tayangan berita televisi di Indonesia juga kerap kali memiliki permasalahan click bait seperti berita-berita di media online. Masih ditemui adanya judul-judul berita yang ternyata tidak sesuai dengan isi pemberitaan.

“Seperti NetTV judul kok bisa rumput tetangga bikin panas, memangnya ini infotainment”

- Nengah Muliarta
(Universitas Warmadewa Bali)

Dengan mengangkat fakta dari media sosial, kamera amatir dan internet tentu saja membawa permasalahan faktualitas sendiri. Permasalahan atau hal yang perlu diperhatikan di antaranya kesahihan video, baik sumber, waktu, kejadian, hingga narasi di dalamnya serta secara kualitas visual tayangan akan tidak cukup baik untuk kualitas media televisi. Televisi tentu saja memiliki standar khusus dan tersendiri untuk kualitas tayangan, dengan tren penggunaan video dari video amatir, cctv, atau media sosial makan kualitas tayangan pun menurun. Dikhawatirkan maka standar televisi menjadi cukup rendah dalam hal kualitas visual.

Permasalahan visual juga muncul pada kurangnya kreatifitas pengambilan gambar untuk tayangan berita televisi. Fakta sendiri dapat ditentukan dalam tiga aspek yang berbeda yakni aspek peristiwa, pentingnya konfirmasi dan artefak gambar visual dari tayangan berita itu sendiri. Dimensi permasalahan yang hadir akan artefak ini adalah adanya duplikasi narasi dan duplikasi visual yang kerap dijumpai di layar kaca televisi walau berbeda media.

“Dalam aspek peristiwa ya visualnya adalah kejadian itu sendiri tampil secara visual. Kemudian konfirmasi harus selalu ada narasumber atau pihak yang diwawancarai untuk menjustifikasi bahwa itu benar terjadi. Yang jarang dilakukan oleh stasiun televisi adalah artefak berita itu sendiri sehingga mereka mungkin lack of creativity, dari mana kamera itu harus merekam.”

- A.A.I Prihandari Satvikadewi, M.Med.Kom
(Universitas Negeri Surabaya)

Gambar 5. Berita yang Diangkat dari Informasi Viral di Media Sosial



Sumber: TV ONE, 2021.

Duplikasi visual dan isi narasi ini kerap kali terjadi pada berita-berita yang berasal dari daerah. Seringkali disaksikan bagaimana video visual dari sebuah peristiwa tampil dengan angle/ sudut pengambilan gambar yang sama padahal berita tersebut hadir di saluran televisi yang berbeda. Minimnya jurnalis di daerah menyebabkan seorang jurnalis di daerah kerap kali mewakili beberapa televisi. Jurnalis televisi di daerah sebagian besar adalah kontributor berita di beberapa televisi. Hal ini yang menyebabkan duplikasi gambar atau video tayangan berita dari beberapa tayangan berita di berbagai saluran televisi. Informan ahli KPI juga menilai masih kurangnya kreatifitas teknik pengambilan video oleh juru kamera di televisi. Catatan lain terkait dengan teknik pengambilan gambar adalah kerap kali tersajikan gambar yang kurang etis atau beradab. Dalam penyajian gambar di televisi terdapat beragam cara untuk menampilkannya dengan cara-cara yang lebih etis. Terdapat banyak cara dalam menyajikan berita secara faktual tanpa mengurangi validitasnya tetapi fakta tersaji dengan layar yang lebih beradab dan etis. Ini membutuhkan daya kreatifitas dari jurnalis, juru kamera, dan editor.

*“Cara menyajikan fakta dengan etis.
Banyak cara menyajikan berita secara factual
tanpa mengurangi aspek validitas, tapi di layar
visualnya lebih beradab”*

- A.A.I Prihandari Satvikadewi, M.Med.Kom
(Universitas Negeri Surabaya)

Permasalahan fakta yang muncul dalam tayangan berita televisi di Indonesia adalah adanya pemilihan fakta yang tertayangkan di televisi. Fakta yang muncul hanyalah fakta-fakta yang terpilih dengan nilai berita minim. Fakta ini muncul dikarenakan stasiun televisi yang menayangkan berafiliasi dengan partai politik. Ironisnya informasi mengenai kegiatan partai baik sosialisasi atau apapun tidak hanya muncul dalam pemberitaan saja namun juga muncul dalam teks berjalan atau running teks. Jadi apa yang terlihat memang adalah fakta, namun tayangan disinyalir memiliki kepentingan politik dan merupakan perpanjangan dari kepentingan partai serta pemilik modal.

Gambar 6. Berita Pameran UMKM di Rakernas NasDem 2022



Sumber: Metro TV, 2022.

Gambar 7. Berita Bakti Sosial MNC Peduli



Sumber: RCTI, 2022.

Gambar di atas adalah beberapa contoh bagaimana tayangan berita di televisi berisikan fakta terpilih saja yakni fakta mengenai kegiatan salah satu partai saja. Dalam teori Framing, media memiliki kekuatan untuk menentukan seleksi isu atau fakta dan bagaimana aspek yang akan ditonjolkan. Maka media di Indonesia dalam tayangan beritanya juga kerap melakukan seleksi isu sesuai dengan kepentingan mereka khususnya terlihat pada kepentingan partai politik yang terafiliasi dengan stasiun televisi. Selain tayangan berita kegiatan partai, penentuan narasumber dalam berbagai isu terlihat terkadang memilih narasumber yang berasal dari partai politik yang berafiliasi dengan stasiun media televisi tersebut.

“Sumber berita dari luar/TV luar juga harus diverifikasi MNC Group itu hampir semua ada kampanye Partai Perindo”.

- Dr. Aceng Abdullah
(Universitas Padjajaran)

Hal ini tentu saja menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat audiens televisi Indonesia terhadap keberimbangan dan objektivitas dalam pemberitaan tayangan televisi di Indonesia. Bagaimana potret keberimbangan dan aspek dimensi lainnya terpaparkan pada sub bab-sub bab berikutnya.

B. Keberimbangan dan Keberagaman Berita

Keberimbangan dan keberagaman berita merupakan dua konsep yang berbeda dalam pemberitaan. Menurut kode etik jurnalistik yang dikeluarkan IJTI, jurnalis televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang dengan mempertimbangkan hati Nurani.

Keberimbangan berarti jurnalis tidak memihak pada suatu masalah yang sedang disengketakan. Keberimbangan juga mencakup penyajian semua sisi argumen secara adil.

Bahkan jika jurnalis secara pribadi memihak pada suatu masalah, jurnalis tidak boleh menggunakan berita untuk meletakkan argumennya sendiri. Jurnalis tidak boleh mencoba memberikan waktu tambahan atau porsi yang lebih banyak kepada pihak yang disetujui dan lebih sedikit porsi kepada mereka yang tidak disetujui.

Bagi jurnalis yang baik, objektivitas dan keberimbangan adalah dua sisi mata uang yang sama. Jika jurnalis dapat bersikap objektif maka jurnalis juga dapat bersikap adil dalam memperlakukan semua pihak. (Henshall & Ingram, 1991)

Menjadi objektif hanyalah bagian dari pertempuran melawan bias. Bagian lain melibatkan pengakuan ketika satu pihak dalam perselisihan menerapkan tekanan yang tidak adil untuk mendapatkan kasus mereka dalam berita (atau pihak lain tidak mendapatkan bagian yang adil dari liputan). Hal ini bisa menjadi jelas dan mudah untuk dikoreksi, atau lebih halus dan lebih sulit untuk diperbaiki.

Keberagaman berbeda dengan keberimbangan. Mengacu pada pertimbangan Undang-Undang Penyiaran, bahwa penyiaran yang demokratis ada untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka keberimbangan yang dimaksud adalah adanya diversitas baik isu atau informasi yang ada di seluruh Indonesia mendapatkan porsi dan tempat yang sama di televisi-televisi di Indonesia. Keberimbangan dan keberagaman lainnya adalah adanya diversitas perspektif dan pandangan perwakilan Bangsa Indonesia pada isu-isu nasional.

Kasus yang dapat dijadikan contoh adalah kasus terlambat naiknya pemberitaan terkait banjir besar yang terjadi di Kalimantan pada tahun 2021.

Banjir besar yang terjadi di beberapa tempat di Kalimantan, baru menjadi isu nasional dan tayang dalam berita televisi beberapa hari setelahnya. Hal ini mencerminkan betapa isu dan kejadian di daerah di luar Pulau Jawa kadang tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti yang terjadi di Pulau Jawa.

Gambar 8. Berita Banjir Besar di Kalimantan Selatan



Potret Kualitas Program Berita di Televisi di Indonesia

Gambar 9. Berita Banjir Besar di Kalimantan Barat



Sumber: CNN Indonesia, 2021.

Gambar 10. Berita Banjir Besar di Kalimantan Tengah



Sumber: TV ONE, 2021.

Kasus banjir yang terlambat mendapat tempat di stasiun televisi, mencerminkan keberagaman dan keberimbangan masih menjadi permasalahan yang tidak tuntas dalam potret tayangan berita televisi di Indonesia. Terlambatnya berita banjir ini telah

Keberagaman dan keberimbangan juga dapat dinilai dalam terpenuhinya prinsip berita yakni *cover both sides*. Nasution menjelaskan prinsip etika jurnalisisme adalah;

- (1) Akurasi
- (2) Independensi
- (3) Objektivitas
- (4) Balance
- (5) Fairness
- (6) Imparsialitas
- (7) Menghormati Privasi
- (8) Akuntabilitas pada publik

Maka *balance and fairness* menjadi prinsip etika yang perlu terpenuhi dalam menjaga kualitas tayangan berita di televisi di Indonesia. Hal ini juga terkait pada prinsip atau elemen keenam jurnalisisme yakni jurnalisisme harus menghadirkan sebuah forum untuk kritik dan komentar publik, prinsip ini juga sejalan bahwa jurnalisisme adalah wadah bersuara bagi mereka yang selama ini tidak memiliki wadah untuk bersuara (*voice of the voiceless*). Walau kini hadir beragam wadah alternatif yang kuat untuk bersuara seperti media sosial, namun hal ini juga berimplikasi pada bertambahnya kecepatan dan kekuatannya dalam memutarbalikkan, menyesatkan dan mengalahkan fungsi lain dari jurnalistik itu

sendiri. Dengan terpenuhinya keberagaman maka jurnalisme telah menyediakan wadah khalayak berdialog/ forum/ kompromi publik bahkan kritik sekali pun. Namun media dalam hal ini stasiun televisi diharapkan tidak menyimpulkan namun memberikan kesempatan dan wadah forum publik dalam berdialog menyertakan kesepakatan dalam berbagai hal. Dialog yang terjadi dengan kesepakatan yang dipercaya oleh audiens akan menjadi alternatif dari permasalahan yang ada. Saat tayangan berita menyiarkan berbagai pandangan dan opini hal ini mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dan masyarakat Indonesia.

Potret Keberimbangan dan Keberagaman Berita TV Indonesia

Hasil analisis informan dari tahun 2020-2022 menemukan bahwa penyajian berita yang tidak cover both side atau memenuhi aspek keberimbangan masih terletak pada berita-berita kriminal. Pada beberapa pemberitaan kriminal, jurnalis tidak boleh kita hanya merujuk pada kesaksian atau apa yang disampaikan oleh informan dari pihak kepolisian saja. Beberapa pemberitaan tampak kurang memberi kesempatan kepada pihak saksi atau bahkan terduga pelaku kriminal untuk memberikan argumen.

“Saya juga menemukan berita tentang teroris pada umumnya juga tidak cover both side. Contohnya FPI dibayar oleh Munarman, pihak FPI tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan.”

- Muliadi Mau

(Universitas Hasanuddin) dalam Riset Indeks Program Siaran TV tahun 2020

Pemberian kesempatan yang tidak berimbang pada korban dan pelaku kejahatan dalam berita kriminal kemungkinan besar juga bukan sepenuhnya kesalahan media. Hal ini dapat terjadi jika pihak berwenang pada kasus kriminal (misalnya kepolisian) tidak memberikan kesempatan bagi wartawan untuk mewawancarai pelaku kejahatan.

“Rata-rata wartawan hanya memberi kesempatan pada kepolisian sementara tersangkanya tidak diberi kesempatan. (Ada) yang saya kasih penilaian 3 karena wartawannya tidak wawancara pelaku. Tidak memberi kesempatan pada pelaku. Misalnya dikatakan ‘Raja Begal’, tetapi kita tidak bertanya pada ‘Raja Begal’ untuk memberikan pembelaan. Tapi, boleh jadi ini bukan kesalahannya media tetapi polisi yang tidak memberikan kepada media untuk wawancara pelaku. Pelaku mungkin sudah di sel. Bisa jadi pihak kepolisian tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan klarifikasi,”

- Judhariksawan (Universitas Hasanuddin)
dalam Riset Indeks Program Siaran TV tahun 2021)

Para informan Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV yang menganalisis tayangan berita TV pada sampel tahun 2022 mengemukakan bahwa aspek keberimbangan berita masih kurang terlihat pada beberapa tayangan berita sampel tahun 2022 terutama berita dengan isu konflik, politik dan kriminal.

“Dari semua tayangan berita yang saya analisis, kebanyakan berita terutama berita konflik yang kebanyakan kurang berimbang karena hanya menampilkan pernyataan dari salah satu pihak saja. Contoh pencemaran nama baik Menteri Luhut, TV hanya memberikan prosesnya saja tetapi tidak menyampaikan pernyataan Menteri Luhut. Jadi kasusnya sudah berkembang tapi berita di TV hanya menampilkan prosesnya saja. Kemudian pernyataannya hanya dari Haris Azhar & Fathia. Tidak mengambil pernyataan dari Menteri Luhut. Menurut saya itu menjadi kurang berimbang”.-

Dewanto Samodro, M. I. Kom
(Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta)

Kurangnya aspek keberimbangan menurut informan paling banyak ditemukan pada berita terkait kasus-kasus hukum dan kriminal. Hal ini kemungkinan terjadi karena isu-isu tersebutlah yang paling sering menjadi highlight dalam pemberitaan media.

“Saya cenderung melihatnya di berita-berita kriminal, ini memang terlalu banyak yang dari 1 narasumber. Karena punya pengalaman sebagai wartawan, kita memang kadang-kadang kesulitan mewawancarai tersangka. Tetapi opsi lainnya kan ada, ada pengacara dan penegak hukum, jadi mungkin KPI bisa menolong kearah sana. Yang kedua soal keberimbangan, tentang MNC yang hanya menayangkan kegiatan Perindo atau kegiatan MNC Peduli & Metro TV yang banyak mewawancara anggota DPR dari Partai Nasdem saja. Menurut saya itu salah satu factor keberimbangan juga ya, karena ada di salah satu TV, ada tayangan tentang Ganjar dan ada juga tayangan tentang Anies. Artinya itu mungkin sudah berimbang ya, karena mungkin dua itu yang lagi naik daun. Mungkin itu pandangan saya tentang keberimbangan.”

- Dr. Fakhur Rozi, M.I.Kom
(Universitas Sumatera Utara)

“...Dari sisi media, apa yang dilakukan ya pertama tujuannya adalah rating, yang kedua mungkin mereka tidak berpikir proposional, tetapi mana yang baru viral, itu yang ditayangkan. Akhirnya ya tidak proposional, banyak kriminal, kecelakaan. Bahkan kriminal selalu dijadikan highlight karena kekhawatiran media ditinggalkan oleh khalayak.”

- Dr. Tomi Oktavianor, M.Si
(Universitas Lambung Mangkurat)

Apa yang dapat terjadi ketika media tidak berimbang dalam pemberitaan?. Judharikswan dalam analisisnya pada tayangan berita sampel tahun 2021 menyatakan bahwa ketidakberimbangan media dapat menciptakan opini publik yang keliru.

“Contoh yang paling menyolok adalah pemberitaan demonstrasi mahasiswa terkait dengan dugaan penggunaan rumah sakit. Yang diliput hanya demonstrasinya saja. Yang diliput hanya dugaan mahasiswa saja. Itu bisa membentuk karakter – melanggar presumption of innocence – membentuk opini publik bahwa si rumah sakit ini memang melanggar. Padahal sesungguhnya ada mekanisme-mekanisme yang telah dilakukan oleh rumah sakit di dalam penggunaan anggaran. Tentu saja, mereka tidak bisa menggunakan anggaran begitu saja, dan pertanggungjawabannya juga harus jelas. Kalau ada dugaan dari mahasiswa sampai demonstrasi, terus kemudian berita meliputnya, itu meng-amplify sebuah dugaan, sebuah tuduhan yang tidak terkonfirmasi kebenarannya, karena tidak ada wawancara atau informasi atau kejelasan dari pihak rumah sakit atau yang mengawasi penggunaan anggaran COVID itu. Itu menjadi sesuatu yang penting untuk diingatkan kepada teman-teman jurnalis,”

- Judhariksawan

(Universitas Hasanuddin) dalam Riset
Indeks Program Siaran TV tahun 2021

Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak tidak hanya berbicara mengenai aspek keberimbangan

tetapi juga keberagaman. Bagaimana media mbingkai pemberitaan secara lebih luas sehingga isu yang diangkat tidak hanya condong mengarah pada jawasentris serta mengurangi porsi pemberitaan luar jawa.

“Saya menambahkan sedikit, soal keberpihakan kalau memang berita-berita itu focus pada Pulau Jawa. Padahal tokoh-tokoh diluar Jawa juga banyak, tetapi tidak mendapat porsi” –

- Dr. Netty Herawaty, M.Si
(Universitas Tanjungpura).

Keberimbangan dan keberagaman tidak dapat melupakan akurasi yang diartikan bahwa berita jurnalistik yang ditayangkan di televisi mengandung kebenaran, fakta dan penulisan berasal; dari sumber informasi yang kompeten dan tidak bias, dan berdasarkan pada bukti yang solid. Fakta yang akurat adalah syarat utama dari akurasi berita. Akurasi adalah faktor utama dan signifikan dalam menentukan reputasi sebuah media. Faktor yang dapat mempengaruhi akurasi adalah dengan kesahihan sumber dan narasumber. Kesahihan narasumber dan sumber akan berpengaruh pada tingkat kredibilitas media di mata audiens. Hal ini berlaku sebaliknya, apabila keakuratan tidak ada, maka media akan kehilangan kredibilitas di mata khalayaknya. Hal ini menjadi tugas besar di mana yang terjadi adalah tingkat kepercayaan terhadap media kian menurun, maka menjadi

penting mengupas bagaimana kualitas keberimbangan dan keberagaman tayangan berita televisi di Indonesia selama ini.

Permasalahan Keberimbangan Dalam Tayangan Berita Televisi Di Indonesia

Dimensi keberimbangan ini masih menyimpan banyak permasalahan, Informan ahli menilai keberimbangan sangat terasa hilang pada berita-berita hukum dan kriminalitas.

Gambar 11. Berita Kriminalitas yang Lebih Banyak Menampilkan Lembaga Kepolisian



Sumber: NET TV, 2022.

Keberimbangan namun tidak dapat dianggap sebagai proporsional belaka. Berita yang berimbang bukan berarti berita yang memberikan porsi durasi yang sama pada dua atau berbagai pihak yang terlibat dalam pemberitaan saja, namun juga diharapkan juga pada urgensi dan substansi materi.

“Tidak harus masing-masing sumber sama-sama 10 detik tapi justru tidak berimbang malah mengacaukan substansi berita itu secara keseluruhan. Yang perlu ditekankan kepada produsen berita adalah sense of urgencynya”.

- A.A.I Prihandari Satvikadewi, M.Med.Kom
(Universitas Negeri Surabaya)

Permasalahan lainnya adalah samurnya voice dari the voiceless. Pemberitaan diharapkan menjadi wadah voice of the voiceless, di mana layar menampilkan mereka yang selama ini tidak mendapatkan wadah untuk bersuara dan beropini, khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan atau menjadi korban. Namun yang terjadi adalah mereka yang tampil di layar adalah bukan rakyat yang terlibat pada suatu kasus tetapi lembaga yang mengatakan mewakili rakyat yang terlibat kasus atau terpinggirkan. Secara umum, sah saja apabila sang rakyat diwakili, namun sebenarnya yang ingin didengar adalah rakyatnya secara langsung bukan perwakilannya walau menyuarakan suara yang sama.

“Seperti wadas, hanya kelompok masyarakat sipil yang melindungi wadas semua diwawancara, tetapi warganya tidak”

- Dewanto Samodro, M. I. Kom
(Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta)

Hal ini menjadi sebuah catatan dikarenakan berita televisi sepatutnya menjadi wadah mereka yang selama ini tidak bersuara dengan menampilkan mereka, sehingga audiens atau khalayak dapat merasakan, mendengar dan melihat langsung apa yang terjadi dari mereka yang mengalami. Hal ini juga menghindari adanya informasi yang berbeda dengan yang disampaikan perwakilan mereka.

Pada aspek ini muatan politik kembali menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan karena disinyalir muatan politis akan menghilangkan keberimbangan.

“Soal keberimbangan, tentang MNC yang hanya menayangkan kegiatan Perindo atau kegiatan MNC Peduli & Metro TV yg banyak mewawancarai anggota DPR dari Partai Nasdem saja.”

- Dr. Fakhur Rozi, M.I.Kom
(Universitas Sumatera Utara)

Muliartha dari Warmadewa Bali mencatatkan bahwa bagaimana melihat keberimbangan dengan menelaah apakah ada kelompok yang diuntungkan dari pemberitaan tersebut atau tidak. Ketidakberimbangan memiliki kecenderungan bahwa berita tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

“Keberimbangan dapat dilihat dari apakah ada kelompok yang diuntungkan, Keberimbangan berita televisi berbeda dengan keberimbangan cetak yang horizontal”

- Nengah Muliarta,
Warmadewa Bali

Muliarta juga menambahkan bahwa, keberimbangan tidak hanya dapat dihitung secara kuantitatif seperti durasi yang sama atau frekuensi yang sama antar beberapa pihak yang terlibat. Keberimbangan di media cetak dapat dilihat dengan keberimbangan yang horizontal, sedangkan media televisi tidak bisa dibandingkan seperti media cetak.

Permasalahan Keberagaman Dalam Tayangan Berita Televisi Di Indonesia

Bicara mengenai keberagaman di televisi di Indonesia, maka tidak terlepas dari ciri kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama dan ras. Sebagai penyiaran yang demokratis maka frekuensi penyiaran sebagai ranah milik Negara dan bangsa sudah sewajarnya memberikan wadah bagi seluruh bangsa Indonesia. Setiap suku, agama dan ras di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk hadir di ruang-ruang televisi di Indonesia. Prinsip keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia dalam penyiaran yang demokratis adalah tidak adanya diskriminasi atas sebuah kelompok/golongan, dan semua kelompok/golongan memiliki kesempatan yang sama. Dalam hal

ini maka kelompok/golongan yang beragam di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang sama. Alasan lain dari keberagaman di layar kaca adalah media massa tidak lain merupakan cermin dari masyarakat Indonesia. Maka citra kemajemukan bangsa Indonesia sebaiknya tercermin dalam layar-layar kaca televisi di Indonesia.

Dalam tayangan berita di televisi Indonesia, ternyata prinsip keberagaman ini belum sepenuhnya tuntas. Dalam pemberitaan masih terlihat adanya ketidakberagaman, baik dari isu atau topik pemberitaan hingga narasumber untuk sebuah pemberitaan. Untuk pemilihan narasumber, mereka yang tampil di layar kaca televisi di Indonesia masih didominasi oleh narasumber yang berasal dari Pulau Jawa. Hal ini tidak dapat terlepas dari isu pemberitaan yang memiliki kecenderungan untuk mengangkat kejadian atau berita yang terjadi di Pulau Jawa.

Informan ahli pada FGD 2022 mengatakan bahwa telah terjadi diskriminasi isu atau pemilihan sudut pemberitaan apabila berasal dari luar Pulau Jawa. Pemberitaan dari luar pulau Jawa biasanya hanya didominasi oleh berita-berita bencana alam, musibah, kriminalitas. Hal ini terjadi dikarenakan kecenderungan isu yang naik menjadi berita televisi adalah berita-berita yang sifatnya hardnews dengan kejadian yang cenderung negatif.

“Konsep dalam berita itu masih berjalan hingga sekarang, bad news is good business”

– Drs. Saryadi, M.Si
(Universitas Diponegoro)

Gambar 12. Berita Kriminalitas yang Terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara



Sumber: TV ONE, 2022.

Gambar di atas adalah salah satu contoh bagaimana berita yang berasal dari luar Pulau Jawa adalah berita yang mengandung kekerasan dan kriminalitas. Bila menonton berita di malam hari, maka dengan mudah ditemukan beragam berita mengenai kekerasan atau kriminalitas yang terjadi di luar Pulau Jawa. Bahkan informan ahli mengatakan tayangan berita televisi di malam hari penuh “darah” dari daerah. Tentu saja bukan keberagaman seperti ini yang diharapkan hadir di layar-layar televisi di Indonesia. Berita televisi lebih diharapkan menayangkan keberagaman berita baik dan inspiratif serta positif dari seluruh penjuru Indonesia.

Ada pun pemberitaan yang positif hanya berita-berita mengenai pariwisata, seperti lokasi wisata, tingkat wisatawan yang meningkat pada saat hari raya, atau wisata kuliner di daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Gambar 13. Berita Tingkat Wisatawan yang Berkunjung ke Bali



Sumber: Metro TV, 2021.

“Saya melihat fenomena seperti ini kalo di sini kebanyakan orang daerah tetapi yang muncul di daerah kebanyakan bencana dan musibah pokoknya penderitaan saja, adanya ketimpangan informasi. daerah bapak ibu tidak akan muncul ke televisi nasional kalo tidak masalah musibah kecuali masalah pariwisata”

- Dr. Aceng Abdullah
(Universitas Padjajaran)

Praktik seperti ini secara tidak langsung menurut Aceng Abdullah adalah bentuk penghinaan pada masyarakat di daerah. Di mana daerah hanya kemudian digambarkan sebagai tempat penuh bencana, kriminalitas hingga musibah saja. Bahkan yang dipahami orang di daerah adalah daerah mereka dilihat seperti ini di mata nasional.



Dr. Aceng Abdullah yang memakai kaca mata, saat menyampaikan pendapat dalam FGD Program Siaran Berita.

“Kami sebagai orang daerah hanya sebagai penonton yang dipertontonkan musibah-musibah, nah itu bagi kami tidak beradab bagi kami bagi saya pribadi sehingga jika memang temanya “mewujudkan peradaban baru” ini harus diubah. Bagi saya ini serius sebuah penjajahan bagi televisi nasional yang hanya menjual acara, rating tinggi yang menjual penderitaan daerah.”

- Dr. Aceng Abdullah
(Universitas Padjajaran)

Aceng Abdullah juga kembali menegaskan bahwa pemberitaan di berita televisi di Indonesia cenderung hanya menampilkan narasumber yang berasal dari Pulau Jawa padahal isu yang diangkat adalah isu nasional, yang di mana juga diperlukan mendengarkan pendapat dari ahli-ahli di daerah lain selain di Pulau Jawa. Ironisnya dalam catatan Aceng Abdullah, walau ahli atau narasumber daerah diwawancara itu pun hanya diangkat di siaran televisi-televisi lokal tidak naik di tingkat nasional. Bagi Aceng hal ini seperti mendiskriminasi para narasumber yang ada di daerah, padahal apabila menelaah lebih jauh mengenai kompetensi dan kedalaman pemikiran, narasumber ahli di daerah tidak kalah daripada narasumber yang berasal hanya di Jakarta atau dari Pulau Jawa. Jadi orang-orang yang memiliki kompetensi di daerah tidak diberikan kesempatan yang sama. Hal ini berdampak pada minimnya keberagaman narasumber di layar-layar televisi pada tayangan berita televisi di Indonesia.

“Saya lihat banyak orang-orang pintar dari daerah tidak diberi kesempatan kalo pun diberi kesempatan hanya itu hanya di televisi daerahnya. Saya sering di wawancara tapi hanya di INews jawa barat aja”

- Dr. Aceng Abdullah
(Universitas Padjajaran)

Catatan akhir dari permasalahan keberagaman adalah di mana ruang-ruang yang sepatutnya dapat dijadikan ruang untuk berita-berita yang berasal dari daerah, tetapi memilih untuk menaikkan berita yang bersifat lebih “menjual”, seperti berita menyangkut artis atau selebriti. Informan ahli menegaskan keberagaman ini perlu dijaga dan ruang-ruang bicara dan wadah ini harus selalu dijaga dan diprioritaskan. Dengan tidak diberikannya ruang untuk daerah namun lebih kepada untuk menjual maka stasiun televisi khususnya pemberitaan di televisi melupakan tugasnya sebagai institusi jurnalisme yakni mendahulukan kepentingan umum. Hal ini yang kemudian diingatkan bahwa televisi tidak dapat terlepas dari ragam kepentingan khususnya kepentingan ekonomi.

“Kredibilitas tv menurun karena terlalu disisipi banyak kepentingan”

- Dr. Netty Herawaty, M.Si
(Universitas Tanjungpura)

Memahami hal ini, maka tidak dapat dilupakan bahwa siaran televisi adalah bagian dari komunikasi massa, di mana salah satu peran dari komunikasi massa adalah ia sebagai lembaga ekonomi. Maka mencari keuntungan ekonomi adalah salah satu hal yang tidak dapat terlepas keberlangsungan hidup stasiun televisi di Indonesia dan dunia.

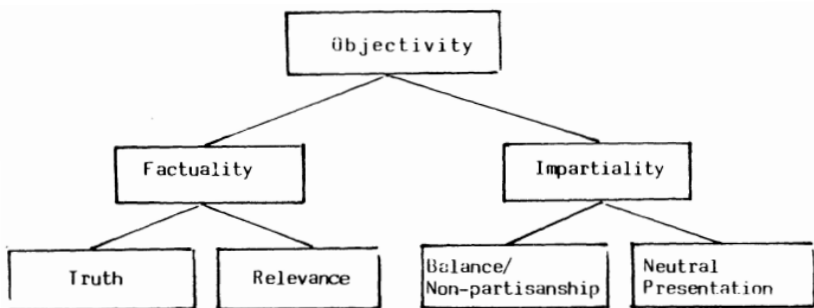
C. Obyektivitas dan Kepentingan (Publik) Dalam Tayangan Berita Televisi Di Indonesia

Objektivitas adalah prinsip dasar jurnalisisme yang membedakannya dari pelaporan fakta dan peristiwa sederhana. Bagi publik, kata “objektif” sering dikaitkan dengan kata “faktual” dan “benar”, meskipun dalam praktiknya, pemberitaan yang objektif dapat bersifat faktual dan benar sambil mendorong agenda politik atau menyuntikkan ide tertentu ke publik. kesadaran.

Seseorang juga bisa objektif dengan tidak mengatakan apa-apa, dan keheningan juga mengirimkan pesan, mungkin sarat dengan makna. Dengan menolak untuk meliput topik tertentu atau tidak meliput individu, jurnalis dapat memutuskan informasi apa yang tersedia untuk publik dan seberapa dalam, kemudian memengaruhi kemampuan audiens mereka untuk membuat keputusan yang rasional dan berbasis bukti.

Westerstahl secara kasar mendefinisikan objektivitas sebagai konglomerat kebenaran dan relevansi, yang bersama-sama membentuk elemen faktualitas, dan presentasi non-partisan dan netral, yang membentuk ketidakberpihakan. Elemen-elemen ini ada dalam proporsi yang berbeda-beda dalam setiap potongan berita; tidak ada formula atau rasio ajaib yang dapat memberi tahu Anda bahwa sebuah berita pasti dan secara empiris adalah objektif.

Skema konsep objektivitas Westerståhl



Memang, seperti yang dikatakan Westerståhl, objektivitas universal tidak ada sejak awal. Namun, meskipun Westerståhl tidak menganut gagasan tentang kebenaran dan objektivitas mutlak, ia berpendapat bahwa, secara paradoks, justru itulah yang membuat standar objektivitas begitu penting:

“Sangat penting untuk mengamati standar objektivitas karena satu alasan sederhana bahwa tidak ada satu objektivitas.”

“Apa yang mencerdaskan masyarakat dari berita seperti berita Nikita Willy melahirkan di Amerika? Tidak beda dengan infotainment. Kredibilitas tv menurun karena terlalu disisipi banyak kepentingan.”

“Bagus kemasannya, tapi memang terlihat masih seperti corong pemerintah, ya. Memang bagus untuk sosialisasi, karena apa yang

disampaikan untuk informasi masyarakat, tetapi jika tidak diperingatkan, itu bisa menjadi ajang kampanye.”

“Kepentingan politik itu tidak ada di P3SPS, mungkin kedepan bisa dicantumkan untuk menghadapi pemilu.”

“Berita-politik kalau kita lihat lebih dalam, ada pengamat-pengamat yang diundang oleh tv biru dan framingnya sudah mengubah pola pikir bukan arah yang baik.”

Di atas adalah beberapa pendapat mengenai konteks mengapa objektifitas adalah penting. Objektifitas juga terkait dengan terjaminnya kepentingan publik atau publik interest. Jangan dilupakan prinsip utama dari demokratisasi penyiaran adalah penyiaran yang adil dan memberikan wadah untuk kepentingan publik bukan hanya kepentingan sekelompok orang atau pribadi saja.

Terdapat beberapa makna dan konsep terkait kepentingan publik, yakni utilitarianism, unitary, dan common interest (Papathanassopoulos & Negrine, 2010, 8-9)

- (1) Utilitarianism (Majoritarian), kepentingan publik merujuk pada nilai-nilai dan preferensi individual. Negara dituntut mampu memaksimalkan keuntungan yang bersifat individual dengan merujuk pada suara mayoritas. Dalam konteks

pengaturan penyiaran, pemenuhan kepentingan publik dapat dilakukan dengan memberikan banyak kebebasan untuk kekuatan pasar media (Media Market Forces)

- (2) Unitary, kepentingan publik merujuk pada kewajiban moral kolektif yang melampaui kepentingan tertentu seperti halnya kepentingan bisnis. Pendekatan ini menempatkan kepentingan kolektif di atas individu. Di sini, kepentingan kolektif lebih besar atau ideal. Dalam konteks pengaturan penyiaran kepentingan publik ditentukan dengan mengacu pada beberapa nilai atau ideologi dominan.
- (3) Common interest, kepentingan publik merujuk pada aspek kebaikan bersama (common good) sebagai hal penting.

Kepentingan publik dalam penyiaran menurut Price and Raboy (dalam Iyer, 2006: 134) mengacu pada kesejahteraan umum seluruh masyarakat. Prinsip utama dalam penyiaran yang mengedepankan kepentingan publik adalah:

- (1) Harus dapat melayani masyarakat secara umum dengan melakukan tugasnya yang memberikan kontribusi terhadap manfaat yang lebih luas dan jangka waktu yang lebih lama bagi masyarakat secara keseluruhan
- (2) Program penyiaran seharusnya menyediakan dan memenuhi kepentingan dan selera keseluruhan populasi

- (3) Minoritas harus menerima perlakuan khusus dan tidak boleh diabaikan

Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan permasalahan objektivitas dalam tayangan berita di televisi. Hal ini dikarenakan banyaknya aspek yang mempengaruhi isi dari tayangan berita televisi di Indonesia. Shoemaker and Reese dalam bukunya mengklasifikasikan lima level yang memiliki pengaruh (hierarki pengaruh) terhadap isi pemberitaan media massa. Mulai dari lingkaran terkecil, pada level individu pelaku media; praktik rutinitas; organisasi media; institusi sosial; hingga yang terakhir, sistem sosial. Masing-masing lingkaran tersebut menurut Shoemaker dan Reese memiliki karakter yang berbeda namun keseluruhannya membentuk sistem yang tak dipisahkan satu sama lain.

Pada level individu, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana media menampilkan isinya dan bagaimana mempengaruhi mekanisme sebuah berita tertayangkan. Disebutkan bahwa perspektif politik adalah yang paling besar pengaruhnya. Namun variabel yang lain tidak dapat dilupakan seperti latar belakang dan karakter dari individu media seperti gender, etnis, orientasi seksual, latar belakang ekonomi, pendidikan hingga kelas sosial. Variabel lainnya dalam level individu adalah nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh individu media seperti orientasi religi, agama, sikap politik. Shoemaker and Reese juga menekankan individu media berada dalam dua kutub di mana mereka dihadapkan pada pilihan untuk netral atau sebagai partisipan dalam sebuah peristiwa. Partisipan tidak berkonotasi negatif, individu media yang partisipan dalam

menghadapi sebuah peristiwa akan melakukan verifikasi serta melakukan pendalaman atas fakta. Jadi individu media tidak hanya akan berada sebagai 'perantara' seperti halnya memilih netral. Netral dalam pandangan Shoemaker dan Reese adalah individu yang menghindari peristiwa dengan konten yang belum terverifikasi sehingga hanya menjadi transmisi pesan saja (Shoemaker dan Reese: 230-231). Hal yang menjadi catatan adalah esensi jurnalisme dalam membingkai kepercayaan melalui bagaimana jurnalis memproduksi berita.

Pada level kedua, faktor yang mempengaruhi isi media adalah rutinitas media. Rutinitas media terbentuk oleh tiga unsur, yakni sumber berita, organisasi media dan audiens. Rutinitas ini merupakan media merupakan dialog ketiga antar ketiga unsur di atas. Hal yang tidak terlupakan adalah media dalam komunikasi massa adalah lembaga ekonomi. Pada level rutinitas media, maka media massa termasuk lembaga penyiaran memiliki kepentingan dalam mencari keuntungan untuk keberlangsungan media. Pada level ini tidak dapat terlupakan bahwa media tidak tumbuh di ruang kosong, media berdialog dengan lingkungannya. Dialog ini kemudian melahirkan rutinitas media di mana terjadi proses adaptasi apabila berhadapan dengan berbagai kendala. Rutinitas ini pula yang mengoptimalkan hubungan antara organisasi media dan lingkungannya.

Level berikutnya adalah organisasi media. Organisasi pada umumnya berada pada posisi paling dominan dalam proses penayangan isi media termasuk penayangan berita. Dua level sebelumnya yakni individu media dan organisasi

media cenderung berada di posisi subordinat atas level organisasi. Mereka terikat pada struktur dan kebijakan dari organisasi atau institusi. Tentu saja pemegang kuasa tertinggi dari organisasi media adalah pemilik media, yang dapat dimiliki oleh perseorangan atau korporasi. Beberapa kuasa organisasi atas ruang redaksi media di antaranya perekrutan pekerja media, penentuan posisi individu pada organisasi media yang kemudian dipercaya dalam posisi strategis penentuan isi/konten berita. Untuk itu kerap kali terjadi yang Shoemaker dan Reese katakan sebagai praktik 'swa-sensor', atau telah terjadi sensor atau pemotongan fakta yang dilakukan oleh individu media. Keadaan ini maka objektivitas dan pengutamakan kepentingan publik akan menjadi perhatian khusus. Padahal independensi adalah nilai yang harus dimiliki jurnalis dan para pekerja media.

“Semua media televisi terutama yang swasta itu mempertimbangkan bisnis. Sehingga berusaha mencuri atau merebut pemirsa. Biasanya berita hardnews selalu menjadi berita utama. Stasiun televisi akan mencari berita yang menarik bagi masyarakat umum, karena segmen pemirsa itu banyak. Media ya tetap bisnis, kalau televisi swasta tidak ada iklan ya mati. Maka konsep dalam berita itu masih berjalan hingga sekarang, bad news is good business”

- Drs. Saryadi, M.Si
(Universitas Diponegoro)

Level berikutnya, yakni level empat yakni institusi sosial. Institusi sosial dalam level ini adalah institusi yang berada di luar organisasi media. Seperti dikatakan sebelumnya media tidak tumbuh di ruang hampa/kosong, media tentu saja berhubungan dengan lembaga sosial lainnya. Lembaga ini tentu saja memiliki pengaruh terhadap bagaimana pemberitaan yang tampil di layar kaca. Hubungan organisasi dengan institusi sosial lainnya menampilkan media sebagai ruang terlembagakan secara umum dan dipengaruhi oleh institusi lain yang ada di lingkungannya baik institusi sosial, institusi ekonomi hingga institusi politik.

Pada level berikutnya, yakni level kelima adalah lingkaran terluar dari level hirarki pengaruh pada isi media, yakni sistem sosial. Shoemaker dan Reese menegaskan sistem sosial adalah struktur yang menghubungkan antara masyarakat secara umum dengan institusi media. Sistem sosial ini terkait dengan sistem ideologi, ekonomi, politik dan budaya. Keempat sistem ini bersifat luas dan makro.

Permasalahan Obyektifitas dan Kepentingan Dalam Tayangan Berita Di Televisi Indonesia

Obyektifitas dan masuknya kepentingan cukup terlihat pada beberapa bentuk dalam pemberitaan di televisi. Salah satunya adalah penggunaan kata-kata baik dalam judul maupun dalam narasi yang digunakan. Penggunaan kata dapat berpengaruh pada sentiment dari berita itu sendiri. Kata yang dimaksud dapat berupa kata-kata sifat yang disatukan dengan sebuah kejadian. Beberapa kata yang

kerap digunakan adalah ‘perempuan cantik’, ‘kendaraan mewah’, ‘janda’ atau contohnya penggunaan kata-kata yang terkesan mendramatisasi seperti ‘kecelakaan maut’ Berikut contoh pemberitaan dengan menggunakan kata-kata yang didramatisasi.

Gambar 14. Berita Kecelakaan yang Menggunakan Kata Sifat



Sumber: TV ONE, 2021.

Contoh lainnya adalah melakukan dramatisasi dengan menambahkan lagu latar atau suara efek tambahan. Bahkan penggunaan istilah-istilah untuk menggambarkan suatu peristiwa. Contohnya adalah penggunaan kata ‘adu banteng’ pada judul berita kecelakaan di bawah ini.

Gambar 15. Berita Kecelakaan dengan Kata-Kata yang Didramatisasi



Sumber: Kompas TV, 2021.

Penggunaan kata yang menimbulkan subjektifitas pemberitaan di antaranya penggunaan kata garong kepada mereka yang terduga melakukan penyelundupan minyak goreng.

Gambar 16. Berita dengan Penggunaan Kata yang Menimbulkan Subjektifitas



Sumber: Metro TV, 2022.

Gambar 17. Berita dengan Penggunaan Kata yang Menimbulkan Subjektifitas



Sumber: Metro TV, 2022.

Ironisnya, kerap juga ditemukan penggunaan kata yang ditempelkan dengan mereka yang diduga pelaku, padahal kasus atau peristiwa tersebut masih belum memiliki ketetapan hukum. Pemberitaan pun kerap kali seakan-akan melakukan penyimpulan sesuatu sendiri, walau ditemui dalam pemberitaan telah menggunakan kata ‘dugaan’, namun cara pembawaan narasi dan kalimat dalam narasi lebih menghakimi. Hal ini perlu diperhatikan karena penggunaan kata akan menggiring opini. Pemilihan penggunaan kata adalah bagian dari proses pumbingkai berita.

“Seorang tersangka koruptor yang sedang diperiksa KPK terus keluar dari kantor KPK, narasinya mengatakan tersangka tertunduk malu. Ini agak geli karena darimana wartawan tau tersangka itu malu apakah bisa diasosiasikan dalam sikap? Karena belum tentu koruptornya malu kan”.

- Prof. Dr. Judhariksawan, SH, MH
(Universitas Hasanudin)

Berdasarkan Pan dan Kosicki (1993), pumbingkai berita dilakukan melalui empat kategori yakni (a) syntactical structure (struktur sintaksis) atau bagaimana cara wartawan menyusun fakta dalam skema berita dengan terlihat pada headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan dan penutup; (b) script structure (struktur skrip) atau bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta melalui kelengkapan berita yang mengandung 5W1H (who, what,

where, when, why dan how); (c) thematic structure (struktur tematik) atau bagaimana cara wartawan menuliskan fakta melalui paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antarkalimat; dan (d) rhetorical structure atau bagaimana cara wartawan menekankan fakta melalui leksikon, grafis, dan metafora yang dapat diamati melalui kata, idiom, gambar/foto hingga grafik. Pemilihan kata termasuk ke dalam empat struktur ini secara umum, namun lebih khusus pada struktur tematik di mana terkait dengan bagaimana jurnalis menguraikan fakta dalam pemberitaannya. Pada struktur ini jurnalis harus memilih kata-kata yang tepat untuk menguraikan detail yang didapatkan. Struktur tematik terdiri atas ringkasan dan badan utama. Ringkasan biasanya diwakili oleh judul, lead atau penutup berita. Pemilihan kata kemudian disusun menjadi kalimat yang merujuk pada bagaimana berita tersebut tersampaikan. Perangkat pembingkai pada struktur tematik adalah dengan detail, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti dengan terlihat pada paragraph, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Penggunaan kata juga menjadi bagian dari pembingkai berita pada struktur retorik. Struktur retorik ini juga merujuk pada wacana berita yang cenderung menggembar-gemborkan faktualitasnya (Eriyanto, 2013)⁵. Tidak hanya pemilihan kata, bahkan penggunaan tanda baca memberikan kesan objektifitas dalam sebuah pemberitaan.

⁵ Eriyanto, 2013, Analisis Naratif, Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks berita Media. Jakarta: Kencana

"Saya hanya menambahkan yang tertinggal jadi tadi sudah dibahas tentang penulisannya ya tentang opini yang tertinggal adalah tanda tanya dalam judul. Dia mau memberi informasi atau menanyakan jawaban atau mengarahkan membentuk opini. Itu yang membuat saya menilai objektif"

-Nengah Muliartha

Warmadewa Bali

Maka dari pada itu penggunaan dan pemilihan kata dan tanda baca akan menggiring opini audiens atas kasus, narasumber, pelaku, korban hingga peristiwa itu sendiri. Ahli Framing lainnya yakni Robert M. Entman (1993) menegaskan proses pembingkaihan menjadi memiliki kekuatan dari kuatnya sebuah teks yang dikomunikasi dalam berbagai bentuk termasuk berita. Analisis yang Entman tekankan yakni pada teks yang dapat memberikan pengaruh pada kesadaran seseorang termasuk audiens atau khalayak televisi. Dua aspek yang dikemukakan Entman adalah (a) proses pembingkaihan teks dan (b) praktik pembingkaihan teks. Pada proses pembingkaihan terbagi dalam dua bentuk yakni seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari isu. Proses penonjolan ini dapat terlihat dari pemilihan judul, penempatan berita, penambahan ilustrasi dan lainnya. penonjolan aspek tertentu dari isu juga berhubungan dengan penulisan fakta. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada audiens atau khalayaknya.

“Dalam catatan saya, ada beberapa berita yang menggunakan kata-kata mengandung opini seperti Ironis, menggunakan kata ketika ada pembunuhan orang tua oleh anak. Pada berita evakuasi ular, evakuasi dikatakan dramatis. Dramatis itu adalah kata yang mengandung opini. Selain itu ada berita mahasiswa yang menjadi kuli panggul. Cantik itu opini. Buat saya cantik, tetapi buat laki-laki lain belum tentu cantik. Bagi saya ada beberapa kata berita yang menggunakan opini seperti cantik, dramatis, ironis, mewah.”

*- Dewanto Samodro, M. I. Kom
(Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta)*

Maka penggunaan kata dalam judul maupun dalam narasi menjadi sangat penting dalam tayangan berita di televisi. Panel ahli mendapatkan temuan bahwa penggunaan kata dalam pemberitaan televisi masih kerap tidak sesuai bahkan menggiring opini.

“Cuma narasinya begini “brodi tega menyiksa faisal dan membiarkannya lemas kelaparan hingga akhirnya meninggal dunia” itu opini dicampur keji.”

- Dr. Fakhrur Rozi, M.I.Kom
(Universitas Sumatera Utara)

Bahkan dalam diskusi juga terkemuka masih adanya pemberitaan yang menggunakan alur narasi yang sangat vulgar. Bahkan bagaimana proses kejadian peristiwa dijelaskan dengan sangat detail. Berikut contohnya;

Gambar 18. Berita dengan Penggunaan Narasi yang Vulgar



Sumber: TV ONE, 2022.

Pada cuplikan berita di atas digambarkan bagaimana pelecehan seksual yang terjadi di salah satu kendaraan umum. Namun narasi yang digunakan dalam memberitakan informasi tersebut sangat vulgar dan tidak cukup etis untuk ditayangkan dalam berita yang ditonton banyak kalangan.

Penggunaan kata berikutnya juga kerap kali tidak hanya menggiring opini tetapi membentuk stigma pada suatu

tempat, kelompok, suku, maupun seseorang. Contohnya adalah pemberitaan penindakan dugaan narkoba yang terjadi di suatu daerah. Pada pemberitaan dituliskan penggerebekan di kampung narkoba. Maka berikutnya audiens akan teringat akan citra negatif daerah tersebut sebagai daerah yang negatif dan penuh dengan narkoba.

Gambar 19. Berita dengan Penggunaan Kata yang Menimbulkan Stigma pada Suatu Tempat/Kelompok/Suku/Seseorang



Sumber: NET TV, 2021.

Gambar 20. Berita dengan Penggunaan Kata yang Menimbulkan Stigma pada Suatu Tempat/Kelompok/Suku/Seseorang



Sumber: TV ONE, 2022.

Maka berita di atas adalah salah satu contoh bagaimana pemberitaan seakan-akan memberikan label terhadap kampung tersebut. Media memiliki kekuatan untuk melakukan konstruksi sosial melalui media. Teks media dianggap memiliki kekuatan yang terkait dengan realitas sosial. Media khususnya berita merupakan cerminan dari realitas. Atas pemahaman ini maka produksi teks adalah objektifitas sebagaimana melihat peristiwa yang sesungguhnya. Konsep ini memisahkan individu pekerja media dan institusi media dengan realitas sosial.

Pada pandangan berikutnya media memiliki kekuatan mengkonstruksi dari realitas sosial pada teks-teks yang ditampilkan. Berita bukan hanya sekedar cermin dari realitas atau saluran penyampaian informasi semata. Terjadi proses konstruksi media yang menghadirkan realitas menurut sudut pandang media. Realitas ini yang kemudian menjadi sangat subjektif. Atau dapat dikatakan bahwa berita yang muncul di media merupakan sudut pandang dari pekerja maupun media yang berkaitan. Pandangan berikutnya adalah memandangi berita di media memiliki makna dari sebuah proses panjang yang dipengaruhi banyak faktor seperti yang diungkapkan Shoemaker dan Reese. Pandangan ini melihat bahwa berita tidak sekedar teks dan hasil konstruksi pekerja dan atau institusi media tetapi ada pertarungan ideologi di dalamnya.

Media memiliki kekuatan menggambarkan atau mengkonstruksi realitas sosial menjadi realitas media. Maka dengan menggunakan kata-kata tertentu maka media khususnya pemberitaan memiliki kekuasaan dalam membentuk realitas media yang dipercaya sebagai realitas sosial di lapangan. Maka penggunaan kata kampung narkoba, atau kata-kata dengan memberikan label pada suatu kelompok/daerah/suku/agama akan mempengaruhi bagaimana audiens dan masyarakat memandang kelompok/daerah/suku/agama tersebut.

Panel ahli juga mencatat bagaimana peran pembaca berita, anchor atau host dalam membawakan berita memainkan peran yang penting. Pemilihan pembawa acara atau host adalah langkah penting bagi lembaga penyiaran

dikarenakan mereka adalah representasi dari lembaga penyiaran. Maka pemilihan pembawa acara menjadi sangat signifikan.

“Bagian penyiaran ini juga harus bijaksana untuk dalam memilih siapa yang jadi hostnya. Apakah orang yang punya basic jurnalistik atau hanya orang yang memang camera face atau good looking. Misalnya ada di televisi, beritanya ibu itu mencuri helm di masjid, jadi narasinya adalah wow aktingnya bagus sekali”.

- Dr. Fakhru Rozi, M.I.Kom
(Universitas Sumatera Utara)

Cara pembawa acara membacakan juga menjadi catatan khusus. Kerap kali tidak hanya intonasinya namun cara penekanan kata yang disertai dengan mimik-mimik yang mengandung beragam makna. Ini terjadi biasanya pada saat pembawa acara membawakan berita-berita kriminalitas.

Intonasi dan mimik yang dibawakan oleh si pembawa acara khususnya pada berita-berita kriminalitas, seakan-akan mendramatisir kejadian kriminal dan melakukan penghakiman atas kejadian tersebut. Hal ini menyebabkan hilangnya objektivitas media terhadap sebuah peristiwa. Catatan lain yang ditemukan adalah seringkali pembaca berita tidak menyadari bahwa cara mereka berbicara akan menggiring opini sejak di awal berita maupun di akhir berita.

Pembawa acara sepatutnya memahami bagaimana televisi sebagai komunikasi massa memiliki peran penting dalam mendidik generasi mendatang.

“Saya mencatat banyak host yang ingin menyampaikan berita keji dia mengatakan bahwa berita tersebut menarik. Mungkin mereka tidak menyangkan berita kekejian dengan disorot/ diblur tetapi narasinya itu sangat vulgar yang membuat kita membayangkan kekejaman yang terjadi”

- Dr. Netty Herawaty, M.Si
(Universitas Tanjungpura)

D. SARA, Kekerasan dan Pornografi Dalam Berita

Satu definisi yang berguna mengenai apa itu berita adalah informasi nyata tentang peristiwa terkini yang nyata. Jurnalisme adalah tentang mendokumentasikan informasi, dan karena jurnalis membuat konten berita dan melaporkan peristiwa dunia nyata, selalu ada kemungkinan yang melekat bahwa konten yang mereka buat akan berisi kekerasan, mentah, politis, dan kontroversial.

Sebagai media visual, media berita televisi memiliki manfaat tambahan yaitu dapat menggabungkan gambar dan video dengan teks dan audio untuk menyampaikan pesan secara lebih utuh, misalnya keputusan orang tua yang kehilangan anaknya atau kebanggaan masyarakat setempat atlet membawa piala yang didambakan kembali ke rumah.

Sebuah pertanyaan penting muncul: sejauh mana tugas jurnalistik pelaporan faktual dan objektif harus dilaksanakan? Lagi pula, secara umum akan dianggap tidak etis jika sebuah laporan tentang kekerasan massal menyertakan gambar grafis dari tubuh para korban, meskipun itu pasti akan membantu dalam memberikan gambaran tragedi yang lebih akurat, dan banyak pemirsa mungkin menemukan masalah dengan karya lokal. tentang seorang gadis sekolah tenggelam yang didominasi oleh tangisan ratapan ibu mereka yang patah hati.

Apa yang merupakan penggambaran konten seksual, ras, agama, atau kekerasan yang tidak dapat diterima dalam berita adalah topik yang beragam dan kompleks, tetapi dalam praktik jurnalisme, ini jauh lebih sederhana: jurnalis tunduk pada praktik dan nilai yang diterima, hukum setempat, dan norma budaya. Dalam upaya untuk memahami dan mengevaluasi laporan media berita TV yang berkaitan dengan kekerasan, kejahatan, konflik, ras, agama, dan seksualitas, metodologi penelitian ini memungkinkan informan untuk secara bertahap mengembangkan konsensus tentang apa arti masing-masing istilah tersebut dan apa yang merupakan konten yang tidak pantas untuk siaran publik.

Gambaran gore dan grafis pernah menjadi hal yang lumrah dalam konten berita TV Indonesia. Pemberitaan tentang tindak kekerasan atau pembunuhan di awal hingga pertengahan 2000-an, misalnya, akan menampilkan gambar atau cuplikan korban yang mentah, disertai dengan narasi yang menggambarkan kejahatan dengan nada serius. Gambaran grafis yang eksplisit semacam ini tidak lagi menjadi

praktik standar di media berita TV dan sebagian besar telah digantikan dengan foto-foto tempat kejadian perkara atau pernyataan resmi polisi. Dalam kasus yang jarang terjadi, bidikan yang mengandung darah atau darah kental yang berlebihan disiarkan, hal itu disensor secara ketat melalui pemburaman.

Dalam beberapa tahun terakhir, media berita TV telah secara agresif mengaburkan gambar atau rekaman yang berpotensi kontroversial atau kontroversial. Akan tetapi, para informan menemukan bahwa kebijakan pengaburan yang terang-terangan ini memiliki efek yang berlawanan dengan yang dimaksudkan, terutama karena gambar-gambar kabur ini sering dipasangkan dengan deskripsi yang sangat mendetail tentang tindakan atau subjek yang diburamkan.

Seorang informan mengangkat isu narasi yang terlalu deskriptif, yang mereka yakini vulgar, komprehensif, dan cukup sugestif sehingga mengundang penonton untuk membayangkan tindakan dengan detail yang menyiksa:

“Mungkin mereka tidak menayangkan berita kekejian dengan disorot, diblur tetapi narasinya sangat vulgar yang membuat kita membayangkan kekejaman yang terjadi.”

-Dr. Netty Herawaty, M.Si
(Universitas Tanjungpura)

Pelaporan sensasional yang merajalela adalah topik perhatian yang berulang dalam diskusi informan. Meskipun

media berita TV sebagian besar telah menghilangkan gambar berdarah dan kekerasan dari siaran mereka, telah terjadi peningkatan penggunaan bahasa sehari-hari dalam pelaporan, peningkatan prevalensi berita utama dan narasi sensasional, dan penyampaian berita penuh humor yang menurut informan tidak profesional dan melanggar kode etik jurnalistik.

Popularitas gaya pelaporan sensasional yang terus berlanjut di media berita TV telah menyebabkan pencampuran opini dan fakta yang terbuka dan kasual. Para informan mengemukakan keras praktik ini, yang jelas-jelas melanggar kode etik, dengan mengutip headline dan narasi yang sarat dengan kata sifat kualifikasi dan pernyataan opini.

“Dalam catatan saya, ada beberapa berita yang menggunakan kata-kata mengandung opini seperti Ironis, menggunakan kata ketika ada pembunuhan orang tua oleh anak. Pada berita-berita ular, dilaporkan dramatis. Dramatis itu adalah kata yang mengandung opini. Selain itu ada berita mahasiswa yang menjadi kuli panggul. Cantik itu pendapat. Buat saya cantik, tapi buat laki-laki lain belum tentu cantik. Bagi saya ada beberapa kata berita yang menggunakan opini seperti cantik, dramatis, ironis, mewah.”

- Dewanto Samodro, M. I. Kom
(Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta)

Dalam diskusi, para informan mempertanyakan integritas jurnalistik pembawa acara dan reporter yang membuat berita ini, dan menyarankan bahwa industri secara keseluruhan telah melupakan fungsi televisi sebagai sarana mendidik generasi.

“...banyak pembaca berita yang tidak bisa sepenuhnya sepenuhnya bahwa dia tidak menggiring opini terutama pada awal dan akhir berita. Mungkin mereka lupa bahwa tv itu juga berperan untuk mendidik generasi kita.”

- Dr. Netty Herawaty, M.Si
(Universitas Tanjungpura)

Informan juga melaporkan kasus host dan narator yang mengagungkan kekejian dalam konten berita.

“Saya mencatat banyak host yang ingin menyampaikan berita keji dia mengatakan bahwa berita tersebut menarik.”

- Dr. Netty Herawaty, M.Si
(Universitas Tanjungpura)

Masalah serupa muncul saat analisis penggambaran topik yang lebih sensitif secara budaya dan sosial, seperti ras, agama, gender, dan etnis. Seorang informan, berbicara tentang sebuah laporan berita tentang pembunuhan seorang imam lokal, merasa bahwa presentasi yang “sangat bermoral”

itu bertentangan dengan efek paket yang sebenarnya, yang menghebohkan publik. Baik dengan trik penyuntingan atau manipulasi emosi secara sadar melalui pembingkaihan dan pemilihan kata, informan yakin ada maksud yang jelas dari pihak jurnalis untuk merangsang imajinasi pengamat:

“Ada berita imam masjid tewas dianiaya pemuda, Saya melihat bahwa semakin banyak gambaran suasana konflik yang memiliki moralitas tinggi justru membuat persepsi publik semakin buruk. Saya kira model – model berita yang berkaitan dengan etik dan moral sosial kita sebagai bangsa oleh karena saya berharap pada teman-teman wartawan pada khususnya di tv bagaimana soal narasi itu dibuat sedemikian rupa. Kemudian juga dalam tayangan yang mungkin di edit agar lebih persuasif sehingga mempermudah proses permaknaan khalayak.”

-Said Lestaluhu, S.Sos., M.Si
(Universitas Pattimura)

Menurut informan lain, ini masalah framing. Mengutip insiden serupa di mana seorang guru melakukan pelecehan seksual terhadap tujuh muridnya di masjid setempat, informan merasa bahwa cara laporan itu dikemas memungkinkan jurnalis untuk menghindari diskusi yang mengaitkan agama dengan kejahatan:

“Di tempat lain ada berita yang sama lokasinya di tempat ibadah yang mungkin berkaitan dengan SARA. Mungkin ini berkaitan dengan framing mungkin tidak mungkin kita bingungkan konten-konten yang sifatnya konflik, kriminalitas atau peristiwa hukum kita mengaturi bahwa framingnya harus jangan kaya yang dibidang mempengaruhi”

- Dr. Fakhur Rozi, M.I.Kom
(Universitas Sumatera Utara)

Pembingkaiian yang provokatif dan penyuntikan opini penulis memengaruhi pemberitaan tentang kejahatan seksual secara spesifik: menyalahkan korban. Meskipun tidak eksplisit (dan mungkin bahkan tidak sengaja), pilihan kata-kata dalam laporan kejahatan seksual memiliki efek melunakkan bagaimana kejahatan tersebut dapat dirasakan oleh khalayak:

“Yang mungkin menjadi dilema bagi pengelola TV, yaitu penggunaan kata khususnya dengan kekerasan seksual pada perdagangan rendah hati. Ada penggunaan kata ‘hasrat’, ada penggunaan istilah yang seharusnya tidak diperhalus justru diperhalus. Misalnya, tindakan asusila itu kan seolah-olah seolah-olah bukan bukan isu yang besar. Ini mungkin dilema antara ingin terdengar tidak vulgar, tapi justru di sisi lain, mendiskriminasikan golongan perempuan bahwa yang terjadi pada korban bukan sesuatu yang besar. Penggunaan ini misalnya khususnya kejadian kekerasan seksual yang seharusnya tidak dihaluskan justru malah dihaluskan sehingga kelompok perempuan yang dirugikan.”

- A.A.I Prihandari Satvikadewi, M.Med.Kom
(Universitas Negeri Surabaya)

Seperti yang ditunjukkan oleh kutipan di atas, para informan seringkali bersedia menerima bahwa isu pembingkaihan dan pemilihan kata yang provokatif mungkin tidak didorong oleh niat atau tujuan buruk, melainkan semacam ketidaktahuan tidak profesional oleh para jurnalis di Indonesia.

Bahasa sehari-hari dan vulgar adalah topik berulang lainnya selama diskusi. Penggunaan kata sifat yang memenuhi syarat membuat beberapa informan merasa topik tertentu

tidak diperlakukan dengan keseriusan dan profesionalisme yang sesuai. Salah satu contoh ekstrim yang dikemukakan oleh seorang informan:

“Kok bisa, ya, [headline-nya] ‘terinspirasi dari film porno?’”

- Dr. Fakhrur Rozi, M.I.Kom
(Universitas Sumatera Utara)

Informan merasa kombinasi kata-kata ini menimbulkan disonansi kognitif dan moral. Menurut para informan, kata “terinspirasi” berkonotasi positif, namun diikuti oleh kata “film porno”—jenis film yang tercela secara sosial dan juga ilegal di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa kedua kutipan di atas sama-sama merujuk pada laporan berita tentang kasus pemerkosaan lokal di mana seorang gadis atau wanita muda menjadi korbannya. Seorang informan merasa jenis kata-kata ini berpotensi merangsang wacana positif tentang pornografi dan pemerkosaan yang akan berdampak negatif pada orang Indonesia dari semua jenis kelamin:

“Itu bukan hanya mendiskriminasikan perempuan; itu mendiskriminasikan kami semua. Kok bisa ‘terinspirasi’? Seolah-olah perbuatan itu baik.”

- Dr. Fakhrur Rozi, M.I.Kom
(Universitas Sumatera Utara)

Analisis studi ini tentang kondisi jurnalisme TV dan liputan berita di Indonesia saat ini telah mengungkapkan sikap apatis umum terhadap etika dan tanggung jawab sosial yang harus dipatuhi oleh wartawan. Karena ini berkaitan dengan konten berita tentang topik yang melibatkan SARA, kekerasan, dan pornografi, laporan berita TV tentang topik ini menunjukkan jumlah suara penulis yang mengkhawatirkan, pilihan kata yang provokatif, bahasa sehari-hari, dan menyalahkan korban secara kasual.

Ini adalah temuan penting, karena mereka menunjukkan gerakan industri yang sadar dan disengaja untuk menghasilkan berita utama dan konten yang sensasional, dengan mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kode etik jurnalisme Indonesia.

TV memiliki kekuatan untuk membentuk wacana publik tentang topik yang relevan dengan audiensnya. Bagaimana sebuah berita dikemas dan disampaikan dapat mempengaruhi bagaimana pemirsanya memandang politik, dinamika gender, konflik agama, dan sengketa wilayah. Wartawan TV di Indonesia membingkai laporan mereka melalui metode-metode sensasionalis yang memprioritaskan menarik dan mempertahankan pemirsa, alih-alih memberikan pelaporan yang adil dan berimbang yang mendidik pemirsa mereka.

Permasalahan Sara, Kekerasan, Diskriminasi dan Pornografi Dalam Tayangan Berita Televisi Di Indonesia

Dari pernyataan dan penjelasan di atas ada beberapa

permasalahan dan catatan khusus bagaimana pemberitaan bersinggungan dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

1. Penggunaan atribut-atribut agama/suku pada berita negative atau terkait kriminalitas.

Pada pemberitaan khususnya pada naskah atau judul dan narasi masih ditemukan penempelan atribut terhadap tersangka atau pelaku hingga kepada korban, dengan menggunakan atribut keagamaan atau suku. Padahal tentu saja atribut yang menempel di diri tersangka/pelaku bahkan korban tidak memiliki relevansi dengan atribut tersebut. Contohnya adalah penggunaan atribut imam masjid dari berita mengenai adanya penusukan. Hal ini dapat menyebabkan kerancuan dan dapat menimbulkan konflik di masyarakat karena muncul ketersinggungan.

“Ada berita imam masjid tewas dianiaya pemuda, Saya lihat bahwa semakin banyak gambaran suasana konflik yang memiliki moralitas tinggi justru membuat persepsi publik makin rancu. Saya kira model – model berita yang berkaitan dengan soal etik dan moral sosial kita sebagai sebuah bangsa oleh karena saya berharap pada teman – teman wartawan pada khususnya di televisi bagaimana soal narasi itu dibuat sedemikian rupa”

- Said Lestaluhu, S.Sos., M.Si
(Universitas Pattimura)

Hal ini adalah salah satu contoh dari bagaimana pembedaan pemberitaan akan memberikan dampak yang berbeda. Program berita diharapkan lebih sensitive dan berhati-hati dalam memberitakan suatu kejadian yang berlatar belakang agama, suku dan golongan. Penghindaran atribut tentu saja penting untuk tidak menimbulkan asumsi negatif kepada golongan masyarakat yang beratribut sama.

Gambar 21. Berita dengan Penggunaan Atribut Agama



Sumber: Kompas TV, 2020.

Pada cuplikan tayangan di atas, adalah satu contoh bagaimana korban dinarasikan dengan penempelan atributnya sebagai seorang imam masjid. Hal ini akan menimbulkan kemarahan di masyarakat, di mana seorang imam masjid

tentu saja berkolerasi dengan satu agama. Padahal belum tentu penganiayaan yang terjadi dan melibatkan korban memiliki keterkaitan dengan dirinya sebagai imam masjid.

Hal yang berbeda yakni pada cuplikan tayangan televisi di bawah ini. Kasus terduga pencabulan/kekerasan seksual yang kemudian menjadi buronan polisi digambarkan belum berhasil ditangkap kepolisian. Namun pusat berita atau highlight berita menekankan bagaimana terduga berlindung dan dilindungi oleh salah satu pesantren yang notabene berkaitan dengan agama tertentu. Hal ini tentu saja tidak hanya membawa citra negatif pada tempat pengayaann agama seperti pesantren, namun pesantren pada umumnya.

Gambar 22. Berita dengan Penggunaan Atribut Agama



Sumber: Kompas TV, 2022.

Panel ahli namun juga mengapresiasi penghindaraan penggunaan beberapa kata yang berhubungan dengan agama. Contohnya adalah saat terjadi pencabulan kepada 7 siswa di salah satu tempat, terdapat media yang memberitakan dalam narasinya, guru cabuli siswanya di salah satu tempat ibadah. Namun ada media yang menuliskan secara vulgar yakni Guru cabuli 7 santri di masjid. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak emosi yang berbeda. Untuk itu media diharapkan mampu mengemas berita dengan tidak memprovokasi namun tetap memberitakan sebuah fakta.

“Ada satu berita guru cabuli 7 santri/muridnya jadi lokasinya di masjid, ini berkaitan soal framing kali ya. Di tempat lain ada berita yang sama lokasinya di tempat ibadah mungkin berkaitan dengan SARA. Mungkin ini berkaitan dengan framing barangkali bisa tidak kita sepakati konten-konten yang sifatnya konflik, kriminalitas atau peristiwa hukum kita sepakati bahwa framingnya harus jangan seperti mempengaruhi (emosi)”

- Dr. Fakhrur Rozi, M.I.Kom
(Universitas Sumatera Utara)

2. Penggunaan Eufemisme Untuk Penghalusan Sebuah Kejadian

Panel ahli menyoroti penggunaan penghalusan kata pada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak pantas.

Penghalusan kata memang diakui mengandung dilemma. Pada satu sisi, perlu adanya penghalusan kata agar berita tidak terkesan vulgar, namun pada sisi praktik ini seakan-akan mengesankan perbuatan asusila menjadi hal yang biasa dan bukan kejahatan yang luar biasa. Hal ini kemudian justru menampilkan diskriminasi terhadap korban yang sebagian besar adalah perempuan. Ironisnya pada pemberitaan kekerasan seksual, tayangan berita kerap kali mendramatis dan membuatnya sebagai objek yang menarik. Contohnya penggunaan kata “Hasrat” yang dinilai cukup dramatis.

Gambar 23. Berita dengan Penggunaan Eufemisme



Sumber: TV ONE, 2021.

“Ini yang mungkin ada dilema antara ingin terdengar tidak vulgar tapi justru di sisi lain mendiskriminasi golongan perempuan bahwa yang terjadi pada korban bukan sesuatu yang besar. Penggunaan ini misalnya khususnya kejadian kekesaran seksual yang harusnya tidak dihaluskan justru malah dihaluskan sehingga golongan perempuan yang dirugikan,”

- A.A.I Prihandari Satvikadewi, M.Med.Kom
(Universitas Negeri Surabaya)

3. Penggambaran Berita Pornografi dan Asusila

Permasalahan lain yang muncul pada isu ini adalah bagaimana tayangan berita kemudian menyusun berita-berita pemerkosaan atau cabul dengan narasi yang sangat detail. Bahkan kadang adegan-per adegan direka ulang atau dijelaskan dengan sangat detail. Secara emosi maka para korban akan merasa dirugikan dan menimbulkan rasa trauma yang tidak berkesudahan.

Gambar 24. Berita dengan Penggunaan Narasi yang Vulgar



Sumber: iNews, 2022.

Cuplikan berita di atas adalah salah satu berita tentang kejadian cabul yang terjadi pada kendaraan umum kereta listrik. Berita dengan vulgar menggambarkannya dan menggunakan gambar dari video amatir.

“viral aksi mesum pria misterius, mempertontonkan kemaluannya di depan umum, pria tersebut melakukan aksi dengan merem melek tangan kirinya memegang alat vitalnya serta mempertontonkan” di antv kok bisa tim redaksi menggunakan hal seperti itu. meskipun tidak kelihatan ya tapi diekspresikan itu kan seolah2, saya kira pilihan kalimat yang perlu diberi peringatan”

- Drs. Saryadi, M.Si
(Universitas Diponegoro)

Hal ini tentu saja meresahkan audiens. Begitu pula halnya cuplikan tayangan berita di bawah ini yang menggambar dengan detail bagaimana kasus pencabulan terjadi.

Gambar 25. Berita dengan Penggunaan Narasi yang Vulgar



Sumber: TV ONE, 2022.

Selain cuplikan di atas, berita dengan narasi yang sangat detail juga terjadi pada pemberitaan mengenai seorang artis bernama Siskae. Memang tidak ada visualisasi pornoaksi, namun dalam narasi yang dibacakan tergambar secara deskriptif apa yang terjadi.

“Mungkin saya aja yang merasa kasus yang siskae yang di bandara yogja memang tidak ada visualisasinya tapi voice over mendeskripsikan secara detail apa yang dilakukan siskae. Ini yang dari catatan saya ya kalau tidak salah membuka pakaian dan memainkan organ vital yang membuat kita berimajinasi. Saya nonton itu juga jadi berimajinasi lo pak. Jadi mungkin visualnya tidak tapi deskripsi vo itu menjelaskan peristiwa pornografi secara detail”.

- Dewanto Samodro, M. I. Kom
(Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta)

Hal lain yang menarik dari diskusi mengenai isu pornografi dan pornoaksi adalah baju atau busana yang dikenakan host atau pembawa acara berita. Hal ini dapat disaksikan dalam acara-acara tayangan berita khususnya di malam hari. Memang host tidak melanggar etika pornografi namun lebih kepada etika kepantasan.

“Ini sebenarnya bukan porno tapi presenter wanita ini pake pakaian terlalu seksi baju ketat rok sangat mini terus ditayangkan di atas jam 12, ia pakai rok ketat dan seksi duduk seenaknya sebetulnya bukan pornografi tapi soal kepatutan.”

- Dr. Aceng Abdullah
(Universitas Padjajaran)

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pornografi, pornoaksi atau kecabulan masih menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga penyiaran dalam mengemasnya di berita televisi yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Ironisnya, media pemberitaan sebagai media pendidik bangsa tidak malah terjebak sebagai penghasut dan pelaku pornografi atau aksi terkait hal tersebut.

4. Penggambaran Keji dan Sadis dalam Narasi dan Pemberitaan Berita Televisi

Pada berita-berita kriminal, masih ditemukan narasi yang subjektif, menghakimi dan menggunakan kata-kata yang berlebihan. Seperti cuplikan berita di bawah ini, penggunaan kata bejat dan atribut anak tiri terlihat menggambarkan subjektifitas pemberitaan serta menggambarkan secara simbolik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku.

Gambar 26. Berita dengan Penggunaan Narasi yang Subjektif, Menghakimi, dan Menggunakan Kata-Kata yang Berlebihan



Sumber: NET TV, 2022.

Walau gambar yang ditampilkan di beberapa tayangan televisi telah disesuaikan dengan etika jurnalistik, namun tercatat narasi yang digunakan teman-teman jurnalis menggunakan kata-kata yang tergolong kekerasan simbolik. Berita pun kemudian diberikan latar music serta efek suara yang mendramatisir keadaan. Hal ini kerap mendramatisasi kejadian dengan disertai music dan narasi. Musik kerap kali ada pada peristiwa pembunuhan untuk kemudian menambah suasana mencekam ini yang harus diperhatikan. Padahal terdapat cara lain untuk menarik empati secara visual, seperti disamakan, pengambilan gambar yang berjarak, serta ukuran gambar yang ditampilkan di berita. Ironisnya dikarenakan minimnya ragam gambar visual, pada berita-berita kriminal kerap kali terjadi pengulangan gambar-gambar yang pada akhirnya memberikan kesan penekanan dan dramatisasi.

“Kemudian yang penting untuuk diperhatikan tidak dilakukan pengulangan gambar karena minimnya gambar maka tv cenderung mengulang karena narasinya blm selesai sehingga bisa menanamkan bahwa itu cara kejahatan berlangsung seperti itu. Mungkin bisa diganti dengan ilustrasi atau infografis karena itu tidak nyata kalau ada percikan darah tapi informasinya tetap sampai”.

- A.A.I Prihandari Satvikadewi, M.Med.Kom
(Universitas Negeri Surabaya)

Perkembangan masih munculnya tayangan yang keji pada tayangan berita dikarenakan sumber dari tayangan adalah rekaman video amatir atau cctv atau dari akun media sosial yang tentu saja tidak memahami trik dan kewajiban untuk tidak merekam tayangan kekejian yang sesuai dengan norma dan etika jurnalisme. Alhasil, kerap kali tidak terburamkan atau masih terlihat jelas kekerasan/kekejian yang terjadi.

E. Praktik Trial by The Press

Media memegang kekuasaan yang cukup besar atas bagaimana proses hukum digambarkan dan, kemudian, cara masyarakat memandang sebuah kasus dan individu yang terlibat. Cara media membingkai dan melaporkan kasus hukum dapat berdampak nyata pada tersangka dan korban yang terlibat. Pemilihan kata, foto dan video, pemilihan sumber, dan waktu dapat mempengaruhi opini publik tentang individu dalam suatu kasus sebelum, selama, dan setelah persidangan. Ini adalah masalah yang menjadi perhatian penting bagi pembuat undang-undang, praktisi hukum, dan jurnalis; ketika seorang warga negara dapat diadili dan diadili di depan rekan-rekannya di pengadilan opini publik, ini merupakan ancaman besar bagi pemerintah dan proses hukum mereka.

Diskusi tentang topik pengaruh media terhadap opini publik sangat relevan di era media sosial karena berkaitan dengan gagasan jurnalistik (dan hukum) tentang praduga tak bersalah. Bahwa seseorang tidak bersalah sampai terbukti

bersalah adalah prinsip inti dalam etika jurnalistik, dan kepatuhan terhadap anggapan ini adalah salah satu dimensi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kualitas konten berita televisi di Indonesia.

Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam bab-bab sebelumnya, dan seperti yang akan berulang lagi di sini, informan dalam penelitian ini mengidentifikasi praktik verifikasi sumber yang buruk, tren gaya penulisan sensasional dalam tajuk berita dan konten, dan tekanan waktu yang melekat pada berita yang tidak pernah berakhir. siklus menjadi kekuatan pendorong utama di balik runtuhnya nilai-nilai jurnalistik. Dalam bab ini, kami akan menjelaskan pengaruhnya terhadap penggambaran kasus kriminal di media berita televisi, persidangan oleh pers dan pengadilan opini publik, dan bagaimana hal itu melanggar asas praduga tak bersalah dalam jurnalisme TV modern Indonesia.

Wartawan dan media, sebagai pemberi pengaruh opini publik, dan oleh tanggung jawab yang melekat dan diharapkan dari profesi mereka, umumnya memiliki standar objektivitas yang lebih tinggi daripada rata-rata warga negara atau pengguna internet. Namun, jurnalis dan media berita jarang dimintai pertanggungjawaban atas pencitraan dan kerusakan reputasi yang mereka timbulkan. Dalam kasus seperti itu mereka dipanggil karena salah kutip, representasi yang salah, atau kata-kata yang buruk, biasanya, surat permintaan maaf, redaksi, atau menarik bagian yang menyinggung dianggap sebagai ganti rugi yang cukup.

Tanpa pemeriksaan sosial atau hukum yang tepat untuk menegakkan kewajiban dan tanggung jawab sosial, media berita memiliki kekuatan yang berbahaya atas persepsi publik di era ketika kesan pertama Anda mungkin satu-satunya yang diberikan kepada Anda. Tidak seperti di pengadilan, di mana setiap kata dan tindakan publik terdakwa diperiksa dengan cermat oleh tim hukum, tidak ada penasihat ahli yang disediakan untuk mengatur cara Anda diwakili di media sosial dan di televisi. Informasi dan ide, setelah dibagikan ke dalam kesadaran publik, hampir tidak mungkin untuk dibatalkan, dihapus, atau diubah. Akibatnya, tidak ada yang melindungi terdakwa dari ledakan liputan media yang berpotensi merusak reputasi dan citra mereka secara permanen.

Tentu saja, pemberitaan negatif di media memiliki sedikit konsekuensi mengenai apakah seseorang secara hukum dianggap bersalah melakukan kejahatan, namun dapat berdampak pada reputasi, kesehatan mental, dan kehidupan sosial mereka yang bertahan lama setelah masa pengadilan mereka berakhir. Persidangan oleh pers ini dimulai dan berjalan bersamaan dengan persidangan hukum yang sebenarnya, memaksa seorang terdakwa untuk menghadapi evaluasi baik di depan hakim maupun di pengadilan opini publik.

Ketika diminta untuk mendiskusikan alasan potensial di balik anggapan kurangnya rasa hormat terhadap asas praduga tak bersalah ini, sebagian besar informan tidak

menganggap niat buruk dari pembuat konten berita. Banyak yang menunjuk pada tekanan konstan dari siklus berita 24 jam sebagai faktor pendorong di balik runtuhnya standar editorial di seluruh industri. Berita hari ini lebih sensitif terhadap waktu daripada sebelumnya, dan konten berita diharapkan disampaikan sedekat mungkin dengan waktu nyata. Tekanan waktu itu, menurut beberapa informan, membuat tim editorial hampir tidak mungkin memeriksa konten berita dengan benar sebelum masa simpannya habis.

Mustahil untuk menyangkal pengaruh media sosial yang cukup besar dan konektivitas yang konstan terhadap proses editorial. Jendela waktu di mana item berita relevan telah menjadi semakin ketat karena audiens telah tumbuh untuk mengharapkan pembaruan informasi dari menit ke menit. Namun, wartawan hanya dapat melaporkan informasi yang mereka miliki pada saat rilis, dan seringkali, informasi itu sepihak atau tidak lengkap. Dan dengan demikian, anggapan kurangnya tanggung jawab sosial di pihak jurnalis dan media berita TV ini, sebagian, merupakan efek samping yang diperlukan dari bisnis pembuatan berita—jurnalisme modern di era ponsel.

Proses editorial dan penulisan berita menjadi dua bagian dalam permainan keseimbangan—dalam industri yang bergerak cepat ini, tidak praktis untuk memberikan perhatian yang sama pada keduanya. Informan menyatakan keprihatinan tentang efek abadi dari siklus berita yang tidak pernah berakhir terhadap seberapa kriminal kasus-kasus final dan perdata ditangani di tahun-tahun mendatang.

Faktualitas dan imparialitas sangat penting bagi media berita untuk memenuhi perannya sebagai penyedia informasi yang objektif. Seringkali, ini diterima begitu saja di media berita, terutama oleh pemirsa TV rata-rata—jika itu di televisi berita, maka itu pasti benar. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa sejumlah konten media berita yang ditayangkan di televisi Indonesia mengintegrasikan konten video dan foto yang bersumber dari media sosial dengan verifikasi yang minim. Metode ini, para informan berspekulasi, digunakan untuk mentransfer beban faktualitas ke akun media sosial yang kontennya dipinjam wartawan ini.

Seorang informan mengomentari banyaknya konten media berita yang mengutip informasi hanya dari satu sumber berita. Seringkali dalam kasus pidana, tersangka tidak dapat dimintai komentar pada saat berita tersebut ditayangkan, sehingga wartawan hanya mengutip saksi mata atau pernyataan resmi polisi. Menurut informan ini, ini merupakan pelanggaran aturan jurnalistik dalam meliput kedua sisi isu. Dalam hal wawancara langsung dengan tersangka tidak memungkinkan, informan menyarankan untuk menghubungi pengacara atau juru bicara tersangka.

“Perp walk” adalah contoh lain dari konten media berita yang berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap tersangka sebelum persidangan. Perp walk adalah praktik yang dipinjam dari model penegakan hukum Amerika di mana satu atau banyak tersangka kriminal diborgol dan dibawa melalui ruang publik, biasanya ditemani oleh seorang petugas polisi. - menggambarkan jalan pelaku

sebagai semacam ekspresi publik yang disengaja tentang kompetensi polisi—sebuah pertunjukan untuk membujuk atau meyakinkan pemirsa bahwa polisi sedang melakukan tugas mereka.

Informan juga mengomentari maraknya pemberitaan sensasional di media berita TV Indonesia. Dalam satu contoh, seorang pejabat publik yang diperiksa dengan tuduhan korupsi digambarkan sebagai “tertunduk malu”. Penggunaan kata sifat kualifikasi “malu” dikritik oleh informan karena mengaitkan tersangka dengan deskriptor yang sarat dengan bias. Suntikan opini pribadi melalui kata sifat kualifikasi yang mengandung bias sering terjadi dan umum di semua media berita TV.

Dalam hampir semua kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, mereka yang menjadi sasaran perp walk adalah tersangka dan bukan narapidana. Dalam banyak kasus, inisial, nama, wajah, jenis kelamin, usia, atau kota asal tersangka atau tersangka juga diungkapkan. Ini adalah contoh umum lain dari media TV Indonesia yang tidak menghormati asas praduga tak bersalah dari individu yang mereka laporkan dalam kasus pidana. Meskipun berita-berita ini tidak selalu secara verbal menunjukkan rasa bersalah kepada tersangka atau tersangka, citra seseorang dengan pakaian oranye yang dibawa melalui ruang publik bisa cukup untuk menetapkan kesalahan individu tersebut di benak pemirsa.

Sementara faktualitas dan ketidakberpihakan akan selalu menjadi pusat subjek jurnalisme, salah satu kritik yang para informan terus temukan masalah dalam 7-tahun

penelitian ini adalah bahwa reporter berita TV tidak secara konsisten mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi korban dan tersangka tindak pidana. Pada tahun-tahun sebelumnya, informan melaporkan bahwa media berita tidak secara tepat menggunakan nama samaran atau teknologi pemburaman wajah untuk menjaga anonimitas individu yang terlibat dalam proses hukum. Ada tanda-tanda perbaikan umum di bidang ini—misalnya, pada tahun 2022, pengungkapan alamat pribadi dan nama lengkap sebagian besar tidak digunakan lagi—media berita TV tetap tidak konsisten dengan kapan dan di mana nama samaran dan pengaburan wajah digunakan.

Beberapa informan kurang memaafkan. Seorang informan, berbicara tentang pengalaman pribadi mereka sebagai mantan jurnalis, menyayangkan kurangnya profesionalisme dari wartawan modern, menunjuk pada kesalahan tata bahasa dan kesalahan ketik dalam konten berita modern yang mereka anggap tersebar luas.

Terkadang, kurangnya profesionalisme di media berita TV menunjukkan ketidaktahuan atau sikap apatis terhadap pengaruh media terhadap pemikiran publik. Salah satu contoh umum di televisi berita Indonesia yang diangkat selama diskusi informan adalah kecenderungan wartawan dan wartawan untuk mencampuradukkan istilah klasifikasi hukum “tersangka” dan “terpidana.” Kedua istilah tersebut menggambarkan seseorang yang terkait dengan tindakan melakukan kejahatan, tetapi ada perbedaan hukum yang jelas dan sangat penting antara keduanya: yang pertama diduga

telah melakukan kejahatan; yang terakhir telah secara resmi dianggap bersalah atas kejahatan di pengadilan.

Informan melaporkan beberapa kasus media berita yang menetapkan klasifikasi tersangka yang salah kepada individu yang terlibat dalam kasus kriminal. Dalam kebanyakan kasus seperti itu, berita yang menyinggung menggunakan klasifikasi “terpidana” untuk individu yang hanya dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan, sehingga memberikan mereka kesalahan yang belum terbukti melalui forum publik. Dalam beberapa kasus, menurut diskusi informan, individu digambarkan sebagai “pelaku” suatu tindakan sebelum polisi mengambil Tindakan untuk secara resmi memproses mereka sebagai tersangka.

Kurangnya kehati-hatian untuk memverifikasi klasifikasi tersangka dan pelanggaran asas praduga tak bersalah merupakan masalah yang berkepanjangan di media berita Indonesia. Menganggap bersalah seseorang yang hanya dicurigai atau didakwa melakukan kejahatan, apakah anggapan ini disengaja atau tidak dari pihak reporter, menandai pelanggaran kode jurnalistik yang jelas. Informan memang mencatat perbaikan yang signifikan dengan klasifikasi praduga tak bersalah dan tersangka mulai tahun 2021, meskipun masih terjadi pada frekuensi yang menurut informan tidak dapat diterima.

Informan dalam penelitian ini prihatin dengan bagaimana persidangan oleh pers dapat merusak proses hukum berbasis bukti. Apa artinya bagi hukum dan ketertiban di Indonesia ketika masyarakat yang diinformasikan oleh

konten media berita yang cacat dapat menetapkan vonis bersalah dengan konsekuensi sosial yang nyata?

Secara hukum, mereka yang ikut campur dalam jalannya hukum dapat dikenakan pasal penghinaan pengadilan. Wartawan di Indonesia yang meliput suatu kasus sebelum dan selama proses peradilan tidak memiliki akses terhadap semua informasi yang relevan dengan kasus tersebut. Namun, melalui pemberitaan fakta yang tidak lengkap ini, yang seringkali dikemas dengan tulisan sensasional dan citra provokatif, jurnalis menghasut dan mengarahkan wacana publik dan penilaian tersangka melalui media publik. Seorang hakim yang terkena wacana ini hampir pasti akan terpengaruh, baik disadari atau tidak. Apakah ini termasuk dalam definisi campur tangan terhadap jalannya keadilan? Haruskah jurnalis tunduk pada penghinaan pengadilan dalam kasus-kasus di mana liputan mereka dapat memengaruhi pendapat hakim, pengacara, saksi, tersangka, dan korban yang terkait dengan suatu kasus?

Sementara media berita televisi wajib menjunjung asas praduga tak bersalah dan Persatuan Wartawan Indonesia menawarkan pelatihan reguler tentang terminologi hukum dan penggunaannya yang tepat, para informan menyatakan keraguan atas keefektifan metode ini. Beberapa pihak menyarankan penerapan denda dan sanksi yang lebih keras kepada media berita yang terbukti melanggar asas praduga tak bersalah, sementara yang lain mendorong keterlibatan KPI yang lebih berat dalam program pelatihan jurnalisisme. Saran-saran ini mungkin cukup sulit untuk diterapkan, karena etika dan standar jurnalistik berada di luar kewenangan KPI, tetapi

saran-saran tersebut menimbulkan keprihatinan serius di antara para informan mengenai keadaan etika dan tanggung jawab dalam jurnalisme saat ini.

Contohnya bagaimana media menyebutkan seseorang yang diamankan dalam penggerebekan sebagai tersangka. Walau ada yang menggunakan kata terduga. Ironisnya terdapat tayangan berita yang menampilkan wajah terduga pelaku padahal bagaimana statusnya belum ditentukan lebih lanjut. Keterlibatan jurnalis dalam proses-proses penggerebekan yang dilakukan polisi kadang menyebabkan kerancuan dalam status mereka yang diamankan dan kerancuan pemahaman di mata audiensnya.

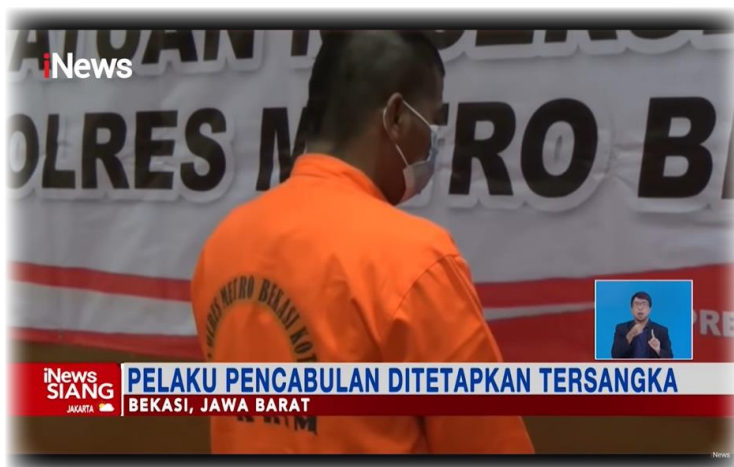
“Yang saya sampaikan kenapa menjadi menarik menurut saya di era kalaborasi sebagai bagian karena memang ada penyampaian responden dari pihak kepolisian bahwa terjadi penggerebekan tersebut terus kemudian dari bahasa polisi tersebut “ini lah para terduga yang nantinya menjadi tersangka” ketika ini disiarkan atau diliput oleh media, apakah proses penggerebekan itu diikuti oleh wartawan atau berita itu datangnya dari seseorang?”

- Prof. Dr. Judhariksawan, SH, MH
(Universitas Hasanuddin)



Prof Dr Judhariksawan

Gambar 27. Berita Kejahatan dengan Penggunaan Narasi dan Pengambilan Gambar yang Tepat



Sumber: iNews, 2021.

Cuplikan berita di atas adalah salah satu bentuk tayangan berita mengenai kejahatan yang berkualitas bagaimana pengambilan gambar dilakukan tanpa memperlihatkan wajah seluruhnya dan ditambahkan judul yang tidak menghakimi.

Penghakiman juga terjadi melalui pengambilan gambar atas barang-barang yang terkait dengan kejadian seperti plat nomor mobil atau bahkan kamera melakukan zoom atau pengambilan gambar secara dekat pada STNK atau SIM atau KTP, bahkan hingga laporan pajak. Para panel ahli juga menegaskan agar lembaga penyiaran dalam memberitakan peristiwa tetap berposisi pada kebenaran.

“Dan satu lagi walaupun bukan masuk ranah hukum tapi ini mungkin mempromosikan eksklusifitas kepada masyarakat pada berita tentang seorang ibu yang rumahnya ditembok dipagari seolah –olah yang bersalah ya ibu yang rumahnya dipagar itu padahal gatau sebab konkritnya apa. Selain berita menyangkut masalah hukum tentang penghakiman ini perlu diperhatikan pengungkapannya sehingga membuat masyarakat tidak merasa benar melakukan penghakiman sendiri”.

- A.A.I Prihandari Satvikadewi, M.Med.Kom
(Universitas Negeri Surabaya)

Panel juga menegaskan pentingnya menjalankan praduga tak bersalah, jurnalis juga sepatutnya memahami bagaimana proses penetapan status hukum seseorang menjadi tersangka, terdakwa dan sebagainya.

“Tersangka itu kan kalau dia sudah melalui proses kepolisian kemudian polisi sudah menetapkan tersangka. Parahnya lagi ada tv yang menyiarkan wajah pelaku yang di mana kedudukannya belum menjadi tersangka. Menurut saya penghakiman secara langsung berbahaya dalam konteksnya. Menurut saya jika sebuah kasus belum diputuskan oleh pengadilan maka seharusnya tetap digunakan praduga tidak bersalah walaupun dia sudah tersangka tetap dia tidak boleh di-blow up.”

- Prof. Dr. Judhariksawan, SH, MH
(Universitas Hasanudin)

“Menurut saya ada kesalahan di redaksi yang tidak paham dgn hukum pidana”

- Dewanto Samodro, M. I. Kom
(Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta)

Panel ahli juga mengatakan sebaiknya dalam pemberitaan dihindari kata pelaku untuk merujuk pada terduga pelaku. Hal ini dikarenakan orang tersebut belum

melalui tahap penyelidikan dan belum ditetapkan sebagai pelaku. Jadi ini adalah bentuk pemvonisan yang dilakukan oleh pers, dan ini tentu saja melanggar fungsi pers yang sesungguhnya.

“Di sini saya menemukan khususnya judul berita “polisi menangkap pelaku”, “pelaku mendekam di kantor polisi” “pelaku menggunakan senjata tajam” banyak sekali menggunakan kata pelaku ini sudah vonis padahal di tahap penyelidikan mestinya tersangka pelaku ini banyak sekali. Saya tidak setuju jika menggunakan kata pelaku.”

- Dr. Aceng Abdullah
(Universitas Padjajaran)

Penghakiman juga dilakukan dalam narasi yang disertakan dalam video berita. Bahkan tak jarang naskah berisikan kata-kata yang tidak baik bahkan penuh provokasi. Seperti contohnya “sadis! Anak bupati langkat siksa tahanan” padahal proses penyelidikan masih berlangsung. Lalu contoh lainnya adalah “sikat saja mafia goreng siapapun dia”. Ini adalah bentuk contoh pemberitaan yang seolah-olah sudah memberikan vonis.

Gambar 28. Berita dengan Penggunaan Narasi yang Subjektif, Menghakimi, dan Menggunakan Kata-Kata yang Berlebihan



Sumber: TV ONE, 2022.

Gambar 29. Berita dengan Penggunaan Narasi yang Subjektif, Menghakimi, dan Menggunakan Kata-Kata yang Berlebihan



Sumber: Metro TV, 2022.

MetroTV bahkan dalam catatan panel ahli termasuk lembaga penyiaran yang cukup keras dalam memberitakan pelaku kejahatan. Kadang gambar video yang ditayangkan cukup dramatis serta penggunaan konsep yang kurang tepat.

“Metro tv ini cenderung bengis terhadap terduga pelaku kejahatan. Misal edisi 9 Februari polisi menemukan 13.500 butir ekstasi disitu gambarnya itu tersangkanya itu ditelundukan di situ terus backsound bagus istrinya nangis-nangis itu menurut saya dramatis lah”

- Dr. Fakhur Rozi, M.I.Kom
(Universitas Sumatera Utara)

Bab III.

Penutup

Memasuki era digital, masyarakat akan semakin dibanjiri oleh informasi. Dalam kondisi banjir informasi, peran lembaga pengawas penyiaran dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia sangat diperlukan untuk menghindari dampak negatif dari informasi dan berita yang diterima masyarakat. Berita dan informasi yang tersebar melalui media massa dan media sosial tentunya memiliki efek yang luar biasa. Ada tiga dimensi efek komunikasi massa: kognitif, afektif, perilaku, atau konatif.

Kategori program berita sendiri telah memiliki nilai indeks kualitas diatas standar KPI (3.00) serta tren yang positif menuju kearah yang lebih baik. Namun, dari segi konten masih perlu banyak peningkatan mutu kualitas.

Untuk itu, KPI diharapkan tetap mengawal dunia penyiaran terkhusus untuk program siaran berita. Mengawasi program televisi Indonesia sehingga dapat menyiarkan isi siaran yang baik dan berkualitas bagi masyarakat.



Focus Group Discussion (FGD) bersama informan ahli dan pengendali lapangan tentang Program Siaran Berita.

Kekuatan media penyiaran yang saat ini masih menjadi keunggulan dari aspek program masih menjadikan program berita sebagai unggulan. Program berita terkadang menjadikan sebuah kekuatan untuk menentukan kredibilitas media tersebut. Hadirnya program berita sebagai sebuah bentuk pemberian informasi kepada masyarakat, sebagai sebuah program dalam pemberian informasi program ini haruslah mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik sebagai ilmu yang mengajarkan dan membentuk para pekerja informasi dalam mengemas paket-paket informasi yang akan ditayangkan.

Perilaku penyiaran Indonesia membuat media menjadi representasi nilai-nilai jurnalistik sebagai sebuah landasan mengelola program-program yang disiarkan. Tak sedikit masyarakat menjadikan media penyiaran sebagai tempat untuk melakukan konfirmasi informasi yang saat ini banyak sekali beredar di berbagai platform pada saat ini.

Memberikan pemahaman serta nilai-nilai jurnalistik yang menjadi acuan keilmuan dan praktis menjadikan lembaga-lembaga yang memiliki konsen harus senantiasa menginformasikannya. Baik ini lembaga negara atau regulator, maupun perguruan-perguruan tinggi yang menghasilkan serta menemukan fenomena-fenomena yang berkembang pada zamannya.

Harapan terhadap media juga tidak pernah padam. Penyiaran yang demokratis dan independent selalu dirindukan. Lembaga penyiaran ke depannya tidak hanya memiliki agenda bisnis tetapi memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Harapan lainnya adalah semakin terwujudnya keragaman konten, dengan bentuk televisi digital maka ini dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Penyiaran dalam menyajikan keragaman konten di layar-layar kaca televisi di Indonesia.

Harapan berikutnya adalah hadirnya peraturan yang lebih tegas dan jelas mengenai penyiaran yang dapat mengatur hal-hal yang kerap menjadi permasalahan tanpa melakukan pengaturan/pelarangan isi konten dan yang lainnya.

Harapan lainnya adalah lembaga penyiaran dapat berperan dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa indonesia yang lebih baik, dan benar dan konteksual karena program berita memiliki potensi untuk itu. Komisi Penyiaran Indonesia juga dapat memberikan meningkatkan keterlibatan publik dalam penilaian kualitas tayangan.

Tantangan Jurnalisme Berkualitas Vs Kecepatan Media Sosial.

Jurnalisme pada titik ini dihadapkan pada beberapa persoalan dan tantangan. Perkembangan dunia digital dengan internetnya menyebabkan setiap orang yang memiliki akses terhadap internet dalam menjadi sumber informasi. Kecepatan media sosial menjadikan sebuah informasi dapat tersebar dengan sesaat ke seluruh penjuru dunia.

Namun kadang kala kecepatan tidak berbanding lurus dengan keakuratan, sumber tidak berbanding lurus dengan netralitas. Ironisnya, banyak jurnalisme yang kemudian ikut hanyut dengan model penyebaran informasi di media sosial. Sumber pemberitaan kemudian dapat berasal dari akun media sosial yang belum diketahui otentifikasinya. Gambar atau video sebagai bagian dari berita diambil dari media sosial atau internet yang kemudian disajikan tanpa melakukan verifikasi.

Beredarnya konten-konten berisikan opini dari beragam pihak yang dapat diakses melalui media sosial atau mesin pencari di internet dapat mempengaruhi persepsi konsumen berita akan kredibilitas sumber berita. Hal ini

kemudian akan mempengaruhi secara signifikan kredibilitas dan kepercayaan pada berita-berita di media utama (Otis, 2022).

Jurnalisme kemudian dipertanyakan kualitasnya, jurnalisme berkualitas yang kemudian diharapkan kembali hadir di tengah gempuran informasi yang tidak terkendali. Jurnalisme televisi memiliki juga tantangan yang lebih berat. Berdasarkan beragam survey mengenai topik kepercayaan sumber informasi, televisi hingga kini masih menjadi sumber informasi yang terpercaya dibandingkan beragam sumber informasi/ media lainnya seperti radio, surat kabar bahkan media sosial itu sendiri. Jadi menjadi tantangan bagi jurnalistik televisi menjaga kualitas tayangan berita agar tetap menjadi wadah verifikasi dan wadah kepercayaan audiens atau khalayak.

Perubahan Bentuk dan Ragam Jurnalisme

Berdasarkan pada undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999, disebutkan kegiatan jurnalistik adalah kegiatan yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Maka kini tantangan terbesar dari berita televisi adalah perubahan atau tuntutan bentuk berita televisi yang juga dapat diakses melalui media-media baru seperti

aplikasi-aplikasi di media-media digital. Hal ini kemudian dikenal dengan konvergensi media, bagaimana satu berita dapat ditampilkan tidak hanya di layar kaca televisi namun juga tampil di smartphone pada genggamannya audiens. Perubahan dinamika ini menuntut tidak hanya media untuk tetap dapat bertahan hidup namun juga menuntut pekerja media khususnya jurnalis untuk mampu beradaptasi akan perubahan ini.

Sebagai penutup, dunia penyiaran di Indonesia memang belum pada tahap ideal, masih banyak ditemukan kekurangan dan permasalahan yang timbul seperti independensi dan tayangan-tayangan yang subjektif. Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia juga belum dinilai bekerja cukup maksimal dalam menjaga ketegakkan demokrasi dunia penyiaran bagi sebagian pihak. Masih ditemukan kasus di mana KPI diharapkan lebih mampu bergerak namun terkungkung pada regulasi yang juga dinilai masih belum memiliki kuasa yang cukup. Namun dari semua permasalahan dan kontroversi ini, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia telah memberi warna dalam upaya tegaknya demokrasi penyiaran di Indonesia. Tantangan memang tak pernah kunjung redam, pergerakkan dinamika sosial, ekonomi hingga teknologi informasi komunikasi membuat lembaga penyiaran khususnya pemberitaan berhadapan dengan ragam perubahan. Namun diharapkan praktik-praktik jurnalisisme yang menyatu pada pemberitaan di lembaga penyiaran tetap tidak lepas dari elemen pentingnya yakni berpihak pada kebenaran,



FGD Program Siaran Berita bersama Pengendali Lapangan dan Informan Ahli dari 12 Perguruan Tinggi di Indonesia.

Referensi

Buku dan Jurnal:

- Dean, Catherine. 2006. "Truth and the Media", paper presented at Strathmore University 4th Ethics Conference on "Media and the Common Good". 3rd - 4th November.
- Deaver, F. 1990. "On Defining Truth". *Journal of Mass Media Ethics*, 5(3), 168-177.
- Entman, R. M. 1993. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm". *Journal of Communication*, 43 (4), 51-58.
- Eriyanto. 2013. "Analisis Naratif, Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks berita Media". Jakarta: Kencana.
- Hensall, P., & Ingram, D. 1991. "The News Manual: A Training Book for Journalists". Sydney: Poroman Press.
- Iyer, V. 2006. "Legal and regulatory aspects of public service broadcasting". *Public Service Broadcasting in the Age of Globalization*, 133-149. Singapore: Asian Media Information and Communication Centre (AMIC).

- Kovach, B., & Rosenstiel, T. 2001. "The elements of journalism: What newspeople should know and what the public should expect". New York: Crown.
- Morani, Marina, Stephen Cushion, Nikki Soo. 2022. Expert voices in the news reporting of the coronavirus pandemic: A study of UK television news bulletins and their audiences. *Journalism*, Sept 24, 2022 <https://doi.org/10.1177/1464884922112762>
- Nasution, Zulkarimein. 2015. "Etika Jurnalisme: Prinsip-prinsip Dasar". Jakarta: Rajawali Pers.
- Otis, Andrew. 2022. The Effects of Transparency Cues on News Source Credibility Online: An Investigation of "Opinion Labels". *Journalism*. Oct 11, 2022 <https://doi.org/10.1177/1464884922112900>
- Pan, Z., & G. M. Kosicki. 1993. "Framing Analysis: An Approach to News Discourse". *Political Communication*, 10, 55-75.
- Papathanassopoulos, S., & Negrine, R. 2010. "Approaches to Communications Policy: An Introduction". *Communications Policy: Theories and Issues*, 3-21. New York: Palgrave MacMillan.
- Rahayu, dkk. 2014. "Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia". Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2M) dan Yayasan TIFA, Yogyakarta
- Shoemaker, P. J., & S.D. Reese. 2014. "Mediating the Message in the 21st Century (3rd ed.). New York: Routledge.
- Ward, Stephen J.A. 2009. "Researching Ethics. History of Journalism Ethics" <http://journalismethics.info/research-ethics/history.htm>

- Westerståhl, J. 1983. "Objective News Reporting: General Premises". *Communication Research*, 10(3), 403-424.
- White, Aidan. 2008. "To Tell You the Truth: The Ethical Journalism Initiative". Brussels Belgium: International Federation of Journalists.

Undang-Undang dan Peraturan :

- Undang-Undang tentang Penyiaran, UU Nomor 32 Tahun 2002, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252.
- Undang-Undang tentang Pers, UU Nomor 40 Tahun 1999, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3387.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia

Laporan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi KPI Tahun 2015-2022:

- Komisi Penyiaran Indonesia. 2015. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Maret – April 2015". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2015. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Mei – Juni 2015". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2015. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Juli – Agustus 2015". Jakarta: KPI Pusat.

- Komisi Penyiaran Indonesia. 2015. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi September – Oktober 2015". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2015. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi November – Desember 2015". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2016. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Tahun 2016". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2016. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2016". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2016. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode III Tahun 2016". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2016. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode IV Tahun 2016". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2016. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode V Tahun 2016". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2017. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Tahun 2017". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2017. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2017". Jakarta: KPI Pusat.

- Komisi Penyiaran Indonesia. 2018. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Januari – Maret 2018". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2018. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Januari – Maret 2018". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2018. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II April – Juni 2018". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2018. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode III Juli – September 2018". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2019. "Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Tahun 2019". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2019. "Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2019". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2020. "Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Tahun 2020". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2020. "Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2020". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2021. "Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Tahun 2021". Jakarta: KPI Pusat.

- Komisi Penyiaran Indonesia. 2021. "Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2021". Jakarta: KPI Pusat.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2022. "Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2022". Jakarta: KPI Pusat.

Profil Penulis



Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si

Lahir di Bogor 1980, Amanda memperoleh gelar sarjana dan magister ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Gelar doktor diraih pada usia 34 tahun, di Kajian Budaya, Universitas Udayana. Pada 2009, ia menjadi dosen di Universitas Udayana setelah lebih dari 8 tahun sebagai jurnalis di BaliTV hingga AntaraTV/LKBN. Ia menjadi wartawan Istana Kepresidenan pada Pemerintahan Megawati hingga SBY. Pengalaman jurnalis mendukung mata kuliahnya di bidang jurnalistik dan media. Sejak 2019, dipercaya menjadi Koordinator Media Udayana, lalu 2021 diangkat menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Perencanaan FISIP Unud, serta anggota BKRAF Denpasar. Selain mengajar, penelitian dan pengabdian yang dilakukannya bekerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional hingga internasional pada isu jurnalistik, media, politik, budaya dan literasi digital. Pada 2022, Ia menjadi awardee International Visitor Leadership Program (IVLP) dari pemerintahan AS, dan berkesempatan meningkatkan kompetensinya di bidang media dan digital literacy di AS. Ia pun tergabung dalam beragam jaringan seperti ISKI, APJIKI, JAPELIDI, PERHUMAS, serta ahli pers Dewan Pers.



Dr. Alem Febri Sonni, S.Sos., M.Si.

Lahir di Padang, 23 Februari 1974, merupakan dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Hasanuddin. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin (2001), gelar magister Manajemen Komunikasi di Universitas Sebelas Maret (2007) dan gelar doktor pada Jurusan Antropologi, Universitas Hasanuddin (2018). Ia juga pernah menjabat sebagai Manager Divisi Audio Visual Global Solusi Intimedia (1999-2002), Koordinator Divisi Fotografi Laboratorium Komunikasi (2003-2005), Manager Program Televisi Laboratorium Komunikasi (2005-2008), Koordinator Infrastruktur Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel (2011-2014), dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel (2014-2017). Kegiatan penyiaran yang diikuti di antaranya Pelatihan Video Journalism (VJ) Broadcast Center Universitas Indonesia, Talk Show Media Penyiaran “Jangan Matikan Radiomu” BBC Siaran Indonesia, Pemateri Workshop Penata Fotografi (Cinematography) Meditatif Makassar, Survey Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan (MKK) Publik Sulsel, Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas), hingga Komite Pendamping Program Acara TVRI Stasiun Sulawesi Selatan Bidang Komunikasi Publik.



Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel S.Sos M.Si

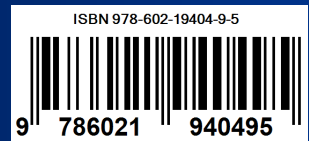
Masih ditemukan kasus di mana KPI diharapkan lebih mampu bergerak namun terkungkung pada regulasi yang juga dinilai masih belum memiliki kuasa yang cukup. Namun dari semua permasalahan dan kontroversi ini, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia telah memberi warna dalam upaya tegaknya demokrasi penyiaran di Indonesia. Tantangan memang tak pernah kunjung redam, pergerakkan dinamika sosial, ekonomi hingga teknologi informasi komunikasi membuat lembaga penyiaran khususnya pemberitaan berhadapan dengan ragam perubahan. Namun diharapkan praktik-praktik jurnalisme yang menyatu pada pemberitaan di lembaga penyiaran tetap tidak lepas dari elemen pentingnya yakni berpihak pada kebenaran.



Dr. Alem Febri Sonni S.Sos M.Si

Kini tantangan terbesar dari berita televisi adalah perubahan atau tuntutan bentuk berita televisi yang juga dapat diakses melalui media-media baru seperti aplikasi-aplikasi di media-media digital. Hal ini kemudian dikenal dengan konvergensi media, bagaimana satu berita dapat ditampilkan tidak hanya di layar kaca televisi namun juga tampil di smartphone pada genggamannya audiens. Perubahan dinamika ini menuntut tidak hanya media untuk tetap dapat bertahan hidup namun juga menuntut pekerja media khususnya jurnalis untuk mampu beradaptasi akan perubahan ini.

Walau buku ini diterbitkan oleh KPI, namun buku ini juga kami persembahkan untuk para pekerja jurnalis televisi, para khalayak tayangan televisi di Indonesia, dan para pemerhati tayangan berita di televisi yang memiliki satu harapan, yakni tayangan berita tetap independen serta selalu berpihak pada kebenaran dan rakyat demi terwujudnya dunia penyiaran yang demokratis.



Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Jl Ir H Juanda no 36, Jakarta Pusat.